

WALENNAE

Jurnal Arkeologi Sulawesi Selatan dan Tenggara
Journal of Archaeological Research of South and Southeast Sulawesi

Dwi Kurnia Sandy, Salma Fitri Kusumastuti

Museum Bawah Air M. V. Boelongan: Sebuah Gagasan
Pembaharuan Museum

*M. V. Boelongan Underwater Museum: A Concept of Museum
Renewal*

Nani Somba, Syahrudin Mansyur, Muhammad Nur

Mistifikasi Ritual Sistem Pertanian Traditional Masyarakat
Ajatappareng, Sulawesi Selatan

*Ritual Mysitification of Traditional Farming System on Ajatappareng
Community, South Sulawesi*

Muhammad Fadhlansyuaib Intan

Simpang Tiga Abadi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi
Sumatera Selatan: Jejak Sungai Lama di Lahan Basah

*Simpang Tiga Abadi, Komering Ilir Regency, South Sumatera
Province, Trances of the Old River Wetland*

Muhajir, Muhammad Nur

Tata Kota Parepare Periode Kolonial Belanda

Urban Planning of Parepare Dutch Colonial Period

Hasrianti

Pemaknaan Arsitektur Vila Yuliana di Soppeng, Sulawesi Selatan
dengan Analisis Semiotika

*The Architetural Meaning of the Vila Yuliana in Soppeng, South
Sulawesi*

Jurnal WALENNAE	Volume 17	Nomor 1	Halaman 1 - 84	Makassar Juni 2019	ISSN 1411-0571
--------------------	--------------	------------	-------------------	-----------------------	-------------------

Copyright
Balai Arkeologi Sulawesi Selatan
2019

ISSN: 1411 – 0571

Jurnal WalennaE pertama kali diterbitkan pada Tahun 1998 dan memuat artikel primer yang bersumber langsung dari hasil penelitian arkeologi yang belum pernah dipublikasikan. Jurnal WalennaE terbit dua nomor dalam setahun.

Alamat Redaksi

Balai Arkeologi Sulawesi Selatan
Jalan Pajaiyang No. 13 Sudiang Raya, Makassar 90242
Telepon : 0411 – 510490 Fax. : 0411 – 510498
Email : jurnal.walennaE@gmail.com
Open Journal System (OJS) : www.walennaE.kemdikbud.go.id
Website: www.arkeologi-sulawesi.com

Jurnal WalennaE mengundang peneliti dan pemerhati budaya untuk menulis artikel ilmiah yang berkaitan dengan kebudayaan dan arkeologi. Naskah yang masuk disunting oleh penyunting ahli. Penyunting berhak melakukan perubahan/penyuntingan tanpa mengubah isi artikel.

WALENNAE

JURNAL ARKEOLOGI SULAWESI SELATAN DAN TENGGARA
Journal of Archaeological Research of South and Southeast Sulawesi

ISSN : 1411 – 0571

Volume 17, Nomor 1, Juni 2019

Dewan Redaksi

Pemimpin Redaksi

Fakhri, S.S.

Sidang Redaksi

Dr. Hasanuddin, M. Hum (Arkeologi Megalitik) Balai Arkeologi Sulawesi Selatan	Drs. Iwan Sumantri, M. A., M. Si. (Arkeologi Sosial) Universitas Hasanuddin
Dr. Muhammad Nur, M. A. (Arkeologi Paleolitik) Universitas Hasanuddin	Yadi Mulyadi, M. A. (Arkeologi Publik) Universitas Hasanuddin
M. Irfan Mahmud, M. Si. (Arkeologi Islam) Balai Arkeologi Sulawesi Selatan	Makmur, S. Kom. (Arkeologi Arsitektur Islam) Balai Arkeologi Sulawesi Selatan
Syahrudin Mansyur, M. Hum. (Arkeologi Kolonial) Balai Arkeologi Sulawesi Selatan	Dra. Bernadeta A.K.W., M. Si. (Etnoarkeologi) Balai Arkeologi Sulawesi Selatan
Drs. Budiarto Hakim (Arkeologi Mesolitik) Balai Arkeologi Sulawesi Selatan	Unggul Prasetyo Wibowo, M.T. (Geologi) Museum Geologi Bandung

Mitra Bestari

Prof. Dr. Akin Duli, M. A. (Universitas Hasanuddin, Indonesia)
Prof. (Ris.) M. Th. Naniek Harkantiningasih (Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Indonesia)
Dr. Angraini Priadi, M. A. (Universitas Gadjah Mada, Indonesia)
Dr. David Bulbeck (Australian National University, Australia)
Dr. Muhlis Hadrawi, M. Hum. (Universitas Hasanuddin, Indonesia)
Drs. M. Bashori Imron, M. Si. (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indonesia)

Redaksi Pelaksana

Ratno Sardi M., S.S.
Ade Sahroni, S.T.
Suryatman, S.S.
Hasliana, S.S.

Alamat Redaksi

Balai Arkeologi Sulawesi Selatan
Jalan Pajaiyang No. 13 Sudiang Raya, Makassar 90242
Telepon : 0411 – 510490 Fax. : 0411 – 510498
Email : jurnal.walenna@gmail.com
Open Journal System (OJS) : www.walenna.kemdikbud.go.id
Website: www.arkeologi-sulawesi.com

PENGANTAR REDAKSI

Dengan mengucapkan syukur penuh pujian bagi Tuhan Yang Maha Esa, Jurnal Walennae Volume 17 Nomor 1 Juni Tahun 2019 kembali kami hadirkan ke hadapan pembaca yang budiman. Edisi kali ini menyajikan lima (5) artikel tentang arkeologi dalam berbagai tema menarik. Diawali dengan artikel bertema museum bawah air oleh Dwi Kurnia Sandy dan Kusumastuti Salma Fitri. Tulisan ini membahas mengenai sebuah gagasan pembaharuan di bidang permuseuman, yaitu dengan menjadikan objek arkeologi bawah air Kapal M.V. Boelongan sebagai museum bawah air.

Artikel selanjutnya oleh Nani Somba, Syahrudin Mansyur, dan Muhammad Nur, dengan mengangkat tema mistifikasi ritual dalam sistem pertanian masyarakat Ajattappareng di Sulawesi Selatan. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pengetahuan terkait sistem kepercayaan dalam pertanian tradisional masyarakat Ajattappareng di Sulawesi Selatan, yang diwujudkan melalui rangkaian ritual.

Jejak sungai lama Situs Simpang Tiga Abadi, menjadi tema yang diangkat oleh Muhammad Fadhlana Syaib Intan. Situs Simpang Tiga Abadi merupakan situs hunian abad ke-9 hingga abad ke-18, salah satu daerah lahan basah di Desa Simpang Tiga, Kabupaten Ogan Komering, pesisir timur Provinsi Sumatera Selatan. Selain membahas tentang kondisi geologi situs, tulisan ini juga membahas mengenai bentuk dan pola aliran sungai lama di wilayah situs.

Dua artikel terakhir dalam edisi ini mengangkat tema dari periode kolonial Belanda, yaitu mengenai tata kota kolonial oleh Muhajir dan Muhammad Nur, dan permaknaan arsitektur kolonial dengan analisis semiotika oleh Hasrianti. Dalam tulisan Muhajir dan Muhammad Nur, pembahasan difokuskan pada bentuk tata kota dan faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk tata kota Parepare, Sulawesi Selatan, pada periode kolonial Belanda. Adapun dalam tulisan Hasrianti, membahas makna simbolik dari unsur-unsur arsitektur Vila Yuliana, salah satu bangunan kolonial di Soppeng, Sulawesi Selatan, dengan pendekatan analisis semiotika.

Demikian gambaran secara garis besar isi edisi kali ini. Atas nama redaksi, kami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak yang berperan dalam penerbitan, atas partisipasi yang tulus diberikan. Kami mengharapkan adanya saran dan koreksi demi perbaikan terbitan edisi selanjutnya. Akhir kata, semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Dewan Redaksi

DAFTAR ISI

Lembar Dewan Redaksi	i
Pengantar Redaksi	ii
Daftar Isi	iii
Lembar Abstrak	iv
<i>Abstract Sheet</i>	v
Dwi Kurnia Sandy, Salma Fitri Kusumastuti	
Museum Bawah Air M. V. Boelongan: Sebuah Gagasan Pembaharuan Museum <i>M. V. Boelongan Underwater Museum: A Concept of Museum Renewal</i>	1-18
Nani Somba, Syahrudin Mansyur, Muhammad Nur	
Mistifikasi Ritual Sistem Pertanian Tradisional Masyarakat Ajatappareng, Sulawesi Selatan <i>Ritual Mystification of Traditional Farming System on Ajattappareng Community, South Sulawesi</i>	19-36
Muhammad Fadhlán Syuaib Intan	
Simpang Tiga Abadi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan: Jejak Sungai Lama di Lahan basah <i>Simpang Tiga Abadi Komering Ilir Regency, South Sumatera Province: Trances of the Old River Wetland</i>	37-56
Muhajir, Muhammad Nur	
Tata Kota Parepare Periode Kolonial Belanda <i>Urban Planning of Parepare Dutch Colonial Period</i>	57-70
Hasrianti	
Pemaknaan Arsitektur Vila Yuliana di Soppeng, Sulawesi Selatan dengan Analisis Semiotika <i>The Architectural Meaning of the Vila Yuliana in Soppeng, South Sulawesi with Semiotic Analysis</i>	71-84
Appendix	

Lembar abstrak ini boleh disalin tanpa izin dan biaya

<p>DDC : 930.1 Dwi Kurnia Sandy, Salma Fitri Kusumastuti Museum Bawah Air M. V. Boelongan: Sebuah Gagasan Pembaharuan Museum Vol. 17 No. 1, Juni 2019, Hal. 1-18 Selain menjadi tempat penyimpanan berbagai artefak, museum juga menjadi media pembelajaran. Namun, saat ini pengelolaan museum di Indonesia masih kurang melayani pengunjung. Museum terdapat di darat dan di perairan. Isu pembuatan museum bawah air sudah menjadi pembahasan di kalangan pecinta museum. Banyak lokasi dan objek dapat dijadikan museum bawah air di Indonesia, salah satunya adalah Kapal M.V. Boelongan. Keberadaan M.V. Boelongan menjadi sebuah daya tarik pariwisata, diantaranya wisata selam. Pembuatan museum bawah air adalah salah satu alternatif yang dapat memberikan manfaat di bidang ekonomi, pendidikan dan pelestarian. Museum Bawah Air M.V. Boelongan memungkinkan pengunjung yang tidak dapat menyelam tetap dapat menyaksikan keberadaan M.V. Boelongan di bawah air. Museum akan dirancang sesuai dengan perkembangan zaman, baik dari sisi pengelolaan maupun perancangan. Hal ini sejalan dengan paradigma museum yang sejak lama digadang-gadang, yaitu membuat museum yang edukatif sekaligus memberikan hiburan bagi pengunjungnya. Selain itu, dengan adanya museum dapat melindungi keberadaan bangkai kapal dan menjadi salah satu cara untuk menjaga kelestarian M.V. Boelongan. M.V Boelongan adalah bagian dari sejarah kemaritiman di Indonesia. Tinggalan budaya materi ini patut dilestarikan dan disampaikan nilai-nilainya. Kata Kunci: Museum Bawah Air, kapal Karam, M. V. Boelongan, Pelestarian.</p>	<p>DDC : 930.1 Nani Somba, Syahrudin Mansyur, Muhammad Nur Mistrifikasi Ritual Sistem Pertanian Tradisional Masyarakat Ajatappareng, Sulawesi Selatan Vol. 17 No. 1, Juni 2019, Hal. 19-36 Wilayah Ajatappareng dikenal sebagai penghasil beras paling utama di Sulawesi Selatan. Sumber-sumber sejarah dan bukti-bukti arkeologi yang ada menunjukkan bahwa tradisi pertanian di wilayah ini telah berlangsung setidaknya sejak abad ke-14. Sejak itu pula, masyarakat Ajatappareng menjalankan sistem pertanian sebagai pengetahuan yang diwariskan secara turun temurun. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengetahuan terkait sistem kepercayaan dalam pertanian tradisional masyarakat Ajatappareng. Penelitian menggunakan metode etnografi dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan diikuti studi literatur. Sistem pertanian tradisional masyarakat Ajatappareng memiliki berbagai tahapan dan proses, pengetahuan masyarakat tidak hanya masalah teknis, tetapi juga menyangkut sistem kepercayaan yang diwujudkan melalui rangkaian ritual. Sistem pertanian ini telah mengalami berbagai perubahan seiring dengan perkembangan pengetahuan masyarakat. Rekaman pengetahuan tentang tradisi pertanian, sistem kepercayaan, serta perubahan-perubahan yang melingkupinya, menjadi penting mengingat tren global yang mengedepankan pengelolaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan Kata Kunci: Pertanian, sistem, ritual, tradisional, ajatappareng.</p>
<p>DDC : 930.1 Muhammad Fadhlan Syuaib Intan Simpang Tiga Abadi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan: Jejak Sungai Lama di Lahan Basah Vol. 17 No. 1, Juni 2019, Hal. 37-56 Pesisir timur Sumatera Selatan merupakan daerah lahan basah yang banyak mengandung tinggalan kepurbakalaan, salah satunya adalah Situs Simpang Tiga Abadi, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Masalah yang terkait dengan lahan basah di wilayah penelitian, adalah bagaimana masyarakat masa lalu mencapai Situs Simpang Tiga Abadi untuk melakukan hubungan sosial dengan masyarakat setempat. Tujuan penelitian untuk mengetahui kondisi lingkungan geologi wilayah penelitian, bentuk dan pola aliran sungai lama di wilayah Simpang Tiga Abadi, dan posisi sungai lama tersebut terhadap Sungai Lebong Hitam atau dengan Sungai Lumpur. Selain kondisi geologi situs ini, dibahas pula tentang pemetaan jejak sungai lama, mencakup pola aliran dan hubungan antara sungai lama dengan sungai-sungai yang masih mengalir saat ini. Metode yang diterapkan, adalah kajian pustaka, survei geologi, dan analisis peta. Hasil pengamatan lapangan membuktikan bahwa bentang alam situs termasuk satuan morfologi dataran dengan kemiringan 0-2%, dan ketinggian dari permukaan air laut adalah 1-7 meter. Berpola aliran deranged, sungai periodis, serta berstadia sungai dewasa-tua. Batuan penyusun situs ini adalah endapan rawa, batupasir kuarsa, dan tufa, serta kelurusan sebagai hasil dari struktur geologi. Rekonstruksi sungai lama ternyata alirannya menyatu dengan Sungai Lebong Hitam dan Sungai Lumpur. Situs Simpang Tiga Abadi dihuni dari abad ke-9 hingga abad ke-18. Kata Kunci: Arkeologi lahan basah, jejak sungai lama, Situs Sumpang Tiga Abadi</p>	<p>DDC : 930.1 Muhajir, Muhammad Nur Tata Kota Parepare Periode Kolonial Belanda Vol. 17 No. 1, Juni 2019, Hal. 57-70 Fokus penelitian ini adalah Kota pelabuhan Parepare pada periode Kolonial Belanda. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana bentuk tata kota dan faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk tata kota Parepare pada periode Kolonial Belanda. Metode yang digunakan adalah penentuan dimensi bangunan Kolonial berdasarkan prasasti, naskah dan hasil wawancara. Pemetaan tata letak bangunan dan jaringan jalan serta analisis fungsi bangunan, organisasi ruang kota, dan analisis faktor pembentuk tata ruang kota juga dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kota Parepare terdiri dari tiga zona. Zona pertama merupakan inti kota ditempati oleh pemerintah Belanda sebagai pusat pemerintahan. Zona kedua adalah kawasan pecinan, diperuntukkan untuk kegiatan perekonomian. Zona ketiga diperuntukkan untuk pemukiman pribumi. Bentuk kota memanjang dari utara ke selatan mengikuti garis pantai. Jaringan jalan pada pusat kota berpola grid. Faktor yang dominan mempengaruhi bentuk kota Parepare adalah faktor geo-politik dan keamanan, untuk menjaga kondusifnya wilayah pesisir barat Sulawesi Selatan. Kata Kunci: Parepare, afdeling, tata kota, grid, Belanda</p>
<p>DDC : 930.1 Hasrianti Pemaknaan Arsitektur Vila Yuliana di Soppeng, Sulawesi Selatan dengan analisis Semiotika Vol. 17 No. 1, Juni 2019, Hal. 71-84 Objek penelitian adalah bangunan kolonial Vila Yuliana di Kabupaten Soppeng. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui makna dibalik keletakan Vila Yuliana dan penggunaan arsitektur lokal pada Vila Yuliana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif induktif. Analisis data menggunakan pendekatan semiotika. Tahap penelitian diawali dengan survei dan berakhir dengan interpretasi data. Hasil analisis menunjukkan unsur-unsur arsitektur bangunan Vila Yuliana memiliki nilai simbolik. Bukan hanya sekedar untuk mendapatkan pemandangan menarik dari keletakannya, juga bukan tanpa alasan memadukan unsur arsitektur kolonial dengan arsitektur lokal. Dibalik hal itu, Vila Yuliana mengandung pesan politis, terutama untuk menunjukkan dominasi kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Kata Kunci: Arsitektur, kolonial, semiotika, Vila Yuliana.</p>	

This abstracts sheet may be reproduced without permission or charge

<p>DDC : 930.1 Dwi Kurnia Sandy, Salma Fitri Kusumastuti <i>M. V. Boelangan Underwater Museum: A Concept of Museum Renewal</i> Vol. 17 No. 1, Juni 2019, Hal. 1-18 <i>Museum is not only a place for storing various artifacts, but also as a media of learning. However, the current management of museums in Indonesia is still not serving visitors well. Museum is not only located on the land, but there are also underwater museums. The plan of build an underwater museum has been discussed by museum practitioners and academics. Many locations and objects that could be used as underwater museums in Indonesia, one of that is the M.V. Boelangan Shipwreck. This ship was sunk by Japanese Army during the Second World War. Nowadays, M.V. Boelongan has been an attractive destination for tourism activities, such as diving. To make it more benefit, not only in economic, but also in education and preservation, build and design this shipwreck as museum is one of the best solution. It could give the chance to everyone to see the shipwreck without diving. This museum should be plan to have a modern design, easier to educate and entertain the visitors, and also to preserve it as a heritage. M.V. Boelongan is a part of Indonesian maritime history, the important values should be preserved and published to the public.</i> Keyword: underwater museum, shipwreck, M. V. Boelangan, preservation.</p>	<p>DDC : 930.1 Nani Somba, Syahrudin Mansyur, Muhammad Nur <i>Ritual Mystification of Traditional Farming System on Ajatappareng Community, South Sulawesi</i> Vol. 17 No. 1, Juni 2019, Hal. 19-36 <i>The Ajatappareng region is known as the most important rice producer in South Sulawesi. Historical sources and archaeological evidence show that agricultural tradition in this region has been going on for at least the 14th century. In that time span, the Ajatappareng community carried out an agricultural system as a system of knowledge passed down from generation to generation. This study aims to obtain a record of knowledge related to the traditional farming system of the Ajatappareng community. It used ethnographic method with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The data obtained illustrates the belief system in the traditional farming system of the Ajatappareng community that has various stages and processes. This belief system is illustrated through a series of rituals that become an integral part of Ajatappareng community's agricultural system. In the process, this agricultural system has undergone various changes along with the development of knowledge. The recording of knowledge about agricultural traditions, belief system and the changes that surround them are important given the global trend that promotes sustainable food agriculture management.</i> Keyword: agricultural, system, ritual, traditional, Ajatappareng.</p>
<p>DDC : 930.1 Muhammad Fadhlan Syuaib Intan <i>Simpang Tiga Abadi Komering Ilir Regency, South Sumatera Province: Trances of the Old River Wetland</i> Vol. 17 No. 1, Juni 2019, Hal. 37-56 <i>The east coast of South Sumatra is a wetland area that contains many archaeological remains, one of which is the Simpang Tiga Abadi Site, Simpang Tiga Village, Tulung Selapan District, Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatera Province. The problem associated with wetlands in the research area is how the past community reached the Simpang Tiga Abadi site to conduct social relations with the local community. The aim of the study was to determine the geological environmental conditions of the study area, the shape and pattern of old river flows in the Eternal Three Junction area, and the position of the old river towards the Lebong Hitam River or the Lumpur River. In addition to the geological conditions of this site, we also discussed the mapping of old river trails, including the flow patterns and relations between old rivers and rivers that are still flowing at this time. The method applied, is literature review, geological survey, and map analysis. The results of field observations prove that the site landscape includes a terrestrial morphological unit with a slope of 0-2%, and the height of the sea level is 1-7 meters. Deranged flow pattern, periodic river, and adult-old river stage. The composition of this site is swamp sediment, quartz sandstone, and tuff, and lineament as a result of geological structures. The old river reconstruction turned out to flow together with the Lebong Hitam River and Lumpur River. The Simpang Tiga Abadi site is inhabited from the 9th century to the 18th century.</i> Keyword: Wetland archaeology, old river trail, Sumpang Tiga Abadi Site.</p>	<p>DDC : 930.1 Muhajir, Muhammad Nur <i>Urban Planning of Parepare Dutch Colonial Period</i> Vol. 17 No. 1, Juni 2019, Hal. 57-70 <i>The focus of this research is the port city of Parepare in the Dutch Colonial period. The problem posed is how the form of urban planning and the factors that influence the form of the city of Parepare in the Dutch Colonial period. The method used is the determination of the dimensions of Colonial buildings based on inscriptions, texts and interviews. Mapping of building layout and road network as well as analysis of building functions, urban space organizations, and analysis of the factors forming city spatial planning are also carried out. The results of the study indicate that the city planning of Parepare consists of three zones. The first zone is the core of the city occupied by the Dutch government as the center of government. The second zone is the Chinatown area, intended for economic activities. The third zone is for indigenous settlements. The shape of the city extends from north to south following the coastline. The road network in the city center has a grid pattern. The dominant factor affecting the shape of the city of Parepare is geo-political and security factors, to maintain the conduciveness of the western coastal region of South Sulawesi.</i> Keyword: Parepare, afdeling, urban planning, grid, Dutch..</p>
<p>DDC : 930.1 Hasrianti <i>The Architectural Meaning of the Vila Yuliana in Soppeng, South Sulawesi with Semiotic Analysis</i> Vol. 17 No. 1, Juni 2019, Hal. 71-84 <i>The object of the research is the Vila Yuliana colonial building in Soppeng Regency. This paper aim is to find out the meaning of the location of Vila Yuliana and the using of local architecture in Vila Yuliana. The method research that was used is an inductive qualitative method. Data analysis used a semiotic approach. The research phase began with a survey and ended with interpretation of the data. The analysis result show that the Vila Yuliana's architectural elements is have some symbolic value. Not only to get an interesting view of the location, with any reason it is also to combine elements of colonial architecture with local architecture. On the contrary, Vila Yuliana contained political messages, especially to show the dominance of the power of the Dutch Indian government.</i> Keyword: Architecture, colonial, semiotic, Vila Yuliana.</p>	



MUSEUM BAWAH AIR M. V. BOELONGAN: SEBUAH GAGASAN PEMBAHARUAN MUSEUM

M. V. Boelongan Underwater Museum: A Concept of Museum Renewal

Dwi Kurnia Sandy^{1a}, Salma Fitri Kusumastuti¹

¹ Departemen Arkeologi, Universitas Gadjah Mada

Jl. Sosiohumaniora, No. 1, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia

^a dksandy22@gmail.com

Naskah diterima: 20/03/2019; direvisi: 04/04-23/05/2019; disetujui: 10/06/2019

Publikasi ejurnal: 30/06/2019

Abstract

Museum is not only a place for storing various artifacts, but also as a media of learning. However, the current management of museums in Indonesia is still not serving visitors well. Museum is not only located on the land, but there are also underwater museums. The plan of build an underwater museum has been discussed by museum practitioners and academics. Many locations and objects that could be used as underwater museums in Indonesia, one of that is the M.V. Boelongan Shipwreck. This ship was sunk by Japanese Army during the Second World War. Nowadays, M.V. Boelongan has been an attractive destination for tourism activities, such as diving. To make it more benefit, not only in economic, but also in education and preservation, build and design this shipwreck as museum is one of the best solution. It could give the chance to everyone to see the shipwreck without diving. This museum should be plan to have a modern design, easier to educate and entertain the visitors, and also to preserve it as a heritage. M.V. Boelongan is a part of Indonesian maritime history, the important values should be preserved and published to the public.

Keyword: *underwater museum, shipwreck, M.V. Boelangan, preservation.*

Abstrak

Selain menjadi tempat penyimpanan berbagai artefak, museum juga menjadi media pembelajaran. Namun, saat ini pengelolaan museum di Indonesia masih kurang melayani pengunjung. Museum terdapat di darat dan di perairan. Isu pembuatan museum bawah air sudah menjadi pembahasan di kalangan pecinta museum. Banyak lokasi dan objek dapat dijadikan museum bawah air di Indonesia, salah satunya adalah Kapal M.V. Boelongan. Keberadaan M.V. Boelongan menjadi sebuah daya tarik pariwisata, diantaranya wisata selam. Pembuatan museum bawah air adalah salah satu alternatif yang dapat memberikan manfaat di bidang ekonomi, pendidikan dan pelestarian. Museum Bawah Air M.V. Boelongan memungkinkan pengunjung yang tidak dapat menyelam tetap dapat menyaksikan keberadaan M.V. Boelongan di bawah air. Museum akan dirancang sesuai dengan perkembangan zaman, baik dari sisi pengelolaan maupun perancangan. Hal ini sejalan dengan paradigma museum yang sejak lama digadang-gadang, yaitu membuat museum yang mengedukasi sekaligus memberikan hiburan bagi pengunjungnya. Selain itu, dengan adanya museum dapat melindungi keberadaan bangkai kapal dan menjadi salah satu cara untuk menjaga kelestarian M.V. Boelongan. M.V. Boelongan adalah bagian dari sejarah kemaritiman di Indonesia. Tinggalan budaya materi ini patut dilestarikan dan disampaikan nilai-nilainya

Kata Kunci: Museum bawah air, kapal karam, M. V. Boelangan, pelestarian.

PENDAHULUAN

Kepulauan Indonesia berada di persimpangan jalur perdagangan dunia. Sejak dahulu, di wilayah ini sudah berdiri kerajaan-kerajaan yang tidak hanya

menguasai daratan namun juga mampu menaklukkan lautan. Lautan memiliki peranan besar bagi kemajuan kerajaan-kerajaan di masa lalu. Tidak berhenti pada masa kerajaan Hindu-Buddha maupun

Islam, pada masa kolonial pun eksistensi lautan Indonesia masih terus berlanjut. Sebagai bukti adanya kontak budaya di lautan, tinggalan arkeologi bawah air berupa kapal karam menjadi tinggalan yang penting. Dalam perkembangannya, peneliti di Indonesia sering menggunakan kata *shipwreck* untuk melakukan kajian atau penelitian-penelitian pada kapal karam.

Persebaran kapal karam di wilayah perairan Indonesia biasanya mengikuti jalur pelayaran khusus yang lebih dikenal dengan *The Spice and Silk Routes* (jalur rempah dan sutera). Pada jalur ini banyak ditemukan kapal dari abad pertengahan yang diperkirakan karam ketika akan melakukan kontak perdagangan dengan masyarakat lokal. Namun, pola tersebut mulai berubah ketika terjadi perang dunia dan mengakibatkan banyaknya temuan kapal karam yang lebih modern (terbuat dari logam) pada jalur yang bukan perlintasan *The Spice and Silk Routes*. Salah satu jalur yang bukan termasuk *The Spice and Silk Routes* adalah pantai barat Sumatera. Pada jalur ini ditemukan *shipwreck* M.V. Boelongan Nederland.

M. V. Boelongan Nederland adalah bangkai kapal Belanda yang tenggelam di Teluk Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 2 Januari 1942 akibat bombardir oleh tentara

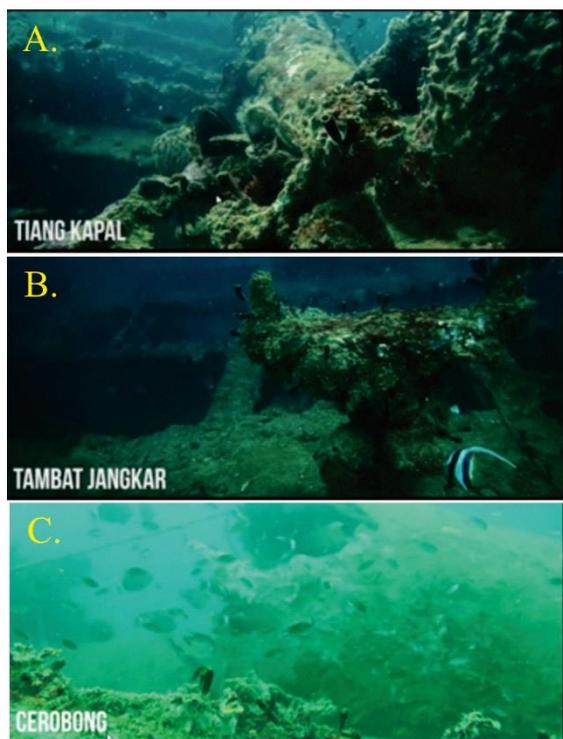
Jepang saat Perang Dunia ke-2 (Ridwan, Kusumah, Husrin, & Kepel, 2015, p. 90). Kapal berjenis kargo ini adalah milik perusahaan pelayaran Belanda, *Koninklijke Pakeetvaart Maatschappij* (KPM). Kapal tersebut dibuat pada tahun 1915 oleh perusahaan Gebroeders Pot N.V, sementara bagian mesin dibuat oleh perusahaan Werkspoor N.V. Dimensi asli kapal yaitu 72,6 m x 11,63 m x 3,7 m ([gambar 1](#)).

Pada awal tahun 1942 pada saat meletusnya Perang Dunia II, kapal kargo ini digunakan tentara Hindia-Belanda untuk melarikan diri dari serangan tentara Jepang yang mulai menguasai kawasan barat Pulau Sumatera. Namun, pelarian tersebut diketahui oleh pihak Jepang. Karenanya, tentara Jepang menjatuhkan bom dari pesawat udara dan menyebabkan kapal karam. Kapal MV. Boelongan Nederland kembali ditemukan pada tahun 1993 oleh Samsuardi, Penyelam dari Yayasan Minang Bahari ([gambar 2](#)).

Dalam naskah UNESCO *Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage* Tahun 2001 Pasal 1 disebutkan bahwa *Underwater Cultural Heritage* (cagar budaya bawah air) adalah tinggalan yang menjadi bukti keberadaan manusia yang memiliki kaitan dengan kebudayaan, kesejarahan, dan kearkeologian yang sebagian atau seluruhnya berada di dalam air



Gambar 1. Kapal M. V. Boelongan Nederland tahun 1915 (**Sumber:** wrecksite.com)



Gambar 2. Kondisi Kapal Karam saat ini (Sumber: Tim PKM PSH UGM Boelongan, 2016).

pada waktu tertentu atau secara terus-menerus selama sekurang-kurangnya 100 tahun. Pada Ayat (ii) disebutkan bahwa tinggalan yang dimaksud dapat berupa kapal, pesawat, kendaraan lain atau bagian dari kargo beserta konteks arkeologi dan konteks alam (UNESCO, 2001). Hingga tulisan ini dibuat, Pemerintah Indonesia masih dalam upaya penyusunan naskah untuk meratifikasi konsensus UNESCO tersebut.

M.V. Boelongan merupakan kapal karam yang memiliki potensi diantaranya dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Pengelolaan yang baik diperlukan untuk menjaga keberadaannya. Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2015 tentang Museum, Pasal 1 Ayat (12), yang dimaksud dengan pengelolaan adalah upaya terpadu melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu pembuatan museum di lokasi penemuan M. V. Boelongan dinilai cocok untuk mempertahankan keberadaan kapal sekaligus menyampaikan berbagai nilai dan pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Mengapa museum? Karena museum dapat memberikan sarana kepada masyarakat dengan berbagai latar belakang dan kemampuan untuk menikmati dan mempelajari sebuah cagar budaya.

Dalam paradigma *New Museology*, museum yang sesuai dengan perkembangan zaman adalah museum yang memperhatikan aspek partisipasi dan juga perkembangan teknologi. Selain itu, pengelolaan museum yang tepat (*appropriate museology*) juga harus memperhatikan kelestarian dari warisan budaya dan keadaan sosio-ekonomi masyarakat sekitar (Kreps, 2011, p. 26). Museum ini nantinya akan digagas sebagai Museum Bawah Air M.V. Boelongan yang akan dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan perkembangan paradigma museum dan menjadi museum yang bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan konstitusi yang berlaku di Indonesia, setiap cagar budaya ataupun yang belum ditetapkan menjadi cagar budaya namun sudah memenuhi syarat menjadi cagar budaya harus dilakukan pengelolaan. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat (21) UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menerangkan bahwasanya pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Walaupun belum ditetapkan menjadi cagar budaya, benda yang sudah memenuhi aspek untuk menjadi cagar budaya, memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama dengan cagar budaya. Persebaran cagar budaya dan non cagar budaya tidak hanya berfokus pada

yang berada di daratan, namun juga termasuk tinggalan yang ada di perairan. Tinggalan benda di perairan yang memiliki syarat untuk menjadi cagar budaya biasanya disebut dengan istilah sumber daya arkeologi bawah air.

Meskipun sudah terdapat aturan mengenai perlindungan cagar budaya, faktanya banyak terjadi perusakan pada sumber daya arkeologi bawah air berupa *shipwreck*. Beberapa kasus pengelolaan tinggalan bawah air kapal karam telah dieksploitasi secara berlebihan oleh penyelam dan pencari harta karun. Dari berbagai tinggalan tersebut, hanya terdapat beberapa yang masih belum dieksploitasi secara berlebihan dan sebagian ini yang harus dikelola dengan benar (Green, 2004, p. 369). Masalah eksploitasi muncul akibat perbedaan tafsir antar berbagai lembaga.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia memiliki pandangan lain terkait sumber daya arkeologi bawah air, mereka menyebutnya dengan benda berharga asal muatan kapal tenggelam (BMKT). Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan nomor: KEP.56/DJ-PSDKP/2011, BMKT adalah benda berharga yang memiliki nilai sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi yang tenggelam di wilayah perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan landas kontinen Indonesia, paling singkat berumur 50 (lima puluh) tahun. Aturan ini mengisyaratkan bahwasanya yang menjadi fokus adalah muatan kapalnya. Padahal kapal karam memiliki arti bagi perkembangan bangsa yang juga harus dikelola. Pengelolaan ini akan memberikan kesadaran pada masyarakat dan segala pihak atas nilai situs dan pada akhirnya memiliki kesadaran bersama dalam merawat (Adhityatama, 2012, p. 41). Selain itu, pengelolaan harus menghasilkan sebuah sistem yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara sumber daya

arkeologi bawah air untuk masa depan, untuk membuat perencanaan yang dapat menjamin perlindungan terhadap situs dalam jangka panjang.

Saat ini terdapat dua kapal yang sangat masif dimanfaatkan dan dikelola sebagai destinasi wisata dan edukasi yaitu, kapal US Liberty Tulamben, Bali dan Indonor Karimunjawa, Jepara. Berbagai penelitian dan gagasan sudah banyak dilakukan. Diantaranya adalah gagasan mengenai jalur penyelaman yang aman dan edukatif di sekitar *shipwreck* US Liberty (Adhityatama, 2012, p. 81). Sebenarnya, kapal MV. Boelongan memiliki potensi yang sama besarnya untuk dikelola.

Saat ini kapal M.V. Boelongan tercatat sebagai cagar budaya oleh BPCB Batu Sangkar dengan nomor inventaris No. 14/BCB-TB/A/14/2007 (Ridwan et al., 2015, p. 85). Meskipun sampai saat tulisan ini dibuat Surat Keputusan penetapan benda cagar budaya dari kapal M.V. Boelongan masih belum ada, kapal karam ini tetap harus mendapat perlakuan sama dalam pengelolaan. Hal ini karena kapal karam MV. Boelongan memiliki nilai penting salah satunya dalam perang dunia II (Prasetya, 2018, p. 6). Berangkat dari pemikiran bahwa semua sumber daya arkeologi harus dapat dinikmati semua kalangan, maka pembuatan museum bawah air menjadi sebuah gagasan yang diharapkan mampu menjawab persoalan tersebut.

Sebelum masuk ke pembahasan inti terkait museum bawah air, harus diketahui lebih dahulu bagaimana perkembangan museum dari masa ke masa. Hal ini penting sebagai landasan kenapa gagasan museum bawah air M.V. Boelongan muncul. Museum untuk masyarakat mulai dirintis pada abad pencerahan di Eropa. The Ashmolean Museum yang didirikan pada tahun 1683 oleh Universitas Oxford, Inggris adalah museum pertama yang dibuka dan ditujukan untuk umum. Koleksi yang dipamerkan adalah bermacam-macam benda

dari seluruh dunia yang dibawa oleh para pedagang. Sebelum dipamerkan di museum, benda-benda ini hanya ditampilkan di rumah mereka di London. Selanjutnya, pada tahun 1759 di London pemerintah menginisiasi berdirinya The British Museum. Hal yang sama juga dilakukan pemerintah Prancis pada tahun 1793 dengan mendirikan The Louvre (Lewis, 2010, p. 2). Pada masa selanjutnya di Asia, museum didirikan oleh perkumpulan masyarakat yang juga terdiri dari orang-orang Eropa. Pada tahun 1778 di Jakarta, Perkumpulan Masyarakat Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan mendirikan museum yang merupakan cikal-bakal dari Museum Nasional Indonesia saat ini. Begitu juga di India pada tahun 1784, masyarakat Asia Bengal mendirikan museum yang menjadi awal dari Museum India di Kalkuta (Lewis, 2010, p. 3).

International Council of Museum (ICOM) mendefinisikan museum sebagai lembaga permanen non-profit dan didirikan untuk kepentingan serta kemajuan masyarakat. Museum mengumpulkan, mengonservasi, meneliti, menyampaikan, dan memamerkan warisan bendawi maupun non-bendawi milik manusia dan lingkungannya untuk tujuan edukasi/pembelajaran dan hiburan (ICOM, 2007). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat (1) museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat (3) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan koleksi adalah benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya, dan/atau bukan cagar budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata.

Maka dari itu, sejalan dengan definisi museum menurut ICOM maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, suatu museum hendaknya dapat menyampaikan informasi mengenai koleksi yang dimilikinya kepada masyarakat luas. Museum harus menjadi tempat mendidik dengan memasukkan unsur-unsur menghibur secara seimbang, sehingga dapat menjadi wahana pendidikan yang memiliki nuansa berbeda dengan tempat pendidikan formal biasa. Selama ini museum hanya dipandang sebagai tempat penyimpanan barang-barang tua sehingga minat masyarakat untuk mengunjungi museum menjadi minim. Sebaliknya, gairah pemerintah untuk mendirikan museum di daerah-daerah cenderung meningkat. Momentum ini seharusnya dimanfaatkan oleh dunia permuseuman di Indonesia untuk bangkit dengan melakukan “penataan kembali”, baik dari sisi perancangan museum maupun kerangka pikir dan cara pandang terhadap museum (Tanudirjo, 2007, pp. 15–17).

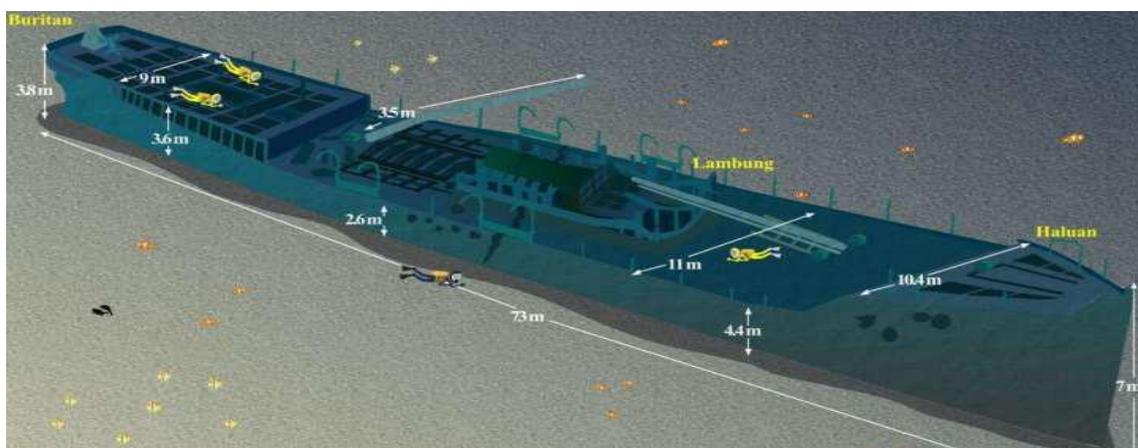
Berkaitan dengan “penataan kembali” kerangka pikir dan cara pandang terhadap museum, sebenarnya gerakan pembaharuan terhadap museum atau revolusi museum sudah terjadi beberapa kali. Revolusi museum pertama berlangsung pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 dan ditandai dengan perubahan pada pendekatan museum yang tadinya multidisiplin menjadi interdisiplin. Selanjutnya pada tahun 1960 muncul revolusi museum kedua dimana museologi diakui sebagai sebuah disiplin ilmu dan mulai diajarkan di perguruan tinggi (Mensch, 1992, pp. 4–5). Perkembangan ini terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya, hingga pada tahun 1970-an lahir sebuah pemikiran yang disebut dengan *New Museology*. Pada era 2000-an, revolusi museum ketiga terjadi dan masih kita saksikan hingga saat ini. Revolusi museum ketiga menyoroti hal yang terkait dengan

partisipasi di museum (Mensch & Mensch, 2011, p. 13). Adanya berbagai perkembangan dalam dunia permuseuman ini tentu memiliki kaitan dengan keadaan sosial-ekonomi dan politik pada masing-masing masa (Sandell, 1998, pp. 401–402). Perlu diingat pula bahwa berbagai perkembangan ini pada awalnya dilahirkan di negeri-negeri barat seperti Eropa dan Amerika. Namun, bukan tidak mungkin jika berbagai teori pembaharuan yang telah disampaikan tersebut diterapkan di Indonesia. Salah satu pembaharuan tersebut adalah gagasan mengenai partisipasi di museum. Gagasan partisipasi di museum muncul sebagai respon atas museum “lama” yang selama ini lebih berfokus pada aspek-aspek teknis dan metodologis museum, menerapkan pembatasan dari atas ke bawah (*top-down limitation*), tidak mengedepankan aspek sosial museum dan kurang memperhatikan aspek-aspek lokal di masyarakat (Kreps, 2011, p. 28).

Adanya berbagai perkembangan dalam dunia permuseuman ini tentu memiliki kaitan dengan keadaan sosial-ekonomi dan politik pada masing-masing masa (Sandell, 1998, pp. 401–402). Perlu diingat pula bahwa berbagai perkembangan ini pada awalnya dilahirkan di negeri-negeri barat seperti Eropa dan Amerika. Namun, bukan tidak mungkin jika berbagai teori

pembaharuan yang telah disampaikan tersebut diterapkan di Indonesia. Salah satu pembaharuan tersebut adalah gagasan mengenai partisipasi di museum. Gagasan partisipasi di museum muncul sebagai respon atas museum “lama” yang selama ini lebih berfokus pada aspek-aspek teknis dan metodologis museum, menerapkan pembatasan dari atas ke bawah (*top-down limitation*), tidak mengedepankan aspek sosial museum dan kurang memperhatikan aspek-aspek lokal di masyarakat (Kreps, 2011, p. 28).

Banyak kasus di Indonesia dimana museum masih berfokus pada koleksi. Seperti yang terjadi di Museum Trowulan, dimana pihak museum dinilai belum berperan optimal dalam memediasi masyarakat dengan pemerhati budaya. Di daerah Trowulan sangat terlihat banyak kepentingan, misalnya antara masyarakat yang memanfaatkan tanah liat dan temuan batu bata Trowulan untuk kebutuhan hidupnya dengan pelestari budaya yang tidak memperbolehkan adanya pemanfaatan batu bata Trowulan supaya Situs Trowulan dapat terjaga (Winaya, 2015, pp. 98–99). Padahal seharusnya sebagai lembaga pendidikan dan sosial, museum harus mulai bergerak ke arah *New Museology* agar dapat berperan aktif sebagai mediator dalam permasalahan ini.



Gambar 3. Rekonstruksi 3D Shipwreck Boelongan (Sumber: Tim PKM PSH UGM Boelongan, 2016).

Masalah di atas dipecahkan dengan sebuah konsep museum baru yang bernama *Open Air Museum*, yaitu sebuah lapangan terbuka yang di dalamnya terdapat koleksi bangunan bersejarah lengkap dengan kegiatan sesuai dengan karakteristik dan sosial di sekitarnya serta dilindungi secara terintegrasi (Wahyudi & Kuswanto, 2014, p. 68). Konsep yang ditawarkan oleh Wahyudi dan Kuswanto (2014) adalah salah satu gerakan pembaharuan museum yang melibatkan masyarakat Trowulan, pelestari budaya serta pengunjung dalam pelestarian warisan budaya. Masyarakat akan mendapatkan pekerjaan yang mampu menggantikan pekerjaan yang merusak situs. Pelestari budaya dibantu dalam melestarikan warisan budaya, sedangkan pengunjung mendapatkan pengalaman yang berbeda saat mengunjungi museum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pembentukan museum bawah air M. V. Boelongan ([gambar 3](#)) merupakan salah satu bentuk gerakan pembaharuan baik dalam hal pengelolaan sumber daya arkeologi bawah air maupun permuseuman di Indonesia. Di belahan negara lain, museum bawah air telah dapat dinikmati dan ada beberapa yang masih dalam tahap perencanaan. Contohnya The Baiheliang Underwater Museum, China. Museum ini berada di punggung batu dan juga merupakan situs arkeologi di Fuling, China. Museum ini dari data UNESCO tahun 2018 menampilkan beberapa prasasti hidrologis tertua di dunia, rekaman 1.200 tahun perubahan di permukaan air sungai Yangtze di utara distrik Fuling Municipality Chongqing. Museum ini merupakan museum bawah air pertama di dunia. Selanjutnya ada The Guangdong Maritime Silk Road Museum (Nanhai No. 1 Museum), China yang menampilkan sebuah kapal karam yang mampu menampung 60.000 sampai 80.000 barang berharga terutama keramik. Selain itu konsep museum bawah air Alexandria, Mesir juga telah dipaparkan. Museum ini dari data UNESCO tahun 2018 akan menampilkan

artefak yang ditemukan di istana dari Dinasti Ptolemaic, dari situs Kota Cekung serta sisa-sisa mercusuar Alexandria.

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan di atas, muncul pertanyaan yaitu, mengapa museum bawah air cocok untuk mengelola *shipwreck* M. V. Boelongan? Selain itu bentuk rancangan museum yang ditinjau dari berbagai aspek juga perlu dijelaskan dalam artikel ini. Artikel ini diharapkan dapat menjadi salah satu *role model* pengelolaan tinggalan bawah air terutama kapal karam. Selanjutnya diharapkan gagasan ini menjadi pemicu diskusi perihal pembaharuan museum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan sebuah gagasan atau pendahuluan (*preliminary research*) dalam memahami fenomena pengelolaan tinggalan bawah air terutama tinggalan kapal karam. Dalam penyusunannya, artikel ini menggunakan studi pustaka yakni menghimpun dan menyusun literasi terkait, terutama mengenai pengelolaan sumber daya arkeologi bawah air dan permuseuman. Setelah data terkumpul, data-data tersebut selanjutnya akan dideskripsikan secara detail dan dilakukan analisis (Tanudirjo, 1989, p. 12). Analisis-*analisis* yang telah dikumpulkan lalu disintesa sehingga memunculkan konsep atau gagasan. Konsep atau gagasan yang dimunculkan mempertimbangkan berbagai aspek yang akan diutarakan dalam artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Museum Bawah Air M. V. Boelongan.

Di Indonesia terdapat dua badan hukum yang dapat melakukan pengelolaan museum secara mandiri. Dua badan hukum tersebut adalah yayasan untuk museum milik swasta dan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) untuk museum milik pemerintah. Adanya

paradigma baru di dunia permuseuman dunia membuat beberapa aspek dari badan hukum museum terutama museum pemerintah menjadi tidak relevan lagi. Terdapat dua permasalahan yang menimpa museum saat ini yaitu masalah pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia atau pengelola museum (Ujianto & Isharyanto, 2016, p. 93).

Museum yang berada di bawah pemerintah (UPT/UPTD), tidak hanya berperan sebagai salah satu pilihan dari destinasi wisata, namun juga digunakan sebagai penyumbang Pemasukan Asli Daerah (PAD). Sejak diberlakukannya otonomi daerah, semua museum milik pemerintah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat ataupun daerah, sehingga pembiayaan museum tergantung kekuatan finansial setiap daerah dan bantuan pemerintah pusat (Mustiko, 2012, p. 18). Hal ini diperparah dengan penggunaan anggaran museum yang lebih banyak dibelanjakan ke kebutuhan perawatan koleksi dan kebutuhan gedung. Kebutuhan terkait pelayanan kepada pengunjung mendapat porsi kecil dalam alokasi anggaran museum.

Setelah memperhatikan hal-hal di atas, maka pengelolaan museum bawah air M.V. Boelongan akan menggunakan sistem Badan Layanan Umum (BLU). Penggunaan sistem ini terinspirasi dari tulisan Ujianto (2016) yang mulai menggagas adanya kemandirian dalam pengelolaan keuangan museum (Ujianto & Isharyanto, 2016). Badan Layanan Umum (BLU), adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keinginan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (UU No. 23 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1). Penggunaan BLU untuk pengelolaan museum ini didasarkan pada konstitusi Indonesia yaitu,

setiap hal yang menyangkut hak hidup orang banyak maka diambil alih negara. Jika museum diserahkan kepada swasta maka orientasinya akan mencari keuntungan. Padahal jelas, museum merupakan sebuah lembaga pendidikan yang tidak diperuntukkan untuk mencari keuntungan.

Salah satu keuntungan menjadi BLU adalah adanya otonomi pengelolaan keuangan dan otonomi atas kelembagaan dengan tetap diawasi oleh pemerintah pusat. Dalam BLU dikenal istilah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Berdasarkan UU No 23 Tahun 2005, PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat. PPK-BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Meskipun menerapkan praktik bisnis, namun uang hasil bisnis tersebut diputar dalam tubuh museum, karena pada dasarnya yang dilarang itu adalah mencari keuntungan untuk diri sendiri atau kelompok. Jika mencari keuntungan untuk kebutuhan museum maka hal tersebut tidaklah salah untuk dilakukan.

Museum pemerintah yang ingin memiliki badan hukum berupa BLU, harus memenuhi tiga persyaratan yaitu persyaratan substantif, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif (Ujianto & Isharyanto, 2016). Secara substantif museum sudah memenuhi syarat untuk menjadi BLU, karena syarat substantif akan terpenuhi bila lembaga tersebut bergerak dalam bidang pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tercermin dalam UU No. 66 Tahun 2015 yang menerangkan bahwa museum sebagai lembaga yang melindungi, mengembangkan, memanfaatkan dan mengkomunikasikan koleksi kepada masyarakat dan mempunyai tugas pengkajian, pendidikan, dan kesenangan

guna melayani masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Persetujuan dari sisi teknis didapat apabila pejabat terkait setuju untuk berubah menjadi BLU (Ujiyanto & Isharyanto, 2016).

Pemenuhan syarat dari segi administratif, museum harus merancang strategi bisnis jangka lima tahun yang mengacu kepada rencana strategis lembaga terkait (Ujiyanto & Isharyanto, 2016, p. 99). Museum perlu membenahi berbagai fasilitas yang mereka miliki guna meningkatkan ketertarikan masyarakat berkunjung ke museum. Selain fasilitas, museum perlu untuk merancang strategi dan program pemasaran yang efektif dan saling terintegrasi (Wibowo, 2015, p. 37). Museum harus diberikan kebebasan dalam melakukan penyusunan, karena museum lebih mengetahui kemampuan dan kebutuhannya sendiri. Penyusunan yang mandiri berdampak pada perencanaan promosi museum yang lebih disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki. Pemahaman akan kebutuhan pengelolaan bagi setiap objek wisata seperti museum masih sering dijumpai. Hal ini dikarenakan beberapa pihak masih terpatok pada pengertian museum sebagai lembaga *non-profit* (Satyawati, 2016, p. 15).

Kriteria lain yang mencirikan museum pasca modern adalah museum berkembang menjadi sebuah pusat kegiatan sosial budaya, meskipun fungsi utama museum tetap sebagai tempat menyimpan dan melestarikan warisan budaya (Yulianti, 2011, p. 14). Hal ini dapat tercapai jika pengelola museum lebih berfokus pada pelayanan pengunjung. Namun masalahnya, museum selalu terkendala keuangan dan sumber daya saat akan melakukan pelayanan maksimal pada pengunjung. Sebagai lembaga yang memberikan jasa kepada masyarakat, museum dapat mengambil atau memungut imbalan sebagai balasan jasa yang mereka berikan. Secara garis besar,

museum diperbolehkan mencari keuntungan dari layanannya selama keuntungan tersebut hanya diperuntukan untuk perbaikan layanan museum. Jasa yang dimaksud berupa pelayanan dan hiburan saat berkunjung.

Perlu diperhatikan, pengelolaan keuangan museum pemerintah di Indonesia saat ini tidak memungkinkan untuk memutar uangnya sebagai modal membuka usaha, karena museum tidak memiliki otonomi keuangan. Segala pendapatan yang didapatkan museum tidak dikembalikan ke museum melainkan dimasukkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Mustiko, 2012, p. 3). Pungutan yang diperoleh dari pengunjung tidak dapat digunakan langsung oleh museum. Oleh sebab itu penggunaan sistem BLU memungkinkan pungutan dikelola langsung oleh museum.

Biaya pungutan kepada pengunjung harus menyesuaikan dengan pedoman yang ada di setiap aturan tingkatan administrasi museum berada. Imbalan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disesuaikan dengan hasil investasi dana. Tarif juga harus memperhatikan keberlanjutan, kelembagaan layanan, persaingan bisnis dan rasa keadilan (Ujiyanto & Isharyanto, 2016, p. 99). Museum BLU dapat membuat usaha mereka secara mandiri. Sebagai implementasinya kepada museum M.V. Boelangan, pengelola dapat membuka beberapa peluang usaha.

Posisinya di dalam wilayah pengembangan wisata Kabupaten Pesisir Selatan memungkinkan untuk menarik banyak pengunjung. Pengunjung dapat melihat pemandangan dari atas museum. Rumah-rumah di sekitar museum dimanfaatkan sebagai tempat penginapan bagi pengunjung. Jika terdapat pengunjung yang ingin menyelam, museum dapat membuka usaha jasa peminjaman peralatan selam beserta pendamping penyelaman. Semua potensi tersebut akan memberikan pemasukan yang besar jika dikelola dengan baik. Sebagai contoh, Museum Benteng

Vredeborg di Yogyakarta membuka kafe kopi di sisi utara museum sebagai sebuah upaya tambahan pemasukan. Selain kafe, bagian bangunan diorama empat juga dimanfaatkan sebagai tempat berbagai acara seminar diskusi dan sarasehan (Prasetya, 2012, p. 118).

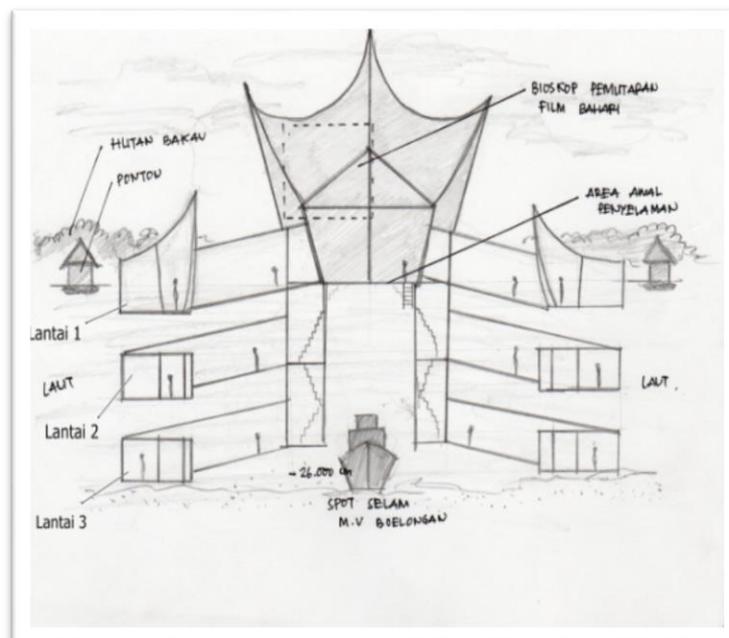
Dengan haknya mengurus keuangan sendiri, Museum BLU harus melakukan praktik bisnis yang sehat berupa pengelolaan kas yang transparan, sebagai dasar BLU dalam mengelola pendapatannya secara profesional. Pola pengelolaan keuangan BLU menitikberatkan pada fleksibilitas keuangan anggaran yang termasuk pada pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan aset, pengelolaan utang serta pengelolaan kas. Sikap profesional pengelola BLU dapat dilihat dari sikap pengelola BLU yang produktif serta efektif. (Wicaksono, 2015, p. 8). Atas dasar tersebut, museum BLU wajib melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode akuntansi, melakukan pemungutan pendapatan, menyimpan dan mengelola kas di rekening bank umum, melaksanakan

pembayaran atas kewajiban BLU, mencari sumber daya penutup defisit jangka pendek, serta memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh tambahan pendapatan melalui investasi jangka pendek dengan resiko kecil (Ujiyanto & Isharyanto, 2016, p. 103).

2. Rancangan Museum Bawah Air M.V. Boelongan.

Museum Bawah Air M.V. Boelongan dibuat dengan rancang bangun sedemikian rupa agar dapat menjadi pelindung bagi keberadaan *shipwreck* M.V. Boelongan (gambar 4 dan 5). Museum ini juga menjadi area zonasi penyelaman, mengingat lokasi bangkai kapal yang menjadi daya tarik pariwisata selam. Dengan adanya museum bawah air ini, keberadaan *shipwreck* akan lebih terlindungi. Selain sebagai tempat yang atraktif dan edukatif, museum akan menjadi pelestari bagi *shipwreck* itu sendiri.

Bentuk bangunan museum adalah tanduk kerbau. Kerbau bagi masyarakat Minangkabau adalah hewan yang dianggap



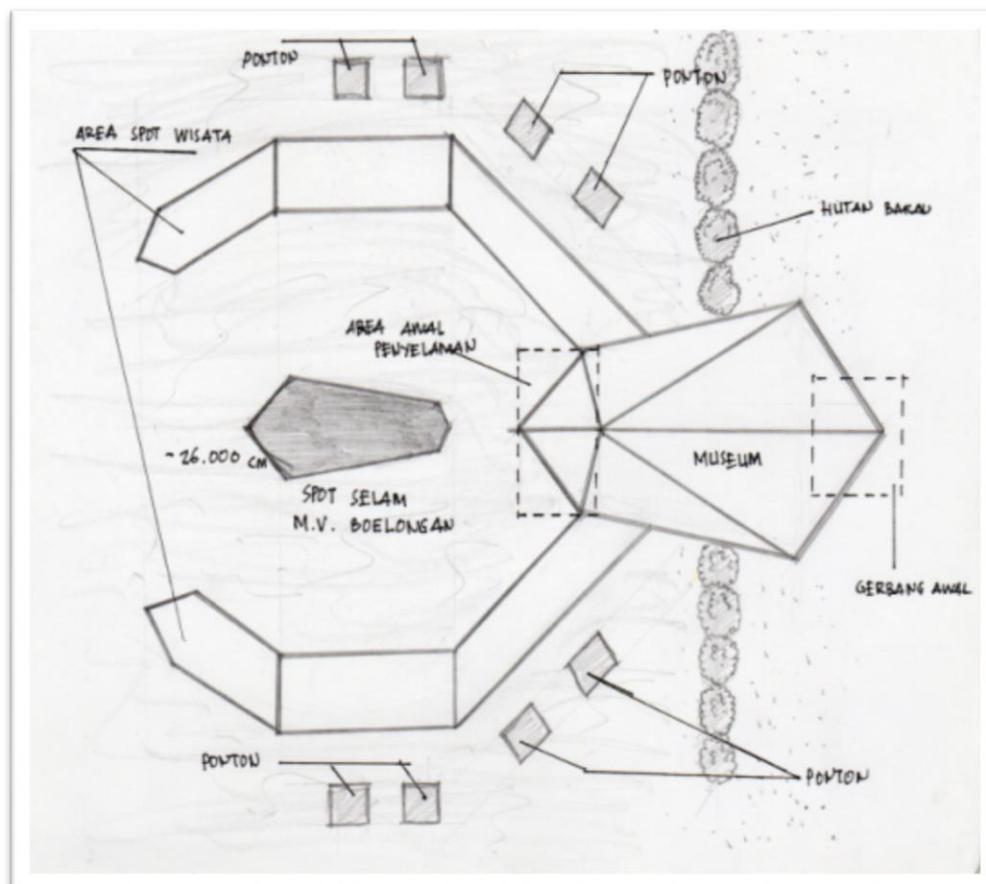
Gambar 4. Sketsa rancangan museum tampak depan tanpa skala (Sumber : Dwi Kurnia Sandy, 2018)

penting. Nama suku Minangkabau berasal dari kata *minang* yang artinya tanduk dan *kabau* yang artinya kerbau. Masyarakat Minangkabau percaya bahwa pemberian nama ini terkait dengan kisah kemenangan masyarakat Minang saat melakukan adu kerbau melawan pendatang yang ingin menduduki wilayah mereka (Dewi, 2010, p. 42). Pemilihan tanduk kerbau sebagai bentuk museum sejalan dengan ide *appropriate museology* yang memperhatikan aspek-aspek setempat salah satunya melalui penggunaan arsitektur vernakular (Kreps, 2011, p. 26). Ruangannya pada bagian kepala kerbau juga dilengkapi dengan ukiran khas Minangkabau untuk menambahkan kesan etnis dan menunjukkan kekayaan khazanah budaya Minangkabau.

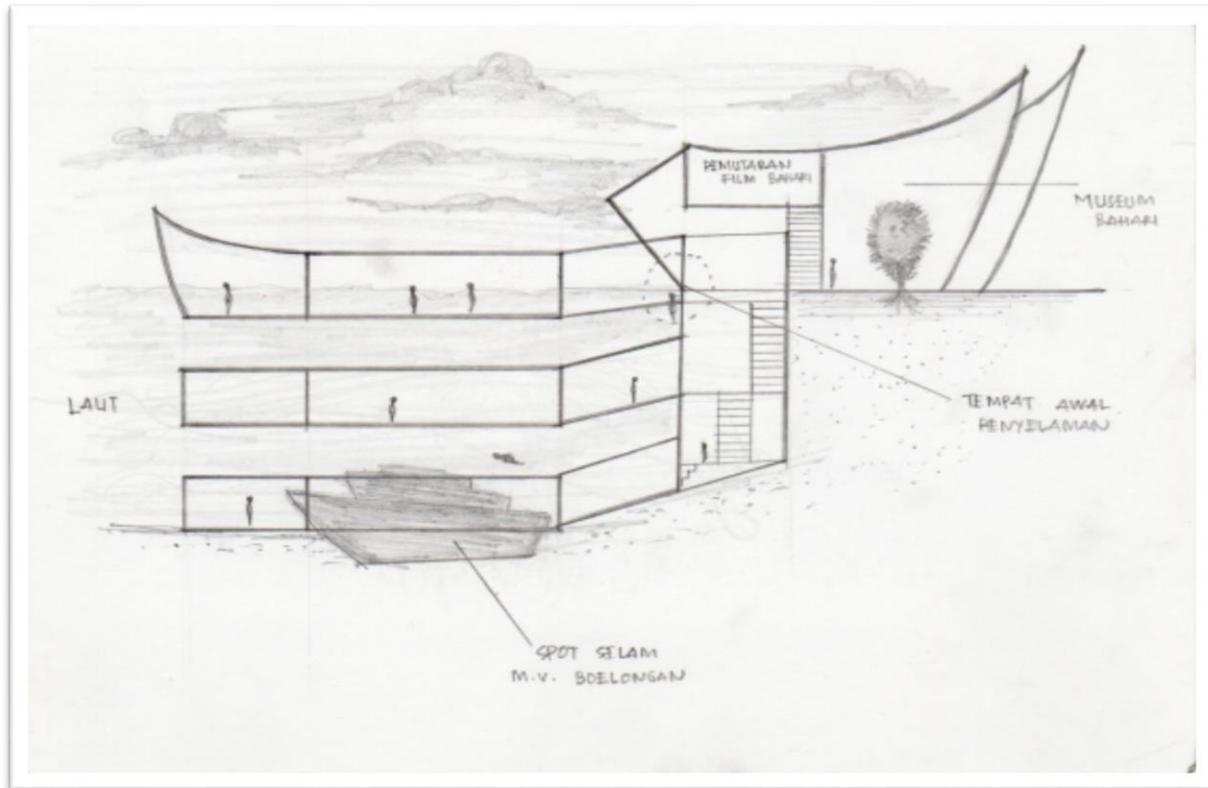
Salah satu aspek fundamental dari sebuah museum adalah pameran. Adanya

pameran di museum berkaitan dengan tujuan museum sebagai tempat mengedukasi. Pameran di museum bertujuan untuk menampilkan koleksi dan informasi yang edukatif (Anderson, 2004, pp. 1–2). Begitupun pada Museum Bawah Air M. V. Boelongan. Museum ini akan memiliki pameran tetap yang menampilkan informasi seputar M. V. Boelongan, informasi dan pengetahuan kemaritiman Indonesia dan dunia.

Agar sesuai dengan perkembangan zaman, pameran pada museum ini dirancang agar menarik dan bermanfaat bagi pengunjung. Museum masa depan adalah museum yang lebih emosional, dimana pengunjung dapat terhubung dengan berbagai cara salah satunya dengan



Gambar 5. Sketsa rancangan museum tampak atas tanpa skala (Sumber: Dwi Kurnia Sandy, 2018)



Gambar 6. Sketsa rancangan museum tampak samping tanpa skala (Sumber: Dwi Kurnia Sandy, 2018)

menggunakan teknologi digital (Sturabotti & Surace, 2017).

Agar sesuai dengan perkembangan zaman, pameran pada museum ini dirancang agar menarik dan bermanfaat bagi pengunjung. Museum masa depan adalah museum yang lebih emosional, dimana pengunjung dapat terhubung dengan berbagai cara salah satunya dengan menggunakan teknologi digital (Sturabotti & Surace, 2017).

Museum Bawah Air M. V. Boelongan memiliki empat bagian. Bagian tersebut yaitu bagian (ruang) kepala kerbau, ruang tanduk kerbau tingkat 1, ruang tanduk kerbau tingkat 2, dan ruang tanduk kerbau tingkat 3. Masing-masing ruang akan memiliki pameran yang memiliki tema utama mengenai kemaritiman, khususnya tentang M. V. Boelongan itu sendiri. Adapun artefak-artefak yang akan ditampilkan dalam pameran adalah yang berhubungan dengan dunia perkapalan seperti alat navigasi,

jangkar, teropong, model mercusuar, meriam, mesin kapal, seragam awak kapal, sekoci, dan foto-foto yang berkaitan.

Pada bagian kepala kerbau terdapat titik awal penyelaman (*dive center*) bagi pengunjung yang berminat (gambar 6). *Dive center* berada di bagian ujung kepala kerbau sehingga penyelam hanya tinggal berjalan sedikit ke dermaga kecil di dekat bagian ini. Bagian tanduk kerbau I, II, dan III berbentuk lorong. Lorong-lorong tersebut berada pada setiap kedalaman delapan meter. Panjang setiap lorong adalah 30 meter. Antar lorong akan dihubungkan dengan eskalator dan tangga darurat. Berikut adalah pameran yang akan disajikan pada setiap bagian dalam Museum Bawah Air M. V. Boelongan (tabel 1):

a. Bagian Kepala Kerbau

Ruang ini adalah ruang perkenalan Museum M.V. Boelongan Nederland. Pameran yang ditampilkan adalah “Materi

Pembuka”, yaitu pameran yang dapat mengantarkan pengunjung mengetahui pembabakan sejarah kemaritiman di Indonesia yang dimulai dari zaman prasejarah, periode Hindu-Budha, periode Islam, periode kolonial, pasca kemerdekaan, hingga masa saat ini. Ruang ini dilengkapi dengan ruangan pemutaran film yang akan menampilkan introduksi museum serta film-film lain yang berkaitan dengan tema utama museum.

b. Bagian Tanduk Kerbau I

Pada ruang ini ditampilkan pameran mengenai dunia perkapalan dunia dan Indonesia. Pameran akan menyajikan hal-hal terkait dengan teknologi pembuatan kapal, bahan pembuatan kapal, dan hal-hal teknis

lainnya. Terkait dengan teknologi, pada bagian ini akan ditampilkan berbagai peralatan pendukung sebuah kapal seperti jangkar, layar, dan teropong. Pengunjung dapat menyentuh langsung peralatan-peralatan ini untuk mempraktikkan cara penggunaannya.

c. Bagian Tanduk Kerbau II

Pameran mengenai seluk-beluk M. V. Boelongan ditampilkan pada pameran di ruang ini. Mulai dari pembuatan kapal, rekam jejak penggunaan kapal, mulai dari masa kolonial Belanda, Perang Dunia II, hingga saat kapal ini berhasil ditaklukan oleh Jepang. Ruangan ini akan dilengkapi media interaktif yang memungkinkan pengunjung untuk merangkai perjalanan

Tabel 1. Pembagian Ruang dan Storyline Museum Bawah Air M.V. Boelongan

	Bagian Kepala Kerbau	Bagian Tanduk I	Bagian Tanduk II	Bagian Tanduk III
Tema utama	Pengenalan terhadap MV Boelongan	Sejarah Perkapalan di Indonesia dan dunia	Seluk-beluk M.V. Boelongan	Perenungan Perjalanan Kapal
Storyline	Materi Pembuka : <ul style="list-style-type: none"> Pembabakan sejarah kemaritiman Indonesia 	Materi mengenai teknologi dan perkembangan kapal	Perjalanan M.V. Boelongan: <ul style="list-style-type: none"> Pembuatan Rekam jejak penggunaan kapal Karamnya MV Boelongan 	M.V. Boelongan pasca Perang Dunia II
Koleksi yang ditampilkan	Foto, benda-benda yang terkait dengan perkembangan kemaritiman di Indonesia	Benda-benda yang berkaitan dengan teknologi perkapalan, diantaranya jangkar, layar, teropong, dsb	Foto-foto M.V. Boelongan terkini dan dahulu	Bangkai kapal M.V. Boelongan
Lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan ruang pemutaran film Dive center terdapat di bagian ini 	<ul style="list-style-type: none"> Pengunjung dapat menyentuh dan mencoba untuk menggunakan koleksi 	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi media interaktif untuk merangkai cerita perjalanan kapal Ruang didesain seperti ruang kargo kapal 	<ul style="list-style-type: none"> Ditujukan agar pengunjung dapat menginterpretasi makna perjalanan sebuah kapal

M.V. Boelongan. Bagian ini akan didesain sedemikian rupa seperti ruang kargo pada kapal agar pengunjung mendapatkan kesan yang jelas mengenai Kapal M. V. Boelongan.

d. Bagian Tanduk Kerbau III

Pada bagian ini pengunjung dapat melihat secara langsung bangkai Kapal M. V. Boelongan yang berada di dalam laut melalui kaca. Ruang ini adalah ruang bagi pengunjung untuk melakukan reinterpretasi ataupun perenungan mengenai perjalanan sebuah kapal. Sebelum mendatangi bagian ini pengunjung sudah terlebih dahulu mengunjungi bagian-bagian sebelumnya.

Dengan harapan para pengunjung dapat melakukan rekonstruksi sehingga mendapatkan pembelajaran dari museum ini. Melalui suasana pameran yang dapat membentuk kerangka pikir seperti yang ada dalam pikiran kurator, maka semakin tinggi kemungkinan makna di balik koleksi dapat dipahami oleh pengunjung atau penikmat pameran (Tanudirjo, 2009, p. 5). Dalam ruangan ini pengunjung akan difasilitasi untuk mengekspresikan kesan kunjungannya sehingga juga dapat menjadi umpan balik bagi museum

3. Aspek Pendukung Museum

Tanpa kelengkapan fasilitas museum dan pengelolaan yang baik, museum hanya akan menjadi tempat penyimpanan koleksi seperti perpustakaan. Museum modern harus memperhatikan beberapa aspek pendukung, diantaranya pengunjung. Tanpa adanya pengunjung, museum tentu tidak dapat berjalan seperti tujuan pembentukannya. Namun perlu diingat museum tidak hanya selalu soal pelayanan kepada pengunjung, kontribusi pengunjung juga harus diperhatikan. Maka dari itu, Museum Bawah Air M. V. Boelongan akan membentuk organisasi yang menaungi pengunjung dalam perhimpunan anggota museum.

Perhimpunan ini merupakan sebuah wadah bagi para pecinta museum Bawah air M. V. Boelongan yang ingin memberikan kontribusi dan saran atas pelayanan museum. Perwakilan mereka akan diberikan posisi administrasi dalam pengelolaan museum. Kontribusi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan rasa memiliki masyarakat atas museum. Selain itu diharapkan anggota merasa memiliki peran atas setiap keputusan yang berhubungan dengan rencana strategis museum.

Para anggota tentunya harus memberikan dampak positif pada museum. Salah satunya dengan membayar iuran keanggotaan. Dengan membayar iuran keanggotaan, anggota perhimpunan museum akan mendapat berbagai manfaat. Itulah mengapa dengan sistem BLU, Museum Bawah Air M. V. Boelongan yang memiliki basis bisnis dapat memberikan manfaat bagi anggotanya seperti memberikan diskon kunjungan dan belanja atau kemudahan lainnya.

Aspek lain yang perlu dilihat adalah melibatkan komunitas. Saat ini masih banyak kelemahan dari pengelola museum dalam mengkomunikasikan isi museum. Komunitas dapat membantu hal tersebut dengan mengadakan kunjungan dan aktivitas lainnya. Selain itu komunitas ini juga dapat membantu museum untuk merangkul orang yang bukan anggota museum. Museum M. V. Boelongan dirancang untuk dapat memberikan ruang kepada para komunitas untuk melakukan kegiatan antara lain seperti, memberikan ruang panggung kesenian, akses perpustakaan dan berbagai pelatihan, salah satunya konservasi koleksi museum.

Aspek terakhir adalah masyarakat sekitar situs *Shipwreck* Boelongan. Museum bawah air M. V. Boelongan tidak boleh menutup mata terhadap masyarakat yang ada di sekitar situs dan museum. Secara tidak langsung situs tersebut adalah milik masyarakat. Sebagai sebuah solusi,



Gambar 7. Penampakan kawasan pengembangan wisata Kabupaten Pesisir Selatan (**Sumber:** Tim PKM PSH UGM Boelongan, 2016).

masyarakat sekitar museum harus dilibatkan agar dapat meningkatkan perekonomian sekaligus menjaga keberadaan situs. Museum dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam produksi souvenir museum. Hasil dari penjualan tersebut dibagi antara pengelola museum dan masyarakat yang berpartisipasi. Sebagai sebuah destinasi baru di kawasan pengembangan wisata Kabupaten Pesisir Selatan, keberadaan museum juga dapat menarik minat wisatawan ([gambar 7](#)).

Masyarakat sekitar juga harus menjaga lingkungan sekitar situs dan museum. Hal sederhana yang dapat dilakukan adalah tidak membuang sampah ke sungai yang dapat mengotori laut. Tidak melakukan penebangan pohon di sekitar Sungai Nyalo dan Sungai Mandeh. Mengurangi pemanfaatan hutan bakau. Penggunaan bom ikan juga harus diingatkan agar ekosistem laut di Situs *Shipwreck* Boelongan dapat terjaga. Menjaga Situs *Shipwreck* Boelongan sangat penting karena Situs *Shipwreck* Boelongan yang menjadi hal utama dalam pendirian museum ini.

PENUTUP

Museum Bawah Air M.V. Boelongan di Teluk Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat dirancang

sebagai museum modern yang mengikuti perkembangan paradigma museum. Tujuan penting dalam pendirian museum ini adalah untuk melindungi tinggalan berupa *Shipwreck* MV. Boelongan sehingga tetap terjaga kelestariannya. Selain itu tentu, museum ini memiliki tujuan untuk mengkomunikasikan nilai-nilai penting tinggalan ini kepada masyarakat. Bangunan museum mengadopsi gaya Minangkabau untuk menyisipkan nilai-nilai tradisional dan budaya lokal setempat. Dalam pengelolaannya, museum akan menerapkan sistem Badan Layanan Umum (BLU) sehingga museum dapat menjadi museum mandiri yang lebih mudah dalam mengelola keuangan dan menghimpun masyarakat. Kedepannya, untuk mengaplikasikan konsep ini masih diperlukan pengkajian dan penelitian lebih lanjut utamanya terkait arsitektur, aspek lingkungan, dan masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kami ucapkan kepada Tim PKM-PSH Boelongan 2016 yang telah memberikan dukungan dan kesediannya dalam membagikan data-data penelitian terkait M.V. Boelongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhityatama, S. (2012). *Pemodelan Jalur Aktivitas Penyelaman di Situs USAT Liberty, Tulamben, Bali: Studi Pengelolaan Sumber Daya Arkeologi*. Universitas Gadjah Mada.
- Anderson, G. (2004). *Reinventing the Museum: Historical and Contemporary Perspectives on the Paradigm Shift* (G. Anderson, Ed.). Lanham: Altamira Press.
- Dewi, G. (2010). *Arsitektur Vernakular Minangkabau (Kajian Arsitektur dan Eksistensi Rumah Gadang Dilihat dari Pengaruh serta Perubahan Nilai Budaya)*. Universitas Indonesia.
- Green, J. (2004). *Second Edition Maritime Archaeology a Technical Handbook Green*. Cambridge: Elsevier Academic Press.
- ICOM. (2007). *The ICOM Code of Ethics for Museum*. Paris.
- Kreps, C. (2011). Christina Kreps. *Museum Management and Curatorship*, 23(1), 23–41.
- Lewis, G. (2010). *Running a Museum: A Practical Handbook*. Paris: ICOM.
- Mensch, P. V. (1992). *Towards A Methodology of Museology*. University of Zagreb.
- Mensch, P. V., & Mensch, L. M. V. (2011). *New Trends in Museology*. Slovenia: Museum of Recent History Celje.
- Mustiko, H. W. (2012). *Pengaruh Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja SDM pada Museum Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta (Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, Museum Seni Rupa dan Keramik serta Museum Bahari)*. Universitas Indonesia.
- Prasetya, S. H. (2012). *Revitalisasi dan Pemanfaatan Benteng Vredenburg di Yogyakarta Tahun 1976-2011*. Universitas Sebelas Maret.
- Prasetya, S. H. (2018). *Pertimbangan Lingkungan dalam Perlindungan In-situ Kapal Karam MV. Boelongan Nederland di Teluk Mandeh, Sumatra Barat*. Universitas Gadjah Mada.
- Ridwan, N. N. H., Kusumah, G., Husrin, S., & Kepel, T. L. (2015). Kapal Karam MV. Boelongan di Kawasan Mandeh, Lingkungan Laut Sekitarnya, dan Kemungkinan Pengembangannya. In *Karakteristik Sumber daya Laut dan Pesisir* (pp. 84–133). Jakarta Utara: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber daya Pesisir.
- Sandell, R. (1998). Museum as An Agent of Social Inclusion. *Museum Management and Curatorsh*, 17(4), 401–418.
- Satyawati, M. C. D. (2016). *Strategi Pengelolaan Museum Dirgantara Mandala sebagai Destinasi Wisata Pendidikan di Yogyakarta*. Istitut Seni Indonesia Yogyakarta.
- Sturabotti, & Surace. (2017). Museum of the Future: Insights and Reflections from 10 International Museum. In *Museum Sector Alliance Project*. European Union.
- Tanudirjo, D. A. (1989). *Ragam Metoda Penelitian Arkeologi dalam Skripsi Mahasiswa Arkeologi UGM*. Yogyakarta.
- Tanudirjo, D. A. (2007). Museum sebagai Mitra Pendidik. *Museografia*, 1(1), 15–29.
- Tanudirjo, D. A. (2009). Interpretasi Pameran. *Kegiatan Peningkatan Kemampuan Dan Ketrampilan Tenaga Museum Tingkat Lanjut*. Semarang.

- Ujianto, D. A., & Isharyanto, F. (2016). Pengelolaan Museum Pemerintahan dengan Model Layanan Umum (Suatu Tinjauan). *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 89–90.
- UNESCO. (2001). *Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage*. Paris: Official Text.
- Wahyudi, W. R., & Kuswanto. (2014). Kajian Konsep Open-Air Museum: Studi Kasus Kawasan Cagar Budaya Trowulan. *Berkala Arkeologi*, 34(1), 65–84.
- Wibowo, A. J. I. (2015). Persepsi Kualitas Layanan Museum di Indonesia: Sebuah Studi Observasi. *Manajemen*, 15(1), 13–40.
- Wicaksono, H. B. (2015). *Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) pada Penganggaran, Pelaksanaan dan Pelaporan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi (Studi Kasus pada Universitas Terbuka)*. Universitas Indonesia.
- Winaya, A. (2015). Peran Museum Majapahit sebagai Mediator Pelestarian Warisan Budaya dan Industri Pembuatan Bata. *Amerta*, 33(2), 77–100.
- Yulianti, D. (2011). *Museum Olahraga Nasional sebagai Museum Pasca Modern*. Universitas Indonesia.

Lampiran 1. Referensi Acuan Perundang-undangan :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2015 Tentang Permuseuman Permuseuman. 19 Agustus 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 159. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 13 Juni 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 48. Jakarta.

UNESCO, 2001. *Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage*. Official Text, Paris.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. 24 November 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 130. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2015 Tentang Permuseuman Permuseuman. 19 Agustus 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 159. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 13 Juni 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 48. Jakarta.

Surat Keputusan Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan No. KEP.56/DJ-PSDKP/2011.



MISTIFIKASI RITUAL SISTEM PERTANIAN TRADISIONAL MASYARAKAT AJATAPPARENG, SULAWESI SELATAN

Ritual Mystification of Traditional Farming System on Ajatappareng Community, South Sulawesi

Nani Somba^{1a}, Syahrudin Mansyur^{1b}, Muhammad Nur²

¹Balai Arkeologi Sulawesi Selatan

Jl. Pajjaiyang No. 13 Sudiang Raya Makassar, Indonesia

^anani.somba@kemdikbud.go.id;

^bsyahrudin.mansyur@kemdikbud.go.id

²Departemen Arkeologi, Universitas Hasanuddin

Jl. Perintis Kemerdekaan, Km. 10, Makassar, Indonesia

mnur@unhas.ac.id

Naskah diterima: 20/03/2019; direvisi: 28/03-09/05/2019; disetujui: 10/06/2019

Publikasi ejurnal: 01/06/2019

Abstract

The Ajatappareng region is known as the most important rice producer in South Sulawesi. Historical sources and archaeological evidence show that agricultural tradition in this region has been going on for at least the 14th century. In that time span, the Ajatappareng community carried out an agricultural system as a system of knowledge passed down from generation to generation. This study aims to obtain a record of knowledge related to the traditional farming system of the Ajatappareng community. It used ethnographic method with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The data obtained illustrates the belief system in the traditional farming system of the Ajatappareng community that has various stages and processes. This belief system is illustrated through a series of rituals that become an integral part of Ajatappareng community's agricultural system. In the process, this agricultural system has undergone various changes along with the development of knowledge. The recording of knowledge about agricultural traditions, belief system and the changes that surround them are important given the global trend that promotes sustainable food agriculture management.

Keyword: agricultural, system, ritual, traditional, Ajatappareng.

Abstrak

Wilayah Ajatappareng dikenal sebagai penghasil beras paling utama di Sulawesi Selatan. Sumber-sumber sejarah dan bukti-bukti arkeologi yang ada menunjukkan bahwa tradisi pertanian di wilayah ini telah berlangsung setidaknya sejak abad ke-14. Sejak itu pula, masyarakat Ajatappareng menjalankan sistem pertanian sebagai pengetahuan yang diwariskan secara turun temurun. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengetahuan terkait sistem kepercayaan dalam pertanian tradisional masyarakat Ajatappareng. Penelitian menggunakan metode etnografi dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan diikuti studi literatur. Sistem pertanian tradisional masyarakat Ajatappareng memiliki berbagai tahapan dan proses, pengetahuan masyarakat tidak hanya masalah teknis, tetapi juga menyangkut sistem kepercayaan yang diwujudkan melalui rangkaian ritual. Sistem pertanian ini telah mengalami berbagai perubahan seiring dengan perkembangan pengetahuan masyarakat. Rekaman pengetahuan tentang tradisi pertanian, sistem kepercayaan, serta perubahan-perubahan yang melingkupinya, menjadi penting mengingat tren global yang mengedepankan pengelolaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan

Kata Kunci: pertanian, sistem, ritual, tradisional, Ajatappareng.

PENDAHULUAN

Bugis merupakan etnik terbesar di Pulau Sulawesi (Pelras, 2006), mendiami 11 Kabupaten di Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Pinrang, Parepare, Sidrap, Barru, Pangkep, Maros, Soppeng, Bone, Wajo, Sinjai, dan Bulukumba. Bugis menempati daerah pesisir barat, dataran rendah, dataran tinggi dan pesisir timur Sulawesi Selatan. Sebagian besar masyarakatnya mengembangkan kegiatan pertanian padi. Beberapa ahli mengungkapkan bahwa aktivitas pertanian telah berlangsung sejak abad ke-14 yang ditandai oleh penemuan bukti padi di Situs Allangkanange di Wajo dan Situs Tinco di Soppeng (Bulbeck & Caldwell, 2008; Hasanuddin, 2015; Macknight, 1983).

Penduduk Bugis menempati wilayah geografis yang berbeda-beda, sehingga terdapat kebiasaan dan tradisi bervariasi antara setiap lokalitas orang Bugis, meskipun sepintas lalu terkesan tidak terlalu tampak. Ada beberapa kondisi yang melatarbelakangi munculnya perbedaan tradisi pertanian pada setiap lokalitas Bugis tersebut, seperti perbedaan geografis, curah hujan, angin, perbedaan musim dan potensi hidrologi. Perbedaan tradisi pertanian pada setiap lokalitas Bugis tersebut ditandai dua hal, yaitu tradisi menulis pada daun lontar atau kertas sejak abad ke-17, dan kuatnya tradisi pertanian tersebut melekat pada setiap lokalitas Bugis. Tradisi menulis naskah dalam masyarakat Bugis berhasil mendokumentasikan peristiwa dan pengetahuan masyarakatnya, termasuk aspek-aspek yang terkait dengan pertanian pada masa lampau.

Pada kesempatan ini akan membahas sistem pertanian tradisional masyarakat Bugis di wilayah barat Danau Tempe atau biasa dikenal dengan sebutan Ajatappareng (Druce, 2005; Latif, 2014; Pabitjara, 2006). Ajatappareng merupakan sebuah persekutuan kerajaan yang terbentuk pada abad ke-18 yang beranggotakan: Kerajaan Sawitto, Suppa, Sidenreng, Alitta, dan

Rappang. Sekarang, kelima kerajaan ini berada di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Pinrang.

Wilayah Ajatappareng sejak dulu dikenal sebagai penghasil beras di Sulawesi Selatan. Potensi pertanian itu pula yang menjadi salah satu alasan bagi Kerajaan Gowa menaklukkan wilayah Ajatappareng (Suppa, Sawitto, dan Sidenreng) pada abad ke-16, diyakini dilatarbelakangi oleh upaya Gowa menguasai sumber pangan wilayah tersebut (Latif, 2014, p. 11; Poelinggomang, 2002, p. 26). Demikian juga catatan Tome Pires abad ke-16 mengungkapkan bahwa pedagang-pedagang Bugis datang ke Malaka, Pahang, dan Siam membawa beras dengan kualitas bagus sebagai salah satu komoditi dagang (Corteseo, 2015, p. 313).

Ajatappareng khususnya Suppa juga merupakan bandar niaga pada periode awal abad ke-16, utamanya setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1511 dan sebelum kebangkitan Makassar sebagai bandar niaga pada pertengahan abad ke-16 (Latif, 2014, p. 10). Hingga abad ke-19, peran Ajatappareng sebagai penghasil beras terus bertahan. Laporan Gubernur Celebes pada 7 April 1892, menyebutkan bahwa produksi beras di Ajatappareng mengalami surplus sehingga dapat dikirim untuk memenuhi permintaan di wilayah lain di Hindia Belanda (Morris, 1982). Sumber-sumber historis yang ada juga menunjukkan tradisi pertanian khususnya padi sawah telah berlangsung lama dalam masyarakat di wilayah Ajatappareng.

Sistem pertanian bagi masyarakat dengan latar budaya agraris dipahami sebagai cara atau teknik mengelola sumber-sumber alam untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian. Secara umum, sistem pertanian dalam pengelolaan pertanian jenis padi sawah memiliki kesamaan dengan tata cara yang dilakukan di beberapa daerah, meski tetap ada perbedaan-perbedaan yang menjadi karakteristik sistem pertanian setempat. Sistem pertanian masyarakat di Indonesia

berkembang dengan karakter masing-masing, meskipun beberapa di antaranya tetap memiliki kesamaan-kesamaan pada aspek tertentu. Sistem pengetahuan masyarakat terkait budaya agraris di Nusantara masih ada yang tetap dipertahankan. Hal ini dapat dilihat pada sistem *subak* atau pengelolaan air irigasi tradisional bagi masyarakat di Bali, serta upacara-upacara tradisional yang terkait dengan pertanian seperti *mendak/mapag toya* dan ritual *niduhen* bagi masyarakat tradisional yang ada di Bali, ritual *rabu nehah* bagi masyarakat Gampong Paloh Kayee Kunyet di Aceh, sistem pertanian masyarakat Saleman di Maluku dan Tapanuli Utara yang tetap mempertahankan sistem tradisional untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari (Afandi, Arjani, & Kaler, 2017; Maulida, 2017; Nurung & Pratiwi, 2011; Purwanto, 2010; Sartini, 2017).

Diskusi tentang sistem pertanian di Indonesia, setidaknya dapat diuraikan antara lain tentang; *a*) Sistem pertanian, mulai dari aturan dan proses pengolahan sawah, proses penanaman padi, sistem pengairan sawah, hingga sistem panen dan bagi hasil; *b*) Hak kepemilikan lahan persawahan; serta *c*) Sistem kepercayaan dalam pertanian tradisional. Pada dasarnya, wawasan pengetahuan dan kebudayaan pertanian etnik Bugis adalah bagian dari kekayaan etnografis Indonesia. Penelitian mendalam tentang budaya pertanian Bugis pada lokalitas Ajatappareng, berdasarkan data BPS tahun 2018 menunjukkan bahwa wilayah ini merupakan penghasil beras tertinggi di Sulawesi Selatan (BPSP, 2018). Pembahasan artikel ini difokuskan pada sistem kepercayaan dalam budaya pertanian tradisional khususnya bagi masyarakat Ajatappareng. Oleh karena itu, pembahasan tentang fenomena budaya pertanian masyarakat Ajatappareng dibagi menjadi *a*) sistem kepercayaan dalam pertanian tradisional masyarakat Ajatappareng, *b*) mistifikasi ritual sistem pertanian tradisional

masyarakat Ajatappareng, *c*) transformasi budaya pertanian, dan *d*) pudarnya ritual pertanian.

METODE PENELITIAN

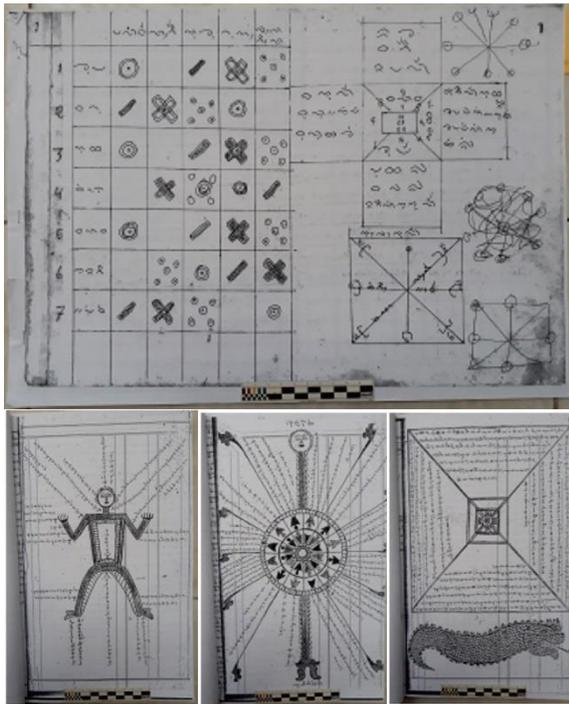
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang sistem kepercayaan dalam pertanian tradisional dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam budaya pertanian masyarakat Ajatappareng. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pemerolehan data-data dilakukan melalui studi pustaka untuk memperoleh referensi yang sesuai, observasi pada lokasi arkeologis, kritik ekstern dan intern pada data naskah serta wawancara terbuka dan mendalam. Data-data kemudian diidentifikasi dan dihubungkan antara satu dengan lainnya untuk memperoleh gambaran secara holistik dan memperbanyak pemahaman secara mendalam, serta menjelaskannya secara kualitatif (Moleong, 2008, p. 31).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Kepercayaan dalam Pertanian Tradisional Masyarakat Ajatappareng.

Dalam mitologi Bugis, yang berkenaan dengan padi, peranan mitos Dewi *Sangiang Serri* sangatlah penting. Terlebih adanya kenyataan bahwa masyarakat Bugis hanya mengenal upacara adat pertanian untuk padi saja. Demikian pula bahwa teknik pertanian tradisional masyarakat Bugis selalu menempatkan petuah-petuah para tetua dan ahli pertanian sebagai aturan yang harus dijalankan. Oleh karena itu, siklus yang baku pada pengolahan sawah selalu ditandai dengan ritual-ritual tertentu secara teratur (Pelras, 2006, p. 276).

Sistem kepercayaan dalam pertanian tradisional masyarakat Bugis juga mengenal penentuan waktu yang baik. Pelras (2006), menyebut bahwa naskah pertanian Bugis yang disebut lontara *pallaonrumang* atau *allaonrumangeng* berisikan seluruh khasanah pengetahuan pertanian yang



Gambar 1. *Lontara Kutika*, jenis lontara yang menjelaskan tentang penentuan hari baik, koleksi pribadi milik Bapak Mahmud, Sawitto (atas). *Lontara Kutika*, koleksi pribadi milik Drs. Andi Muhammad Saleh Pasanrangi (Petta Saleh), Sidenreng (bawah) (Sumber: Foto Repro Dokumen Penelitian Balai Arkeologi Sulawesi Selatan, 2018).

berasal dari para nenek moyang (*toriolo*). Naskah ini berisi pengamatan fenomena alam dan rasi bintang pada setiap musim tanam, serta berbagai penjelasan mengenai segala sesuatu yang harus dilaksanakan pada setiap periode yang didasarkan atas sistem penanggalan matahari ([gambar 1](#)). Nama hari yang digunakan merujuk pada sistem kalender Arab, sementara nama bulan merujuk pada bahasa Portugis. Dalam sistem penentuan waktu ini¹, terdapat sembilan rasi bintang yang memegang peran penting, yaitu: *Tekko Soro*; *Worong-mporong*; *Warawara*; *Tanra Tellu*; *Manu*; *Watang-mpata*; *Empang-e'* (*empangnge*) atau *Bola Keppang*; *Walu Janda*; dan *Lambaru* (*lambaru*). Namun, naskah penanggalan

¹ Versi lain tentang pembagian waktu, lihat Badaruddin, et. al., (1986), "Sistem Ekonomi Tradisional sebagai Perwujudan Tanggapan Aktif

tersebut hanya berlaku lokal karena adanya perbedaan musim hujan untuk masing-masing daerah di Sulawesi Selatan (Pelras, 2006, p. 278).

Selanjutnya proses pengolahan sawah dimulai dengan kegiatan pembukaan lahan persawahan baru yang dikenal dengan istilah *makkabekka' galung* atau ekstensifikasi pada masa lalu. *Makkabekka'* adalah proses membuka lahan persawahan dengan membat belukar dan pohon-pohon yang berada pada lahan tertentu. Sebelum memulai mengolah atau menanam padi, masyarakat biasanya tidak hanya mengandalkan pada tata cara pengolahan, tetapi juga sangat bergantung pada ritual yang berhubungan dengan doa-doa, seperti melakukan ritual *mappalili*. Pada dasarnya, *mappalili*, atau *maccera' tana* dipimpin oleh *sanro galung* dengan membuat sesajen yang terdiri dari telur, daun waru (*mparu*), pinang (*alosi*), daun sirih (*rekko ota*), beras (*berre'*), kapur (*puale*) dan *indo/datu ase*. Sesajen ini kemudian diletakkan di dalam walasaji pada sudut sawah, dimana saat itu pula dipotongkan seekor ayam sebagai *paccera* tanah dengan doa keselamatan untuk padi:

Nasalama na mappasalama kuduppai akkaresongengku, kualengngi olota baca doang salama natarima Puang Allahtaala (Wawancara: La Sewa, 58 tahun, petani, 24 Oktober 2018).

Setelah ritual *mappalili* dilakukan, maka dimulailah membajak sawah dengan menggunakan alat bajak (*rakkala*) yang ditarik oleh dua ekor kerbau. Alat pengolahan sawah yang lebih modern adalah traktor tangan atau biasa disebut dengan *dompeng* (dalam istilah lokal Bugis).

Proses selanjutnya adalah proses penanaman padi yang juga sarat dengan rangkaian ritual-ritual. Sebelum menanam padi, biasanya terlebih dahulu menyiapkan benih dari gabah atau padi yang sudah

Manusia terhadap Lingkungannya: Daerah Sulawesi Selatan". Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Hal. 38-39.

dipisahkan dari tangkainya (*lengoreng*), pemisahan gabah dari batangnya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan ditumbuk di lesung atau diinjak-injak (*direse*). Sebelum di turunkan ke sawah, dilakukan perendaman benih selama dua malam, kemudian diangkat untuk disimpan di atas rumah, biasanya ditempatkan di tiang tengah rumah (*possa bola*), dan dikenal dengan istilah *mappatinro bine*, biasanya disertai daun sirih (*rekko'ota*) dan lampu terbuat dari kemiri yang ditumbuk, kemudian dipilin menjadi sebuah lilin selama satu malam. Hingga dasawarsa 1960-an, bibit (*bine*) yang akan ditanam (termasuk jenis ketan atau *ase pulu*) masih mengambil dari berbagai varietas lokal² sisa panen sebelumnya. Masa pertumbuhan varietas tradisional berlangsung selama 110-150 malam (Pelras, 2006, p. 279). Setelah padi berusia sekitar sepuluh hari maka petani datang lagi mengunjungi padinya pada waktu sore (malam jumat) dengan membaca doa:

“enreni kobolata tudangemmu, pura paccingni bolata, pura ballani tappere uddaningmu, muliwu manengngi maggoro goroe tikkeng ase”
(Wawancara: La Sewa, 58 tahun, petani, 24 Oktober 2018).

Begitu pula, apabila padi mulai berisi dewasa (*anaddarani*), petani kembali lagi menyemburkan air dengan daun sirih (*mangeppi*), kemudian membaca doa-doa keselamatan (*pakkuru sumange*), sebagai pengharapan dalam menyambut buah padi yang mulai berisi.

Selain berbagai bentuk ritual dalam rangkaian proses pengolahan sawah, masyarakat Ajatappareng di Sidenreng juga memiliki aturan atau pesan yang harus diikuti agar hasil panen mendatangkan

kebaikan bagi semua anggota masyarakat. Aturan ini dapat kita jumpai pada salah satu lontara *La Towa* yang menjelaskan tentang aturan-aturan dan pesan-pesan dari *Nene' Mallomo*³ tentang mula-mula diterapkan aturan yang baik di Sidenreng mengenai aturan bagi orang yang bekerja di sawah, seperti yang dijelaskan di dalam lontara berikut:

“dari hal orang yang bekerja sawah, apabila tiga bulan lagi, maka waktu orang bekerja sawah, duduklah engkau sekalian orang Sidenreng memutuskan sekalian perkara sawah, yang telah dibicarakan dan janganlah terima orang yang baru datang mengadakan perkara sawahnya. Janganlah bicarakan pada tahun itu, melainkan kalau sudah memotong padi, barulah ini mulai membicarakan perkara sawah, kalau dua bulan lagi waktunya orang bekerja sawah, berkumpul pulalah orang Sidenreng dan beritahukan kepada Arung *Matowa*, supaya janganlah ada membicarakan perkara sawah. Orang yang mengerjakan sawah itu pada tahun yang lalu dialah mengerjakan sawah itu tahun. Demikianlah juga pada sekalian *Lili'*, dan kepada sekalian negeri yang mengikut di Sidenreng menyiarkan perintah yang disepakati itu. Kalau sudahlah berkumpul di Sidenreng, pulanglah masing-masing di negerimu engkau orang *Lili'*, dan beritahukan pada anak negerimu supaya jangan ada yang membicarakan sawah, dan beri pengajaran kepada anak buahmu, dari hal aturan bekerja sawah. Suruh juga hadat memberitahukan pada waktu pasar besar di Sidenreng dan tentukanlah pula seorang *pabbicara*,

² Variates padi lokal yang dikenal masyarakat Bugis sebelum penggunaan varietas padi unggul, diantaranya: *ase unnyi*, *ase bakko*, *ase loco-loco*, *ase bulukumba*, *ase bekka*, *ase lambau*, dll (Badaruddin, Mappasere, & Aminullah, 1986, p. 67)

³ *Nene Mallomo* atau *Nene Allomo* adalah seorang tokoh legendaris yang menjadi tokoh panutan masyarakat Sidenreng Rappang yang dikenal memiliki sikap adil dan bijaksana.

yang mengurus perkara sawah, dan dia yang menurunkan engkau di sawah engkau sekalian *Matowa*, orang bekerja sawah (Baoesat, 2006) “Lontara Terjemahan La Towa, hal. 104, Koleksi Petta Saleh”

Artinya, bahwa masyarakat petani sebelum memulai pekerjaan turun sawah, harus selalu berkumpul antara para *Matowa* dan masyarakat tani, untuk membicarakan dan menentukan waktu yang baik untuk memulai persiapan pengolahan padi sawah. Penentuan waktu ini dilakukan melalui kesepakatan bersama untuk menghindari terjadi kegagalan panen, sehingga tidak ada yang saling menyalahkan dan ketika panen padi melimpah seluruh masyarakat petani akan menerima secara bersuka ria bersama-sama.

Sebelum memulai mengerjakan sawah, diharapkan para petani dengan *Matowa*, untuk saling memohon kebaikan, saling memaafkan, tolong menolong dan tidak boleh ada kesalahpahaman diantara mereka. Artinya, ketika dalam menjalankan pekerjaan atau mengolah sawah nantinya, tidak ada lagi berpikir yang kurang baik diantara mereka tetapi, bekerja dengan hati yang lega, bersih dan tenang.

Setelah kesepakatan antara *Matowa*, *Pabbicara* dan *Addatuang* terjadi, maka wajiblah dimulai pengolahan sawah adat yang disebut dengan sawah *Lasalama*. Para penentu kebijakan yang mewakili masyarakat petani mulai mengelilingi sawah *Lasalama* sebagai tanda, bahwa pengolahan sawah sudah harus dikerjakan. Hubungan antara masyarakat petani sawah dengan para, *Matowa*, *Pabbicara* dan *Addatuang*, berjalan dengan harmonis. Adapun niat yang dimaksudkan itu adalah;

“Kami sengaja berjalan keliling La salama (nama tanah sawah) kami tanami padi, apabila kami mendapatkan hasil yang banyak itu selamat juga, kami tentu sembelih

kerbau hitam dan kambing dan kami makan berkumpul dengan orang banyak di sawah ini. Barulah kami bawa hasilnya itu ke rumah, dan kami makan bersama anak istri dan cucu-cucu dan dikuatkan oleh hadat dan syarat, dan kami makan dengan panjang umur kami, mengerjakan suruhan dan menjauhkan diri dari larangan dan melakukan kewajiban hadat dan syarat”. Apabila hendak mengerjakan La Salama kumpulkanlah perkakas yang dipakai oleh kerbau perkakas yang dipakai oleh kerbau yang bekerja sawah di bawah kolong pertengahan rumah, kalau memulai bekerja, sembelihlah seekor ayam merah untuk kerbau itu (kerbau dicera) ayam merah itu, kuning kakinya dan kuning paruhnya dan seekor ayam yang kuning bulunya, kuning kakinya dan paruhnya, kamu niatkan dalam hatimu, bahwa darah dari ayam itu untuk jin dan setan penjaga sawah itu, dagingnya adalah untuk dewata.

Kalau dibawalah perkakas kerbau itu pada sawah itu pada kerbaumu, berkelilinglah jalan ke kandang tiga kali, hadapkan ke arah negeri. Kalau hendaklah mengenakan perkakas yang dipakai kerbau menjaga sawah pulangkanlah dulu kerbaumu itu pada tempatnya dan keluarkan perkakas yang dipakainya, dan ambillah tanah yang ada dekat kerbaumu dan engkau sapukan pada badanmu dan di badan kerbaumu, supaya tidak kena penyakit padimu itu. Kalau engkau sapukan tanah di badanmu engkau berkata pada tanah itu demikian: “kamu yang disapukan atau kamu yang disapui, isipuru nama sebenarnya air itu, air yang memelihara kepadamu padi, angin yang menjadikan engkau besar dan awan yang menyusukan padamu (padi). Noeng nama kami. Dari sebab itu maka bersamaan sifat dengan padi,

air dan lain-lain, datang dari Tuhan. Peliharakan badan kami di dalam sifatnya Tuhan Allah. Adapun rumput yang tersangkut pada gigi bajak itu ambillah juga engkau peliharakan baik-baik. Apabila orang yang bekerja sawah itu kena penyakit ambillah rumput itu campur dengan sirih yang bertemu uratnya tiga lembar dan kunyah sampai halus baru sapukan pada badan orang sakit itu. Engkau ambil segenggam tanah, banyaknya seperti sesuap nasi, baru engkau menghadap matahari dan berkata demikian, “Apabila tertahan bulan yang terbit, barulah tertahan juga reski kami datang dari Tuhan Allah”.

Katanya raja yang dahulu yang menjadikan besar kerajaannya negeri Sidenreng. Apabila musim panas itu lewat, iyatuh sudahlah waktunya datang hujan, tetapi tidak ada hujan yang turun hanya panas saja, selamalamanya, dan kena penyakit padi itu atau ada satu binatang merusakkan dan memakannya, sepakatlah engkau orang Sidenreng keluar di padang berkumpul makan semuanya bersama, dan engkau lihat dari mana asal kecelakaan itu. Kalaulah sudah didapat sebabnya itu sembelihlah kerbau hitam, dan berikan kepada orang yang berkuasa di sawah, dan mohonkan maaf dari kesalahan pada dewata, barulah disembelih kerbau itu dan dimakan bersama-sama orang yang berkumpul di padang itu (Baoesat, 2006) “Lontara Terjemahan La Towa, hal. 105-6, Koleksi Petta Saleh”.

Demikian aturan-aturan yang diajarkan oleh *Nene' Mallomo* yang berhubungan dengan tata cara dan larangan yang ditetapkan bagi seluruh pekerja sawah. Selain pasal menentukan aturan *Nene'*

Mallomo di Sidenreng, yaitu *ade' puraonro* di Sidenreng dari *pabbicara aruae, no' rakkalana* (yang mengerjakan sawahnya Addatuang). Apabila orang dibenci oleh *Matowanya* dan tidaklah turun bekerja pada sawah *Lasalama* dan tidaklah pula bersama sama *Matowanya* bekerja di rumah *Salassa* atau di *Ale' Karaja* dan tidak mau bernaung di bawah bendera *Matowanya* (tidak mau mengikut perintah) dan dia hendak pindah mengikut perintah *Matowa* lain di Sidenreng, disuruhlah orang itu merombak dan mencabut tiang rumahnya serta dipindahkan rumahnya itu ke negeri tempatnya mengikut perintah.

Masyarakat yang tidak mau mengikuti lagi aturan-aturan dari yang sudah diterapkan oleh kerajaan/*addatuang*, maka masyarakat itu dipersilahkan untuk pergi ke negeri itu, dengan membawa rumahnya sekalian.

2. Mistifikasi⁴ Ritual dalam Sistem Pertanian Tradisional.

a. Mappalili

Ritual *mappalili* adalah satu bentuk upacara ritual yang berkaitan dengan keberadaan mitos tentang Dewi Sri '*Sangiang Serri*', mitos ini berhubungan dengan kepercayaan masyarakat, awal munculnya tanaman padi, terutama tentang tata cara pengolahan sawah dan penanaman padi. Jadi sebelum masyarakat memulai aktifitas pertanian, masyarakat petani sudah melakukan suatu ritual yang namanya *mappalili*, ritual bersifat sakral (suci), sebagai pertanda, bahwa mereka sangat menghormati dan menghargai yang namanya tanaman padi, sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidupnya. Keyakinan masyarakat tani akan ritual *mappalili*, sebagai usaha memohon pertolongan dari roh para leluhur nenek moyang mereka, dan kuasa campur tangan Sang Maha Kuasa sebagai pencipta segala-galanya. Tempat

⁴ memandang sesuatu sebagai misteri.



Gambar 2. Temuan lumpang batu di Watang Sidenreng (atas) dan Alitta (bawah). Awalnya, lumpang batu berfungsi sakral sebagai tempat pelaksanaan ritual pertanian (Sumber: Balai Arkeologi Sulawesi Selatan, 2018).

pelaksanaan ritual *mappalili* sangat identik dengan tempat-tempat yang dianggap sakral atau makam tokoh yang dihormati atau tempat turunnya *Tomanurung* (Somba & Nur, 2016, p. 225). Di beberapa tempat di Ajatappareng, lokasi yang dapat dicontohkan sebagai tempat pelaksanaan ritual ini adalah *Lawarangparang* di Suppa, *Arajang Sawitto* di Sawitto, *Makam Pallipa Pute* di Katteong (Langga), dan *Makam Petta Maupe* di Katteong (Langga), dan *Makam Petta Maupe* di Watang Sidenreng (Mansyur et al., 2018; Tim Penelitian, 2012). Salah satu temuan arkeologis yang umum dijumpai di situs-situs pemukiman adalah temuan lumpang batu yang memiliki fungsi profan sekaligus fungsi sacral (gambar 2). Fungsi profan tampak pada penggunaan lumpang batu sebagai media

untuk mengolah hasil pertanian. Sementara fungsi sakral adalah sebagai media dalam pelaksanaan upacara atau ritual yang berkaitan dengan pertanian.

Setiap upacara ritual *mappalili* selalu ada pemimpin upacara, seperti halnya pada upacara ritual lainnya. Ritual *mappalili* dipimpin oleh seseorang yang dianggap mempunyai kelebihan dalam hal tertentu biasa disebut *Sanro Wanua/Uwak*, *Sanro Wanua* ini, dianggap punya kemampuan dan pengetahuan tertentu mengenai penentuan hari-hari baik untuk memulai aktifitas pertanian, pada sisi lain. *Sanro Wanua* juga dianggap dapat berhubungan langsung dengan roh-roh halus para leluhur yang dapat membantu dan melindungi masyarakat dalam berbagai hal-hal buruk pada kehidupan masyarakat. Berbeda dengan daerah lain, di wilayah Ajatappareng, ritual *mappalili* tidak dipimpin oleh seorang *Bissu* sebagaimana dikenal di daerah lain. Meski demikian, kedua pemimpin ritual ini yaitu *Sanro Wanua* dan *Bissu* tetap memiliki peran dan prosesi ritual yang sama.

Dalam konteks prosesi ritual, terjadi mistifikasi ritual dimana *bissu* atau *sanro wanua* berfungsi sebagai aktor yang memerankan peran pendeta atau pemimpin ritual tertentu yang dipertunjukkan pada audiens (masyarakat yang mengikuti prosesi *mappalili*). Mistifikasi ritual dalam proses *mappalili* sesungguhnya bertujuan untuk menjaga jarak sosial antara *bissu* sebagai pemimpin ritual dengan masyarakat sebagai peserta ritual agar senantiasa dianggap “*makarama*” (Bahfiarti, 2011, pp. 165–169).

Upacara ritual “*Mappalili*”, berasal dari kata *palili*’ yang berarti usaha masyarakat petani untuk melindungi tanaman padi dari sesuatu yang dianggap akan mengganggu atau merusak tanaman, sehingga dilakukanlah satu bentuk permohonan dan penghormatan terhadap Sang Maha Kuasa. Ritual *Mappalili*’, dari hasil wawancara langsung dengan informan kunci bapak Andi Muhammad Saleh

Pasanrangi, bahwa *mappalili* adalah termasuk ritual *maccera* tanah (gambar 3). Setiap ritual yang disertai dengan kata *maccera*, berarti selalu disertai dengan pemotongan hewan diantaranya; kerbau, kambing dan ayam. Jenis hewan yang dipotong tergantung kemampuan dan kesepakatan masyarakat yang melaksanakan ritual. Upacara ritual seperti ini, sekarang sudah susah dijumpai lagi, akibat pengetahuan dan wawasan masyarakat semakin berkembang. Masyarakat petani sawah yang masih melaksanakan ritual *mappalili*, menganggap bahwa, bagaimanapun mereka tetap harus mengingat pesan-pesan nenek moyang mereka. Sebagian masyarakat petani sawah lainnya menganggap, bahwa itu merupakan perbuatan syirik yang bertentangan dengan syariat Islam (Fajriyani, 2015, p. 60).

Saat ini, nilai sakral ritual seperti itu tidak lagi menjadi begitu penting bagi

mereka, meskipun beberapa petani masih melakukan secara sendiri-sendiri di rumah, mereka hanya melakukan doa di rumah secara sendiri-sendiri dan memohon akan kelancaran dan keberhasilan panen mereka nantinya. Ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir yang semakin berkembang, menjadi faktor tersendiri yang mempengaruhi pola pikir masyarakat berubah dan secara lambat laun dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat tani, untuk tidak lagi melaksanakan ritual yang berhubungan dengan hal-hal berbau mistis (sakral). Pada sisi lain, ritual *mappalili* memiliki nilai-nilai positif terutama nilai-nilai sosial, yaitu solidaritas gotong royong, kebersamaan sosial dan ekonomi. Tradisi ini membangun kebersamaan dan rasa solidaritas antar warga dimana dalam pelaksanaan tradisi ini warga secara bersama-sama saling menikmati serta berpartisipasi demi kelancaran acara *mappalili* tanpa melihat status sosial. Nilai ini dapat menumbuhkan



Gambar 3. *Buju Tompo'e*, sumur tua penanda situs Lawarangparang, salah satu titik utama dalam pelaksanaan ritual *Mappalili* oleh masyarakat Suppa, dan pohon ritual di lokasi Situs Lawarangparang (atas). Makam Pallipa Pute, tempat pelaksanaan ritual *Mappadandang* masyarakat Katteong/Langnga (kiri bawah). Makam *Petta Maupe*, tempat pelaksanaan ritual *Mappalili* dan ritual-ritual keselamatan lainnya/*Mappangolo* atau *Massorong* (kanan bawah) (Sumber: Balai Arkeologi Sulawesi Selatan, 2018).

rasa persaudaran diantara mereka, serta saling bersilaturahmi dan mengakrabkan sesama anggota masyarakat (Asrianensi, 2014, p. 45).

Sebagai sebuah manifestasi ritual, *mappalili* (gambar 4) memiliki beragam makna dalam kehidupan orang Bugis, seperti: kesetiaan dan kepercayaan; penghargaan terhadap leluhur; sebagai tanda bagi petani; dan penghormatan (Khaedir, 2018, pp. 68–76). *Mappalili* merupakan

wujud permohonan dan kepasrahan manusia terhadap Sang Maha Pencipta, sehingga segala sesuatunya harus selalu berpedoman pada pesan-pesan para leluhur mereka sebagai penghormatan. Rasa hormat ini dimanifestasikan dalam bentuk ritual *mappalili*, sehingga apapun yang akan dilakukan berkaitan dengan tanaman padi sawah, masyarakat petani sawah tidak pernah lupa untuk melakukan ritual *mappalili* mulai dari membuka lahan



Gambar 4. Dokumentasi lama prosesi *mappalili* yang dilaksanakan oleh masyarakat Ajatappareng, dalam proses ini peran *Sanro* masih sangat sentral dan sakral (Sumber: Repro koleksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, 2018).

(*makkabeka*'), menyiapkan benih (*mappatinro bine*), sampai pada saat akan memulai memanen padi (*mappamula mengngala*).

b. Mappadendang

Mappadendang adalah salah satu tradisi suka cita yang berlanjut sampai sekarang, ritual ini merupakan pengucapan syukur masyarakat petani atas keberhasilan panen padi mereka. Ritual ini dilaksanakan secara bersama-sama, masyarakat tetangga kampung datang untuk mengadakan pesta *mappadendang*, berkumpul di suatu tempat tertentu, kadang di sawah, di halaman *Saoraja* atau di lapangan. Tergantung kesepakatan antara masyarakat petani, pemerintah maupun pemangku adat (*Addatuang*). pada saat pesta *mappadendang*, berbagai macam permainan menyertai diantaranya adalah; ayunan (*mattojang/mappere*'), main layangan (*mappasajang*), *pajoge*', *massempe*, *mallanca*, dan disertai kesenian berupa kecapi. Sama seperti ritual *mappalili*, di masa lalu tempat pelaksanaan ritual *mappadendang* dilaksanakan di tempat-tempat yang dianggap sakral atau dikeramatkan.

Mappadendang sebagai ucapan rasa syukur masyarakat petani padi sejak dahulu, biasanya dilaksanakan setelah mendapatkan hasil panen padi, dan dilaksanakan tiap tahun pada musim kemarau pada malam hari saat bulan purnama, namun pada saat sekarang *mappadendang* tidak lagi dilaksanakan pada malam hari, tetapi dilaksanakan pada siang hari. Pola perubahan waktu pelaksanaan, telah merubah nilai sakral ritual itu sendiri. Masyarakat petani tidak lagi menganggap sakral, tetapi hanya sebagai ajang berkumpul, bersukaria bersama para masyarakat petani sawah setelah panen raya.

Pada saat hasil panen sudah dikumpulkan di rumah, sebelum dinaikkan pada tempat khusus yang biasa disebut dengan lumbung padi (*lanrang*) khusus untuk raja, dan (*rakkeang*) untuk masyarakat biasa, *rakkeang* adalah bagian atas rumah panggung Bugis. Khusus untuk lumbung padi bagi raja (*lanrang*), dibuatkan cukup besar dan tersendiri, ini disebabkan para raja jaman dahulu memiliki lahan persawahan yang cukup luas. Maka dilaksanakanlah yang namanya *mappadendang* sebagai bentuk kesyukuran atas hasil panen padi yang melimpah.

Peralatan⁵ yang dipakai, adalah lesung kayu berbentuk persegi panjang (*palungeng*), hampir menyerupai bentuk perahu, dengan enam batang kayu panjang bulat (*alu*), berukuran satu meter setengah, sebagai alat untuk menumbuk padi di dalam lesung, Pemain terdiri dari wanita dan pria dengan memakai perlengkapan baju adat Bugis/Makassar. Perempuan memakai baju *bodo* dengan sarung sutra, untuk laki-laki memakai jas tutup warna hitam dengan tutup kepala berupa sarung yang dililit (*passapu*) atau *songko' to Bone*. Jumlah pemain terdiri dari dua orang laki-laki bertindak sebagai pemimpin, masing-masing berada pada kedua ujung lesung, untuk mengatur irama atau ritme dan tempo dengan menggunakan alu, sedangkan yang menumbuk pada lesung adalah perempuan yang sudah mahir dan berpengalaman berjumlah empat sampai enam orang. Biasanya dua orang laki-laki melakukan tari-tarian berputar mengelilingi para perempuan yang sedang menumbuk lesung. Pada saat *mappadendang*, suara lesung dengan alu saling bertautan dan mengeluarkan bunyi-bunyian yang berirama, dan irama yang bertalu talu menjadi penyemangat bagi masyarakat petani yang telah bekerja keras selama proses pengolahan sawah.

⁵ Versi lain menyebut komponen utama dalam acara ini yaitu 6 perempuan, 3 pria, bilik baruga, lesung, alu, dan pakaian tradisional yaitu baju *Bodo*. Lihat Abdul Rahim, 2016. Nilai-nilai Sistem Perekonomian

Islam dalam Ritual “*Mappadendang*” dalam Jurnal Hukum Islam Volume 14, No. 1, Juni 2016, hal. 93-110.

Fungsi ritual *mappadendang* adalah manifestasi kegembiraan yang sangat dalam dan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa, atas apa yang telah dikerjakannya menghasilkan hasil panen yang melimpah, saling menjaga hubungan tali silaturahmi antar keluarga, tetangga maupun kepada pemerintah setempat, juga sekaligus sebagai sarana hiburan bagi seluruh masyarakat petani yang telah bekerja dengan keras. Berkumpul menjadi salah satu bentuk untuk saling menjunjung rasa solidaritas, kebersamaan dalam kegembiraan, suasana demikian diharapkan dapat menciptakan suasana damai, tentram, nyaman dan tetap saling menghargai, dan saling hormat menghormati, dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, *mappadendang* juga menyimpan filosofi yang sangat tinggi dan merupakan sarana nenek moyang dalam memperkuat persatuan dan kesatuan, pentingnya kerjasama, serta membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid (Rahim, 2016, p. 108).

3. Transformasi Budaya Pertanian

Budaya pertanian dimaksud adalah aspek-aspek budaya yang terkait dengan pertanian seperti kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pertanian, sistem gotong royong, cara menentukan waktu tanam, alat-alat yang terkait dengan pertanian, sistem sosial masyarakat, tenaga kerja, pembagian hasil, sistem pewarisan dan ritual yang berhubungan dengan pertanian. Pada bagian ini, transformasi budaya pertanian diawali dengan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pertanian.

Sebelum masyarakat Ajattappareng mengenal sistem pertanian modern, kekuasaan dipegang oleh raja. Inisiatif peningkatan hasil pertanian padi dipelopori oleh para raja [wawancara dengan Andi Suddini dan Petta Saleh] dengan cara pembuatan *teppo* dan Salo Kae (Sungai buatan yang digali secara bergotong royong) untuk keperluan irigasi. Dalam struktur

kerajaan-kerajaan di Ajatappareng, terdapat jabatan *Matoa Paggalung*, semacam menteri yang membidangi pertanian dan mengurus waktu menanam padi, *mappalili*, penentuan bibit, pengairan dan ritual *mappadendang* (Lontara' Petta Saleh). Hirarki ini kemudian menghilang bersamaan dengan pergantian pemerintahan pada Periode Kemerdekaan.

Transformasi sistem penggarapan sawah juga terjadi. Berdasarkan beberapa informan, sistem gotong royong telah mulai ditinggalkan sejak sekitar tahun 1990-an di wilayah Ajatappareng, digantikan oleh sistem penggarapan sawah secara individual. Bersamaan dengan itu, pembukaan lahan persawahan baru oleh para raja (*makkabekka'*) dan pengerjaan sawah raja dengan sistem bagi hasil (*matteseng*) juga semakin ditinggalkan. Sistem pengerjaan sawah yang bersifat kolektif juga semakin ditinggalkan bersamaan dengan berpindahnya tanggung jawab kolektif menjaga kestabilan irigasi kepada pemerintah. Pudarnya sistem gotong royong memang tidak berpengaruh besar pada produksi beras tetapi membuka jalan menuju persaingan antar petani.

Penentuan waktu tanam padi juga telah mengalami perubahan di wilayah Ajatappareng. Berdasarkan naskah lontara dan studi etnografi, cara menentukan waktu tanam pada masa sebelum kemerdekaan adalah dengan cara-cara tradisional. Sekitar tahun 1970-an atau sebelumnya, perhitungan waktu tanam padi menggunakan perhitungan bintang yang disebut *pananrang*, yaitu tradisi yang melembaga dan ditulis oleh masyarakat dalam banyak naskah lontarak. Lepasnya ketergantungan terhadap musim hujan karena ketersediaan irigasi menyebabkan perhitungan tradisional tentang waktu tanam padi tidak lagi bersifat fungsional.

Alat-alat yang digunakan dalam kegiatan pertanian juga mengalami perubahan yang sangat cepat di wilayah Ajatappareng dibandingkan dengan beberapa komunitas Bugis di wilayah



Gambar 5. Gambaran tentang transformasi budaya pertanian. Mobil pemanen padi yang bekerja dekat sebuah lumpang batu. Saat ini, harapan terhadap hasil panen salah satunya bergantung pada ketepatan waktu panen oleh mobil/mesin *kombain*. Jauh sebelumnya, pengharapan terhadap hasil panen yang melimpah bergantung pada pelaksanaan ritual *mappalili* yang sering dilaksanakan di tempat-tempat keramat (salah satunya adalah di lokasi Lumpang Batu) (**Sumber:** Dokumentasi Balai Arkeologi Sulawesi Selatan, 2018).

pedalaman lain di Sulawesi Selatan. Sebagai contoh, penggunaan tenaga hewan (kerbau atau sapi) untuk melakukan pembajakan sawah sudah tidak dilakukan sejak tahun 1990-an dan hingga sekarang masih banyak masyarakat petani di wilayah pedalaman Sulawesi Selatan masih memakainya. Sekarang, masyarakat Ajatappareng menggunakan traktor tangan (*dompeng*) untuk membajak dan menggemburkan tanah pertanian. Alat traktor tangan jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan menggunakan kerbau yang semakin sulit ditenakkan karena semakin sempitnya sumber makanan ternak ([gambar 5](#)).

Jika dua puluh tahun lalu, kuda pengangkut (*nyarang patteke*) berfungsi penting untuk mengangkut hasil panen dari sawah ke jalan, sekarang pemandangan itu

tidak dijumpai lagi. Sepeda motor modifikasi yang disebut *tassi* telah menggantikan fungsi kuda atau *nyarang patteke*. Jika dahulu setiap petani memiliki minimal satu ekor kuda untuk mengangkut hasil panen, sekarang para petani menyerahkan pengangkutan hasil panen kepada jasa *tassi*. Karena panen dapat berlangsung lima kali dalam dua tahun maka kondisi tersebut merangsang munculnya satu lapangan kerja baru di Ajatappareng.

Sekitar tiga puluh tahun lalu, masyarakat masih memanen sendiri padi mereka dibantu oleh kerabat dan keluarga. Terjadi perubahan saat itu dimana jasa tenaga kerja pemanen (*passangki*) mengambil alih karena lebih cepat. Para *passangki* yang telah dikoordinir berdatangan dari berbagai daerah dan

dengan cepat memanen padi-padi di sawah. Dalam lima tahun terakhir, jasa mobil pemanen padi mulai marak digunakan dan sedikit demi sedikit menggantikan jasa *passangki*. Ketika musim panen tiba, beberapa masyarakat Ajatappareng menawarkan jasa mobil pemanen (sering disebut oleh masyarakat setempat dengan istilah *kombain* padi yang bekerja jauh lebih cepat dan murah.

Gambaran transformasi budaya pertanian padi di wilayah Ajatappareng berlangsung sangat cepat dalam rentang waktu tiga puluh tahun terakhir. Masyarakat Ajatappareng memang telah mengidentikkan dirinya sebagai masyarakat surplus padi dan letaknya pada pesisir barat juga merupakan faktor kunci cepatnya perubahan di wilayah ini.

4. Pudarnya Ritual Pertanian

Ritual pertanian di Ajatappareng dilakukan pada dua momen, pertama adalah ritual *mappalili*, ritual yang menandai awal kegiatan pertanian, dan kedua adalah ritual *mappadendang*, ritual kesyukuran setelah panen dilaksanakan. Antara kegiatan *mappalili* dan *mappadendang*, terdapat beberapa ritual kecil yang dipimpin oleh *Sanro wanua* dan hanya melibatkan beberapa orang saja, misalnya ritual *maddoja bine*, *massisi* atau *malleppe ase*. Tempat pelaksanaan upacara *mappalili* dan *mappadendang* adalah tempat keramat yang biasanya berhubungan dengan tempat kemunculan awal atau kuburan tokoh legenda pada satu kerajaan. Sebagai contoh di Suppa, tempat akhir persembahan kepala kerbau yang telah dikurbankan dalam ritual *mappalili* dan *mappadendang* adalah Lawaramparang, suatu mata air di pinggir Pantai Suppa yang dipercaya sebagai tempat munculnya *Tomanurung* Suppa.

Sampai sekarang, ritual *mappalili* dan *mappadendang* masih dilakukan pada beberapa bekas pusat kerajaan besar seperti Sawitto, Sidenreng, Rappang, Alitta dan Suppa serta pada beberapa Kerajaan *Palili*

dari lima kerajaan besar di Ajatappareng tersebut. Meskipun demikian, seiring perjalanan waktu, besaran kedua ritual tersebut semakin berkurang. Beberapa bagian ritual disederhanakan, pergantian dengan unsur-unsur baru dan pemeran ritual juga mengalami perubahan. Bagian ritual yang disederhanakan misalnya ritual *maddojabine*, *masisi* atau *malleppe ase* biasa tidak dilakukan lagi. Beberapa tempat di wilayah Ajatappareng menunjukkan bahwa rangkaian ritual antara *mappalili* dan *mappadendang* mulai ditinggalkan.

Pergantian unsur-unsur lama oleh unsur baru dalam ritual *mappalili* juga terjadi misalnya di wilayah Akkarungeng Lanriseng, Kabupaten Pinrang, *rakkala* atau alat pembajak tidak lagi digunakan dalam ritual *mappalili* sejak tahun 1990-an, digantikan oleh traktor tangan atau disebut *dompeng*, juga di Desa Ciro-Ciroe, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap (Asrianensi, 2014). Pelaksana atau pemimpin ritual juga mengalami perubahan pada hampir semua *Akkarungeng* di Ajatappareng dimana peran para raja dan bangsawan berpindah kepada pemerintah (Kepala Desa, Camat, Bupati). Para bangsawan dan hirarki kerajaan yang memang sudah memudar tidak lagi mendapat tempat khusus, digantikan oleh pemeran-pemeran yang memiliki modal besar, kekuasaan, jabatan atau kecendekiawanan.

PENUTUP

Tradisi pertanian di wilayah Ajatappareng telah berlangsung selama berabad-abad, proses ini pun telah melahirkan sistem pertanian yang dilaksanakan secara turun temurun. Tradisi pertanian ini sekaligus menunjukkan bahwa sistem kepercayaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengetahuan sistem pertanian masyarakat di masa lalu. Dalam prosesnya pula, terjadi berbagai perubahan tidak hanya teknik pertanian (misalnya memanfaatkan kemajuan ilmu dan

teknologi), namun perubahan-perubahan ini juga menyentuh aspek *intangible* yaitu ritual-ritual pertanian.

Tradisi pertanian di masa lalu sangat menggantungkan pengharapan masyarakat (petani) akan hasil panen yang melimpah pada berbagai bentuk ritual yang harus mereka laksanakan. Pengharapan akan hasil panen yang baik juga sangat bergantung pada kepatutan masyarakat petani pada petuah-petuah dan aturan-aturan yang sudah dijalankan secara turun-temurun. Dalam konteks sistem pertanian tradisional seperti ini para penguasa menjadi inisiator utama dalam mempertahankan serta meningkatkan produksi beras. Salah satu bentuk dari upaya tersebut adalah melalui mistifikasi ritual yang diinisiasi oleh pihak penguasa atau kerajaan, yaitu *Akkarungeng*, *Arajang*, dan *Addatuang*.

Saat ini, sistem pertanian yang dijalankan secara tradisional di Ajatappareng sudah sangat sulit ditemui, informasi-informasi yang diperoleh lebih kepada ingatan-ingatan personal yang dulunya menjalankan tradisi-tradisi pertanian beberapa dekade sebelumnya. Disadari bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menuntut berbagai perubahan, terlebih tuntutan terhadap upaya peningkatan produktivitas hasil pertanian. Namun di sisi lain, ingatan-ingatan tentang tradisi pertanian dan sistem pertanian tradisional secara umum penting menjadi rekaman

pengatahuan untuk disampaikan kepada generasi muda. Demikian pula mengamati tren global saat ini yang mengedepankan pengelolaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Draft awal naskah ini adalah bagian (data etnografi) dari Laporan Penelitian “Irigasi Ajatappareng: Menelusuri Jejak Sejarah Pertanian di Sulawesi Selatan”, yang didanai oleh DIPA Balai Arkeologi Sulawesi Selatan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota tim (Dra. Muhaeminah; Asmunandar, S.S., M.Hum; Nur. Ihsan Djindar, S.S., M.Hum; Lendrawati, S.S; Andika Saputra; dan Muh. Ikram, M. S.S), serta semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian, Drs. H. Alimin (Kabid. Kebudayaan Dinas Dikbud Kab. Pinrang), dan Bahtiar, S.S (Staf Dinas Dikbud Kab. Sidrap); juga kepada seluruh informan: Drs. Andi Muhammad Saleh Pasanrangi (Sidenreng), Drs. Andi Suddini (Talabangi), Yukkan, S.Pd. (Letta), H. Andi Monji (Suppa), La Sewa (Lerang, Sawitto), La Nohong (Alitta), Wa’ Onding (Mojong, Sidenreng), La Midding (Bangkai, Sidenreng).

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Z., Arjani, N. L., & Kaler, I. K. (2017). Ritual Neduhin dalam Sistem Pertanian Masyarakat Desa Bunutin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. *Jurnal Humanis*, 21(1), 37–45. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/sastra/article/view/35418>
- Asrianensi, J. (2014). Studi tentang Tradisi Mappalili pada Masyarakat Desa Ciro-Ciro'e Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Tomalebbi*, 1(1), 41–46.
- Badaruddin, M., Mappasere, S. K. R., & Aminullah, A. (1986). *Sistem Ekonomi Tradisional sebagai Perwujudan Tanggapan Aktif Manusia terhadap Lingkungannya: Daerah Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sulawesi Selatan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bahfiarti, T. (2011). Mistifikasi 'Bissu' dalam Upacara Ritual Adat Etnik Bugis Makassar (Kajian Studi Dramaturgi). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 159–170.
- Baoesat, A. (2006). *Terjemahan Lontarak Latowa: Hadat Besar Keradjaan Rappeng, Djilid I* (H. A. M. S. Pasanrangi, Ed.).
- BPSP. (2018). *Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Sawah dan Padi Ladang Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 2015*. Makassar: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bulbeck, D., & Caldwell, I. (2008). *Oryza Sativa and The Origins of Kingdoms in South Sulawesi, Indonesia: Evidence from Rice Husk Phytoliths*. *Indonesia and the Malay World*, 36, 1–20. <https://doi.org/10.1080/13639810802016117>
- Cortesao, A. (2015). *Suma Oriental: Karya Tome Pires: Perjalanan dari Laut Merah ke Cina dan Buku Francisco Rodrigues* (Edisi Terj; Adrian Perkasa & A. Pramesti, Eds.). Yogyakarta: Ombak.
- Druce, S. C. (2005). *The Lands West of The Lakes: The History of Ajattappareng, South Sulawesi, AD 1200 to 1600*. The University of Hull.
- Fajriyani, G. (2015). *Upacara Mappalili oleh Pa'Bissu di Kelurahan Bontomate'ne Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Hasanuddin. (2015). *Kebudayaan Megalitik di Sulawesi Selatan dan Hubungannya dengan Asia Tenggara*. Universiti Sains Malaysia.
- Khaedir. (2018). *Makna Ritual Mappalili oleh Komunitas Bissu Bugis di Pangkep*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Latif, A. (2014). *Para Penguasa Ajatappareng: Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis*. Yogyakarta: Ombak.
- Macknight, C. C. (1983). The Rise of Agriculture in South Sulawesi Before 1600. *Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, 17, 92–116. Retrieved from <http://www.oxis.org/articles-k-z/macknight-campbell/macknight-1983.pdf>

- Mansyur, S., Somba, N., Muhaeminah, Nur, M., Asmunandar, & Djindar, N. I. (2018). *Irigasi Ajatappareng: Menelusuri Jejak Sejarah Pertanian di Sulawesi Selatan*. Makassar.
- Maulida, R. (2017). Rabu Nehah (Studi Etnografi tentang Larangan Turun ke Sawah pada Masyarakat Gampong Paloh Kayee Kunyet, Kecamatan Nisam). *Aceh Anthropological Journal*, 1(1), 57–59. Retrieved from <http://ojs.unimal.ac.id/index.php/AAJ/article/view/360>
- Moleong, L. J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Morris. (1982). Celebes en Onderhoorigheden. In *Koloniaal Verslag van 1892, Nederland Oost Indie, Bijlage C, Tweede Kamer*. Makassar: De Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden.
- Nurung, R. M., & Pratiwi, J. D. (2011). Motivasi Petani dalam Mempertahankan Sistem Tradisional pada Usaha Tani Padi Sawah di Desa Parbaju Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Agrisep: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31186/jagrisep.10.1.51-62>
- Pabitjara, B. (2006). *Persekutuan Limae Ajatappareng Abad XVI*". Tesis Magister. Makassar. Universitas Negeri Makassar.
- Pelras, C. (2006). *Manusia Bugis* (Terjemahan; Abdul Rahman Abu, Hasriadi, & N. Sirimorok, Eds.). Jakarta: Nalar bekerjasama dengan Forum Jakarta-Paris, EFEO.
- Poelinggomang, E. L. (2002). *Makassar Abad XIX: Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia bekerjasama dengan Yayasan Adikarya dan The Ford Foundation.
- Purwanto, Y. (2010). Studi Sistem Pertanian Tradisional Masyarakat Negeri Saleman, Sera Utara, Kabupaten Maluku Tengah. In *Laporan Penelitian COLUPSIA Project, CIRAD dan UNI EROPA. Collaborative Land Use Planning and Sustainable Institutional Arrangements for Strengthening Land Tenure, Forest and Community Rights in Indonesia*. Retrieved from http://www1.cifor.org/fileadmin/subsites/colupsia/documents/Studi_Sistem_Pertanian_Tradisional_YP.pdf
- Rahim, A. (2016). Nilai-nilai Sistem Perekonomian Islam dalam Ritual ‘Mappadendang. *Jurnal Hukum Islam*, 14(1), 93–110.
- Sartini, N. W. (2017). Makna Simbolik Bahasa Ritual Pertanian Masyarakat Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 14(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JKB.2017.v07.i02.p06>
- Somba, N., & Nur, M. (2016). Tradisi Bercocok Tanam di Kabupaten Soppeng. In Hasanuddin & B. A. K.W. (Eds.), *Lembah Walennae: Lingkungan Purba dan Jejak Arkeologi Peradaban Soppeng*. Yogyakarta: Ombak.

Tim Penelitian. (2012). *Laporan Penelitian Arkeologi: Pembuktian Arkeologi terhadap Toponim dalam Naskah Ajatappareng di Kabupaten Pinrang*. Makassar.



SIMPANG TIGA ABADI, KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN: JEJAK SUNGAI LAMA DI LAHAN BASAH

*Simpang Tiga Abadi Komering Ilir Regency, South Sumatera
Province: Trances of the Old River Wetland*

Muhammad Fadhlan Syuaib Intan

Pusat Penelitian Arkeologi Nasional

Jl. Raya Condet Pejaten, No. 4, Sudiang Raya Makassar, Indonesia

geobugis@yahoo.co.id

Naskah diterima: 18/02/2019; direvisi: 28/03-09/05/2019; disetujui: 25/06/2019

Publikasi ejurnal: 30/06/2019

Abstract

The east coast of South Sumatra is a wetland area that contains many archaeological remains, one of which is the Simpang Tiga Abadi Site, Simpang Tiga Village, Tulung Selapan District, Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatra Province. The problem associated with wetlands in the research area is how the past community reached the Simpang Tiga Abadi site to conduct social relations with the local community. The aim of the study was to determine the geological environmental conditions of the study area, the shape and pattern of old river flows in the Eternal Three Junction area, and the position of the old river towards the Lebong Hitam River or the Lumpur River. In addition to the geological conditions of this site, we also discussed the mapping of old river trails, including the flow patterns and relations between old rivers and rivers that are still flowing at this time. The method applied, is literature review, geological survey, and map analysis. The results of field observations prove that the site landscape includes a terrestrial morphological unit with a slope of 0-2%, and the height of the sea level is 1-7 meters. Deranged flow pattern, periodic river, and adult-old river stage. The composition of this site is swamp sediment, quartz sandstone, and tuff, and lineament as a result of geological structures. The old river reconstruction turned out to flow together with the Lebong Hitam River and Lumpur River. The Simpang Tiga Abadi site is inhabited from the 9th century to the 18th century.

Keyword: Wetland archaeology, old river trail, Sumpang Tiga Abadi Site.

Abstrak

Pesisir timur Sumatera Selatan merupakan daerah lahan basah yang banyak mengandung tinggalan kepurbakalaan, salah satunya adalah Situs Simpang Tiga Abadi, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Masalah yang terkait dengan lahan basah di wilayah penelitian, adalah bagaimana masyarakat masa lalu mencapai Situs Simpang Tiga Abadi untuk melakukan hubungan sosial dengan masyarakat setempat. Tujuan penelitian untuk mengetahui kondisi lingkungan geologi wilayah penelitian, bentuk dan pola aliran sungai lama di wilayah Simpang Tiga Abadi, dan posisi sungai lama tersebut terhadap Sungai Lebong Hitam atau dengan Sungai Lumpur. Selain kondisi geologi situs ini, dibahas pula tentang pemetaan jejak sungai lama, mencakup pola aliran dan hubungan antara sungai lama dengan sungai-sungai yang masih mengalir saat ini. Metode yang diterapkan, adalah kajian pustaka, survei geologi, dan analisis peta. Hasil pengamatan lapangan membuktikan bahwa bentang alam situs termasuk satuan morfologi dataran dengan kemiringan 0-2%, dan ketinggian dari permukaan air laut adalah 1-7 meter. Berpola aliran deranged, sungai periodis, serta berstadia sungai dewasa-tua. Batuan penyusun situs ini adalah endapan rawa, batupasir kuarsa, dan tufa, serta kelurusan sebagai hasil dari struktur geologi. Rekonstruksi sungai lama ternyata alirannya menyatu dengan Sungai Lebong Hitam dan Sungai Lumpur. Situs Simpang Tiga Abadi dihuni dari abad ke-9 hingga abad ke-18.

Kata Kunci: Arkeologi lahan basah, jejak sungai lama, Situs Sumpang Tiga Abadi.

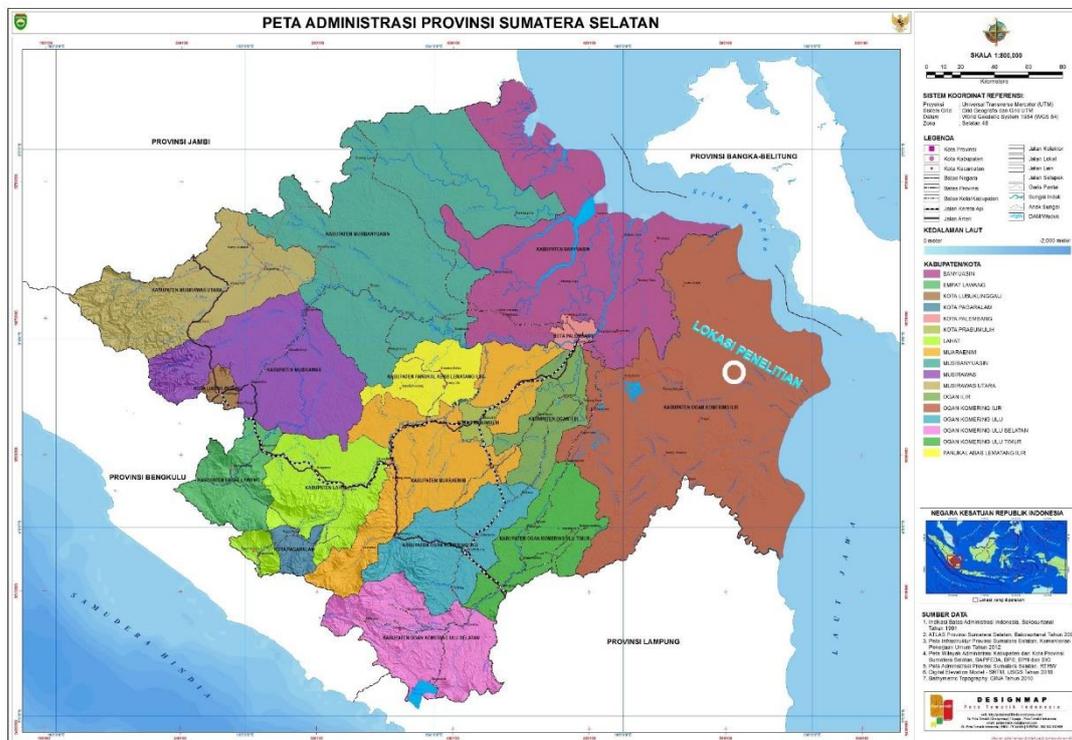
PENDAHULUAN

Pulau Sumatera terletak di bagian barat Kepulauan Nusantara, di sebelah utara berbatasan dengan Teluk Benggala, di timur dengan Selat Malaka, di selatan dengan Selat Sunda, dan di barat dengan Samudera Hindia. Di sebelah timur Pulau Sumatra, banyak dijumpai rawa yang dialiri oleh sungai-sungai besar, antara lain; Asahan (Sumatra Utara), Kampar, Siak dan Sungai Indragiri (Riau), Batang Hari (Sumatra Barat, Jambi), Ketahun (Bengkulu), Musi, Ogan, Lematang, Komerling (Sumatra Selatan), dan Way Sekampung (Lampung) (Intan, 2015, pp. 11–33, 2017, pp. 1–14).

Secara fisiografi, pesisir timur Sumatera Selatan merupakan wilayah lahan basah, dengan ketinggian di bawah 5 meter dari atas permukaan laut, yang dikenal dengan kawasan lahan basah Teluk Cengal, yang mencakup daerah Tulung Selapan, Cengal, dan Pematang Panggang. Simpang Tiga Abadi, bagian dari lahan basah Tulung Selapan adalah wilayah permukiman

transmigrasi yang dihuni sejak lima tahun terakhir (gambar 1). Di area permukiman transmigrasi, oleh pemerintah dibuat saluran primer (SP) yang disebut kanal, yang berfungsi sebagai sarana transportasi air.

Penelitian di Teluk Cegal dilakukan pada Tahun 1992, 2012 dan 2015 oleh tim Balai Arkeologi Sumatera Selatan. Pada akhir 2015 terjadi kebakaran lahan di Cengal yang berakibat terungkapnya tinggalan arkeologis di wilayah Desa Ulak Kedondong, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komerling Iir. Penggalan liar dilakukan secara besar-besaran menemukan berbagai jenis artefak, sisa-sisa bangunan kayu dan kepingan-kepingan papan perahu kuna dalam satu area yang luas. Selanjutnya, pada awal 2016 oleh tim Balai Arkeologi Sumatera Selatan di lokasi ini, menjumpai kondisi situs yang telah rusak karena kebakaran dan aktivitas penggalan liar oleh sekelompok orang untuk mengambil artefak emas, keramik, manik-manik dan bahkan tiang-tiang kayu bangunan kuna yang



Gambar 1. Keletakan Sektor Simpang Tiga Abadi, Situs Tulung Selapan dalam peta wilayah Provinsi Sumatera Selatan (**Sumber:** Design Map, 2014 dengan modifikasi)

dianggap bernilai ekonomi. Kawasan ini mencakup wilayah yang luas, di antara Sungai Langipi dan Sungai Ketupak, yang keduanya bertemu dengan Sungai Lumpur (Rangkuti, 2017).

Di wilayah Teluk Cengal, perahu kuna tradisi Asia Tenggara ditemukan pertama kali pada 1992 di Desa Tulung Selapan, Kecamatan Tulung Selapan. Sisa-sisa perahu yang ditemukan antara lain tali ijuk (*arenga pinnata*) sebagai pengikat papan perahu (*sewn plank*), pasak kayu dan papan-papan perahu (Wiyana, 2013, pp. 149–154). Temuan berikutnya pada tahun 2009 ketika seorang penduduk Desa Pasir, Kecamatan Cengal menemukan perahu kuna di dalam Sungai Pasir. Bangkai perahu kayu itu kemudian diangkat dalam kondisi yang relatif lengkap mulai dari bagian haluan sampai buritan. Tim Balai Arkeologi Sumatera Selatan meninjau temuan tersebut pada 2012. Dijumpai papan-papan perahu terserak di tanah dan sebagian papan-papan perahu dijadikan *jerambah* (jembatan) untuk menghubungkan rumah-rumah penduduk yang berupa rumah panggung dari kayu. Artefak-arterfak yang ditemukan dalam perahu adalah fragmen-fragmen keramik, tembikar yang sebagian besar telah pecah, artefak-arterfak kayu, tempurung kelapa, dan sisa perahu berupa bagian lunas, badan, buritan tempat kemudi (Wiyana, 2013, pp. 149–154).

Pada 2015 tim Balai Arkeologi Sumatera Selatan mendata temuan sekeping papan perahu di Desa Simpang Tiga Sakti, Kecamatan Tulung Selapan. Lokasi berada di sekitar aliran Sungai Bekasi bagian dari Sungai Lebunggajah. Panjang perahu di Sungai Bekasi sekitar 21–25 m. Sekitar 300 meter dari lokasi perahu ditemukan sisa-sisa tiang bangunan kayu dari batang nibung. Bagian perahu yang masih tersisa di lokasi adalah satu keping papan dengan lima tonjolan *tambuku*. Lubang-lubang pasak dan tali ijuk semuanya telah rusak, sebagian papan perahu ini terbakar akibat kebakaran lahan pada saat kemarau panjang. Selain di

Desa Simpang Tiga Sakti, juga dilakukan pengamatan di Desa Ulak Kedondong. Temuan perahu kuna berada di lokasi yang disebut Talang Sekuncit, Dusun 1 Desa Ulak Kedondong. Tim menemukan lima papan perahu kuna yang terbakar akibat kebakaran lahan gambut (Wiyana, Suranto, Sofian, & Adhifani, 2015). Kawasan situs Ulak Kedondong merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai Lumpur di wilayah Kecamatan Cengal, Kabupaten OKI. Situs-situs arkeologi terdapat pada aliran Sungai Langipi dan Sungai Ketupak (Rangkuti & Wiyana, 2016).

Kecamatan Tulung Selapan memiliki lahan basah yang cukup luas, salah satu diantaranya berada di wilayah Desa Simpang Tiga. Lahan basah (*wetland*) mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. Hal ini telah diakui dalam Konvensi Ramsar bahwa manusia mempunyai hubungan saling ketergantungan dengan lingkungan. Konvensi Ramsar adalah *Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat*, yaitu perjanjian internasional untuk konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara berkelanjutan, yang diadakan pada 2 Februari 1971 di Iran yang dihadiri 18 negara (Ramsar, 2013). Oleh Pemerintah Indonesia, konvensi ini diratifikasi pada tahun 1991 melalui Keputusan Presiden RI No. 48 tahun 1991, sehingga Indonesia memiliki tiga lokasi Ramsar yaitu Taman Nasional Merbak di Riau, Taman Nasional Danau Sentarong di Kalimantan Barat, dan Taman Nasional Wasur di Merauke Papua. Secara umum lahan basah dapat diartikan sebagai daerah peralihan antara sistem perairan dan sistem daratan. Lahan basah harus mempunyai paling sedikit salah satu ciri berikut: Paling sedikit secara periodik, lahan basah terutama mendukung hidrofita (tumbuhan air). Dengan demikian maka lahan basah merupakan ekosistem peralihan (*ekoton*) antara ekosistem perairan (*aquatic*) dan ekosistem daratan (*terrestrial*).

Lahan basah (*wetland*) dalam arkeologi, oleh Rangkuti (2008) disebut dengan Arkeologi Lahan Basah (*Wetland Archaeology*) dan menyatakan bahwa pusat peradaban kuno juga muncul dari lahan basah, sehingga penelitian, pelestarian dan pemanfaatan situs-situs arkeologi di lahan basah sudah waktunya diprioritaskan. Selain itu dinyatakan bahwa, kehidupan manusia masa kini merupakan kelanjutan kehidupan manusia masa lalu, meskipun dengan kadar yang semakin meningkat. Menelusuri kehidupan masa lalu melalui benda dan situs-situs arkeologis mempunyai arti penting untuk memahami budaya masa lalu yang dapat dijadikan dasar dalam pembangunan jatidiri bangsa dan Negara (Rangkuti, 2008).

Lahan basah Situs Simpang Tiga Abadi menjadi sumber utama perekonomian, kebudayaan, ilmu pengetahuan maupun nilai rekreasi. Secara ekologis lahan basah berfungsi sebagai pengatur tata air dan sebagai habitat yang mendukung sifat-sifat flora dan fauna yang khas, terutama burung air.

Secara universal, kebutuhan manusia mencakup kebutuhan biologi (primer), kebutuhan sosial (sekunder), dan kebutuhan integratif (tertier). Ketiga kebutuhan itu merupakan perwujudan dari hakekat manusia sebagai makhluk pemikir dan berperasaan (Eriawati, 1997). Kebutuhan-kebutuhan manusia itu dicapai dengan cara memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada dalam lingkungan, yang menjadi energi bagi kelangsungan hidupnya.

Lingkungan memang merupakan faktor yang penting bagi terciptanya suatu proses hubungan antara manusia dengan budayanya. Hubungan itu tidaklah semata-mata terwujud sebagai hubungan ketergantungan manusia terhadap lingkungannya, tetapi juga terwujud sebagai suatu hubungan dimana manusia mempengaruhi dan merubah lingkungannya (Eriawati, 1997).

Segala kebutuhan hidup manusia tersebut dapat dipenuhi oleh keberadaan makanan pada lingkungan alam tempat mereka hidup. Daerah-daerah yang dipilih untuk dimukimi manusia adalah tempat yang dapat memberikan cukup persediaan bahan makanan dan air tawar, terutama di sekitar tempat-tempat yang sering dikunjungi atau dilalui hewan, seperti padang rumput, hutan kecil dekat sungai atau dekat rawa-rawa.

Lingkungan di wilayah Pesisir Timur Sumatera Bagian Selatan tempat ditemukannya situs yang memiliki karakter sebagai situs pemukiman, pada masa kini memperlihatkan morfologi lahan basah. Kondisi semacam itu dapat dikatakan bukanlah lingkungan yang nyaman sebagai tempat bermukim. Akan tetapi dari tinggalan arkeologis, baik dari segi jumlah maupun variasi, yang ditemukan di wilayah tersebut memperlihatkan bahwa wilayah tersebut dihuni oleh suatu kelompok dalam jangka waktu yang tidaklah sebentar, yang ditandai dengan adanya tiang-tiang bangunan. Jelas bahwa kondisi lingkungan masa lalu dengan sekarang tidaklah banyak berubah, namun memunculkan permasalahan, bagaimana masyarakat masa lalu mencapai Situs Simpang Tiga Abadi untuk melakukan hubungan sosial dengan masyarakat setempat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) kondisi lingkungan geologi wilayah Simpang Tiga Abadi, 2) bentuk dan pola aliran sungai lama di wilayah Simpang Tiga Abadi, 3) posisi sungai lama tersebut, apakah ada hubungan aliran dengan Sungai Lebong Hitam atau dengan Sungai Lumpur dan, 4) menentukan letak situs di sungai lama yang ditemukan selama pemetaan. Tujuan pemetaan jejak sungai lama adalah mencari hubungan sungai-sungai lama dengan sungai-sungai yang hingga kini masih mengalir (Sungai Lebong Hitam dan atau Sungai Lumpur).

Lokasi penelitian difokuskan di wilayah Simpang Tiga Abadi yang

termasuk wilayah administratif Dusun Simpang Tiga Abadi (dikenal dengan istilah SP5), Desa Simpang Tiga, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatra Selatan ([gambar 1](#)).

Secara geografis, lokasi penelitian terletak pada garis lintang $105^{\circ}45'57,9''$ bujur timur dan $3^{\circ}18'26,9''$ lintang selatan, tercantum pada Peta Topografi Lembar SA48-15 (Toboali) Series T503, Edition 1-AMS, Army Map Service Tahun 1944, berskala 1:250.000. Situs ini dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat dari Kota Palembang, lalu dilanjutkan dengan menggunakan perahu bermotor dari Kota Tulung Selapan. Data yang digunakan dalam tulisan ini adalah hasil penelitian penulis bersama Tim Penelitian Balai Arkeologi Palembang Tahun 2018.

METODE PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan, maka diterapkan beberapa metode antara lain, kajian pustaka yang berkaitan dengan situs tersebut, melakukan pengamatan geologi (batuan, bentang alam, struktur geologi), melakukan pemetaan jejak

sungai lama, dan keletakan sektor-sektor yang mengandung tinggalan arkeologi. Berdasarkan data-data lapangan, kemudian dilakukan interpretasi, baik dengan peta topografi maupun dengan peta geologi.

Pada penelitian ini dilakukan beberapa analisis, yaitu analisis petrologi (yang menyangkut batuan), dan analisis peta topografi (yang berkaitan dengan hubungan antar sungai). Dengan peta tersebut, akan diketahui jalur transportasi antara masyarakat setempat dengan masyarakat luar, dan lokasi-lokasi persinggahannya berdasarkan sektor-sektor yang mengandung temuan arkeologis, yang telah ditentukan keletakannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Geologi

Morfologi atau bentuk bentang alam suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, lithologi, struktur geologi, stadia daerah, dan tingkat erosi yang bekerja (Thornbury, 1964).

Secara umum bentang alam (morfologi) wilayah Simpang Tiga Abadi, memperlihatkan kondisi dataran rendah. Kondisi bentang alam seperti ini, apabila di klasifikasi berdasarkan Sistem Desautettes



Gambar 2. Satuan morfologi dataran di Sektor Simpang Tiga Abadi, dengan bentuk permukaan yang sangat landai dan datar, mempunyai prosentase kemiringan lereng antara 0 – 2% (**Sumber:** Dikomunitasi Balai Arkeologi Sumsel, 2018)



Gambar 3. Kanal di SP5 (Dusun Simpang Tiga Abadi), merupakan salah satu kanal yang ber muara di Sungai Lumpur, Kanal ini dibuat oleh pemerintah dengan fungsi sebagai jalur transportasi dan drainase pemukiman dan lahan pertanian (**Sumber:** Dokumentasi Balai Arkeologi Sumsel, 2018).

(Desaunettes, 1977; Todd, 1980), yaitu atas persentase kemiringan lereng dan beda tinggi relief suatu tempat, maka daerah penelitian termasuk dalam Satuan Morfologi Dataran.

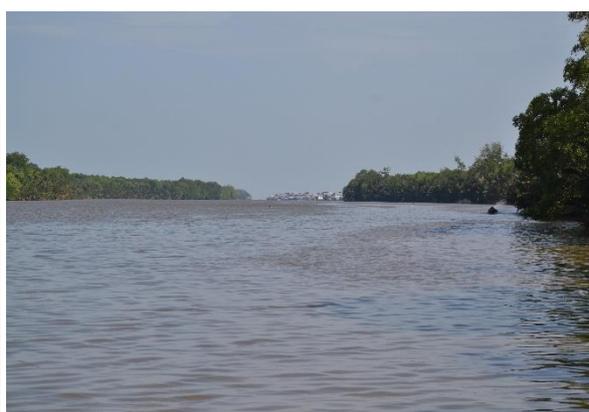
Satuan Morfologi Dataran ([gambar 2](#)), berciri bentuk permukaan yang sangat landai dan datar, dengan persentase kemiringan lereng antara 0 - 2%, bentuk

lembah yang sangat lebar. Satuan morfologi ini menempati 100% dari wilayah penelitian. (Intan, 2015, pp. 11–33, 2017, pp. 1–14).

Sungai terbesar yang mengalir di Sektor Simpang Tiga Abadi dan sekitarnya adalah Sungai Lumpur dan Sungai Lebong Hitam. Sungai Lumpur berarah aliran dari barat daya ke timur laut berbelok ke arah tenggara dan bermuara di Laut Jawa,



Gambar 4. Kanal di SP5 (Dusun Simpang Tiga Abadi), merupakan salah satu kanal yang dibuat oleh pemerintah, berfungsi sebagai jalur transportasi dan drainase pemukiman dan lahan pertanian (**Sumber:** Dokumentasi Balai Arkeologi Sumsel, 2018)



Gambar 5. Sungai Lumpur (salah satu sungai besar/induk) yang terletak di sebelah barat wilayah penelitian (**Sumber:** Dokumentasi Balai Arkeologi Sumsel, 2018).

sedangkan Sungai Lebong Hitam berarah aliran dari barat laut ke arah tenggara dan bermuara di Laut Jawa. Sungai-sungai kecil lainnya adalah Sungai Langpipik, Sungai Ketupat, dan Sungai Pisang, serta beberapa anak sungai kecil lainnya.

Sungai Lumpur dan Sungai Lebong Hitam mempunyai arti penting bagi pembangunan pemukiman transmigran. Di area tersebut dibuat kanal-kanal selebar 20 meter yang berfungsi sebagai jalur transportasi dan drainase permukiman dan lahan pertanian (**gambar 3**).

Kanal-kanal itu oleh pemerintah masing-masing dinamai Saluran Primer (SP) dan setiap SP diberi nomor menurut urutan pembuatannya. Di wilayah penelitian terdapat kanal atau SP, misalnya SP1, SP2, SP3, SP4 dan SP5 (**gambar 4**).

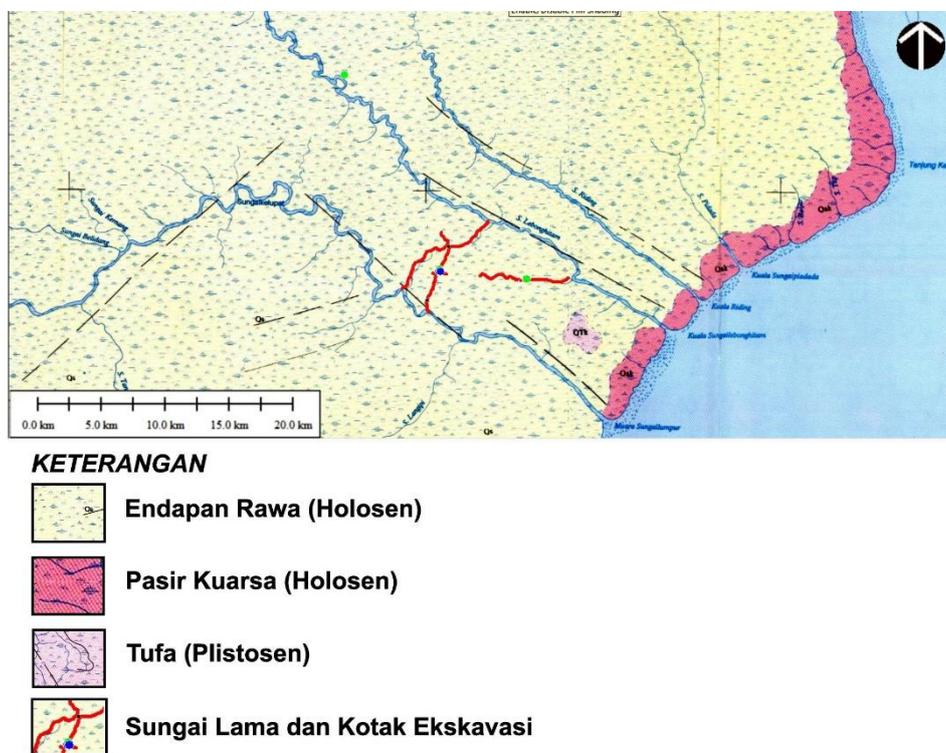
Pola pengeringan permukaan (*surface drainage pattern*) sungai induk di lokasi penelitian menunjukkan arah umum dari barat laut ke tenggara dan bermuara di Laut Jawa. Sungai induk yang mengalir di

wilayah penelitian adalah Sungai Lebong Hitam dan Sungai Lumpur (**gambar 5**).

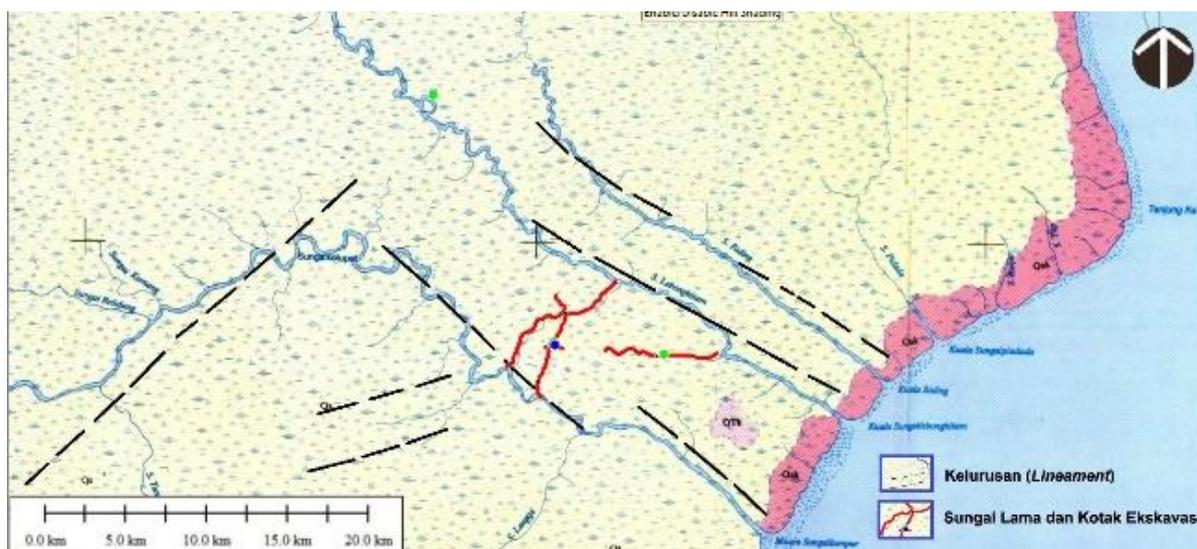
Kelompok sungai tersebut termasuk pada sungai yang berstadia Sungai Dewasa-Tua (*old-mature river stadium*). Keseluruhan sungai alam di wilayah penelitian, memberikan kenampakan Pola Pengeringan Deranged. Berdasarkan pada klasifikasi atas kuantitas air, sungai-sungai tersebut termasuk sungai periodis (Intan, 2015, pp. 11–33, 2017, pp. 1–14; Lobeck, 1939; Thornbury, 1964)

Dari pengamatan lapangan daerah penelitian pada umumnya merupakan daerah lahan basah. Secara umum wilayah Situs Simpang Tiga Abadi dapat dikelompokkan menjadi satuan batuan: 1) Endapan Rawa yang berumur Holosen; 2) Batuan Pasir Kuarsa yang berumur Holosen dan; 3) Batuan Tufa yang berumur Plistosen (Mangga, Sukardi, & Sidaro, 1993) (**gambar 6**).

Hasil Interpretasi topografi, memperlihatkan bahwa di daerah penelitian



Gambar 6. Batuan penyusun wilayah penelitian (Sumber: Mangga et al., 1993, dengan modifikasi)



Gambar 7. Struktur geologi di wilayah penelitian berupa kelurusan (*lineament*) (Sumber: Mangga et. al., 1993, dengan modifikasi)

terdapat adanya kelurusan (*lineament*) yang digambarkan dalam bentuk garis putus-putus, yang berarah barat laut - tenggara dan barat daya - timur laut. Sungai lama dan kotak ekskavasi terletak ditengah-tengah kelurusan (*lineament*) tersebut (gambar 7).

Kelurusan (*lineaments*) adalah cerminan morfologi yang teramati di permukaan bumi sebagai hasil dari aktivitas gaya geologi dari dalam bumi. Batasan kelurusan geologi disini adalah sebuah bentukan alamiah yang direpresentasikan oleh keunikan geomorfologi seperti; kelurusan punggung, kelurusan lembah, kelurusan sungai, kelurusan yang disebabkan oleh sesar normal, sesar naik, maupun sesar mendatar. Kelurusan geologi bisa diasumsikan berupa unsur struktur geologi yang belum mengalami pergerakan (*displacement*), apabila sudah mengalami pergerakan, disebut dengan sesar (*fault*) (Biling, 1972).

2. Survei dan Ekskavasi

Kegiatan penelitian (Ekskavasi dan survei) di Sektor Simpang Tiga Abadi, dilakukan di Dusun Simpang Tiga Abadi, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Tulung Selapan. Kegiatan ekskavasi dilakukan di

STA1 dengan membuka 14 kotak TP, yaitu TP1 hingga TP14. Tujuh kotak ekskavasi terletak di sungai lama, empat kotak ekskavasi terletak di pinggir sungai lama, dan tiga kotak ekskavasi terletak di luar sungai lama (Lampiran 1 dan 3). Temuan arkeologi dari kotak ekskavasi, berupa fragmen keramik, fragmen tembikar, tiang kayu, sisa hewan, sisa perahu, logam, batok kelapa, dan ijuk (Intan, 2018). Kegiatan survei dilaksanakan bersamaan dengan pemetaan jejak sungai lama, dan telah berhasil mendata 9 lokasi atau titik yang mengandung tinggalan arkeologi, yaitu Simpang Tiga Abadi-1 (STA-1) hingga Simpang Tiga Abadi-10 (STA-10) (Lampiran 2).

3. Jejak Sungai Lama

Pemetaan jejak sungai lama menggunakan peralatan *Global Positioning System (Garmin GPSMAP76CSx)* dan Kompas Geologi (Brunton 5006). Penentuan arah menggunakan kompas geologi, sedangkan penentuan titik koordinat menggunakan kode STA. Pemetaan sungai lama tahun 2018, diawali dari hasil Analisa Peta Topografi (APT) yang memberikan data bahwa ada beberapa sungai lama yang

masih terdapat di wilayah Sektor Simpang Tiga Abadi dan sekitarnya kemungkinan besar dapat dihubungkan antar sungai-sungai lama tersebut. Umumnya sungai-sungai lama yang dipetakan mempunyai lebar 10 meter, dan lebar dataran banjirnya mencapai 5 - 10 meter, khusus di daerah muara, sungai lama ini mempunyai lebar mencapai 20 meter. Sungai-sungai lama di wilayah penelitian ditumbuhi jenis rerumputan yang menyukai lahan basah seperti rumput mendongan (*Scirpus juncooides*). Muara Sungai lama di Sektor Simpang Tiga Abadi dan sekitarnya yang terdekat adalah Sungai Lumpur dan Sungai Lebong Hitam yang bermuara di Laut Jawa.

Pemetaan sungai lama Tahun 2018 diawali di STA1 (kotak TP8) pada koordinat 03°18'23,8" LS - 105°45'54,8" BT (GPS-04) menuju ke arah utara melintasi jalan jalur 11 hingga pada koordinat 3°18'22,0" LS - 105°45'56,2" BT (GPS-67) ditetapkan sebagai **Sektor STA2**. Jejak sungai lama bermeander ke arah utara dan pada koordinat 3°18'21,2" LS - 105°45'56,3" BT (GPS-82) ditetapkan sebagai **Sektor STA-3**. Selanjutnya jejak sungai lama berkelok-kelok ke utara dan barat membentuk meander pada koordinat 3°17'22,8" LS - 105°46'18,3" BT (GPS-11), sungai lama bercabang ke arah barat, timur dan utara. Dari titik GPS-11 ke arah utara membentuk meander pada koordinat 3°17'05,4" LS - 105°46'12,4" BT (GPS-13), selanjutnya berbelok ke arah barat laut dan pada koordinat 3°16'46,8" LS - 105°46'00,9" BT (GPS-14) ditetapkan sebagai **Sektor STA-8** (lampiran 4). Dari STA-8 jejak sungai lama tidak dapat dipetakan akibat lebatnya ilalang hingga ke Sungai Lebong Hitam yang berjarak 2,5 km.

Dari titik GPS-11 ke arah barat berkelok-kelok membentuk meander hingga pada koordinat 3°17'21,8" LS - 105°46'12,1" BT (GPS-12), dan selanjutnya berbelok ke arah barat daya dan pada koordinat 3°17'37,2" LS - 105°45'23,5" BT (GPS-12A) sungai lama menyambung

dengan anak Sungai Lumpur dan bermuara di Sungai Lumpur. Dari titik GPS-11 ke arah timur berkelok-kelok membentuk meander hingga ke arah timur laut dan pada koordinat 3°17'14,5" LS - 105°47'06,2" BT (GPS-11A) menyambung dengan Sungai Lumpur.

Pemetaan jejak sungai lama dilanjutkan dari GPS-54 (Pak Batur) di koordinat 3°18'44,6" LS - 105°49'38,5" BT yang ditetapkan sebagai **Sektor STA-6** (Lampiran 5). Jejak sungai lama di GPS-54 dilanjutkan ke arah timur dan pada koordinat 3°18'46,5" LS - 105°49'38,9" BT (GPS-54A), jejak sungai lama ini menyambung dengan anak Sungai Lebong hitam dan bermuara di Sungai Lebong Hitam. Pemetaan jejak sungai lama di GPS-54 dilanjutkan ke arah barat berbentuk meander ke arah utara berbelok ke arah selatan pada koordinat 3°18'45,2" LS - 105°49'32,9" BT (GPS-55), lurus ke arah barat daya hingga di koordinat 3°18'49,5" LS - 105°49'27,8" BT (GPS-56). Selanjutnya berbelok ke arah barat hingga di koordinat 3°18'48,8" LS - 105°49'22,3" BT (GPS-51), lalu jejak sungai lama ini bermeander di koordinat 3°18'38,8" LS - 105°49'56,8" BT (GPS-57), 3°18'41,2" LS - 105°48'49,9" BT (GPS-58), 3°18'33,7" LS - 105°48'24,4" BT (GPS-59), berbelok ke arah barat daya pada koordinat 3°18'43,5" LS - 105°48'08,7" BT (GPS-60) hingga ke koordinat 3°18'33,2" LS - 105°47'41,0" BT (GPS-61). dari titik GPS-61 jejak sungai lama berbelok ke arah barat daya membentuk meander hingga pada koordinat 3°18'38,2" LS - 105°47'37,9" BT (GPS-63) dan selanjutnya pemetaan dihentikan karena jejak sungai lama ini tidak terdeteksi akibat pengolahan ladang yang sangat aktif.

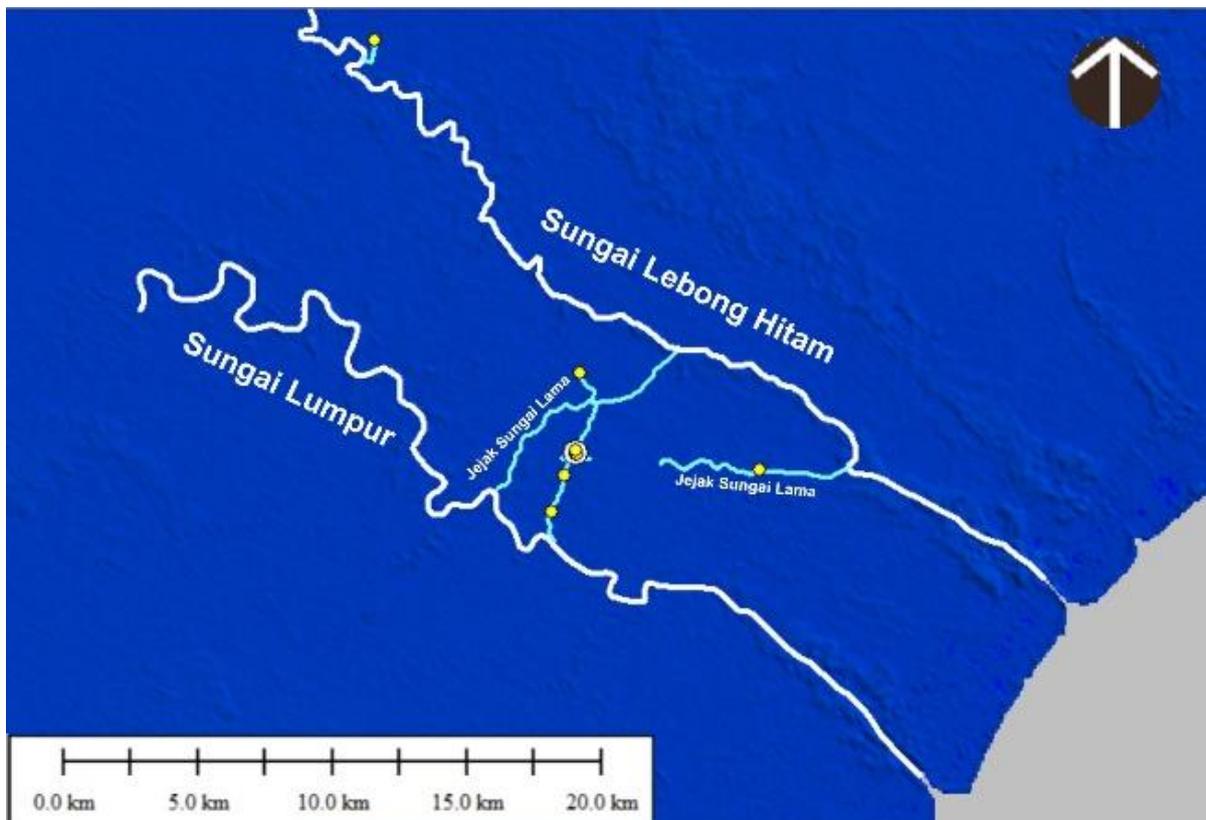
Dari STA1 (kotak TP8) pada koordinat 03°18'23,8" LS - 105°45'54,8" BT (GPS-04) menuju ke arah barat daya hingga di koordinat 03°18'32,3" LS - 105°45'48,4" BT (GPS-18) menjadi titik cabang ke arah barat dan ke arah selatan. Titik GPS-18 ke arah barat, jejak sungai lama terdeteksi di koordinat 03°18'32,2" LS -

105°45'48,0" BT (GPS-19), 03°18'32,4" LS - 105°45'47,3" BT (GPS-20), 03°18'32,3" LS - 105°45'46,3" BT (GPS-21), 03°18'32,4" LS - 105°45'41,2" BT (GPS-22), 03°18'30,4" LS - 105°45'38,8" BT (GPS-23), 03°18'30,0" LS - 105°45'38,3" BT (GPS-24) selanjutnya pemetaan dihentikan, karena pengerjaan ladang yang sangat aktif.

Titik GPS-18 ke arah barat, jejak sungai lama terdeteksi di koordinat 03°18'51,1 LS - 105°45'42,4" BT (GPS-45) dan ditetapkan sebagai **Sektor STA-9** (Gambar-11). Selanjutnya lurus ke arah selatan hingga di koordinat 03°19'35,8" LS - 105°45'26,9" BT (GPS-37) dan ditetapkan sebagai **Sektor STA-10** (lampiran 6). Jejak sungai lama lurus ke selatan hingga di koordinat 03°19'40,8 "LS - 105°45'23,8" BT (GPS-10A) merupakan titik pertemuan dengan sungai lama dari arah kiri. Pertemuan dua sungai lama dari titik GPS-

10A, lalu mengalir ke arah selatan dan pada koordinat 03°20'05,7 "LS - 105°45'26,4" BT (GPS-99), jejak sungai lama menyatu dengan Sungai Lumpur.

Pemetaan jejak sungai lama dimulai lagi dari koordinat 03°20'05,7" LS - 105°45'26,4" BT (GPS-81), ke arah barat, lalu berbelok ke arah utara, berbelok ke arah barat dan pada koordinat 03°18'26,6" LS - 105°45'57,4" BT (GPS-70) dan ditetapkan sebagai **Sektor STA-5** (lampiran 7). Dari STA-5 jejak sungai lama berbelok ke utara dan berbelok ke arah barat hingga di koordinat 03°18'26,4 "LS - 105°45'56,6" BT (GPS-69) dan ditetapkan sebagai **Sektor STA-4** (lampiran 7). Selanjutnya jejak sungai lama ke arah barat laut dan lurus ke utara menyambung dengan sungai lama antara STA-1 dengan STA-2 di koordinat 03°18'23,9" LS - 105°45'53,0" BT (GPS-66).



Gambar 8. Hasil pemetaan jejak di sungai lama yang terletak diantara Sungai Lebong Hitam dan Sungai Lumpur (Sumber: Intan, 2018; data topografi berdasarkan peta Jarvis et al., tahun 2008)



Gambar 9. Rumput mendongan (*Scirpus juncooides*), ciri khas tumbuhan di sungai lama (**Sumber:** Dokumentasi Balai Arkeologi Sumsel, 2018)

Sungai lama di Simpang Tiga Abadi, telah dapat direkonstruksi ([gambar 8](#)) dengan menggunakan Sektor STA-1 sebagai titik pusat, sebagai berikut:

- dari Sektor STA-1 sungai lama mengalir ke arah utara melewati Sektor STA-2 dan Sektor STA-3 dan pada koordinat 3°17'22,8" LS - 105°46'18,3" BT, sungai lama berbelok ke arah timur laut dan bermuara di Sungai Lebong Hitam.
- dari Sektor STA-1 sungai lama mengalir ke arah selatan melewati Sektor STA-9 dan Sektor STA-10 dan bermuara di Sungai Lumpur.
- dari koordinat 3°17'22,8" LS - 105°46'18,3" BT, sungai lama mengalir ke arah barat lalu berbelok ke arah barat daya dan bermuara di Sungai Lumpur.
- sungai lama yang berarah barat-timur, mengalir ke timur melewati Sektor STA-6 dan bermuara di Sungai Lebong Hitam. Namun ke arah barat, sungai lama tersebut belum dapat dihubungkan dengan Sektor STA-1 sebagai titik pusat.

Sungai lama di Simpang Tiga Abadi mempunyai lebar 10 meter (dengan lebar dataran banjirnya mencapai 10 meter), dengan tumbuhan khas berupa rumput mendongan (*Scirpus juncooides*) ([gambar 9](#)).

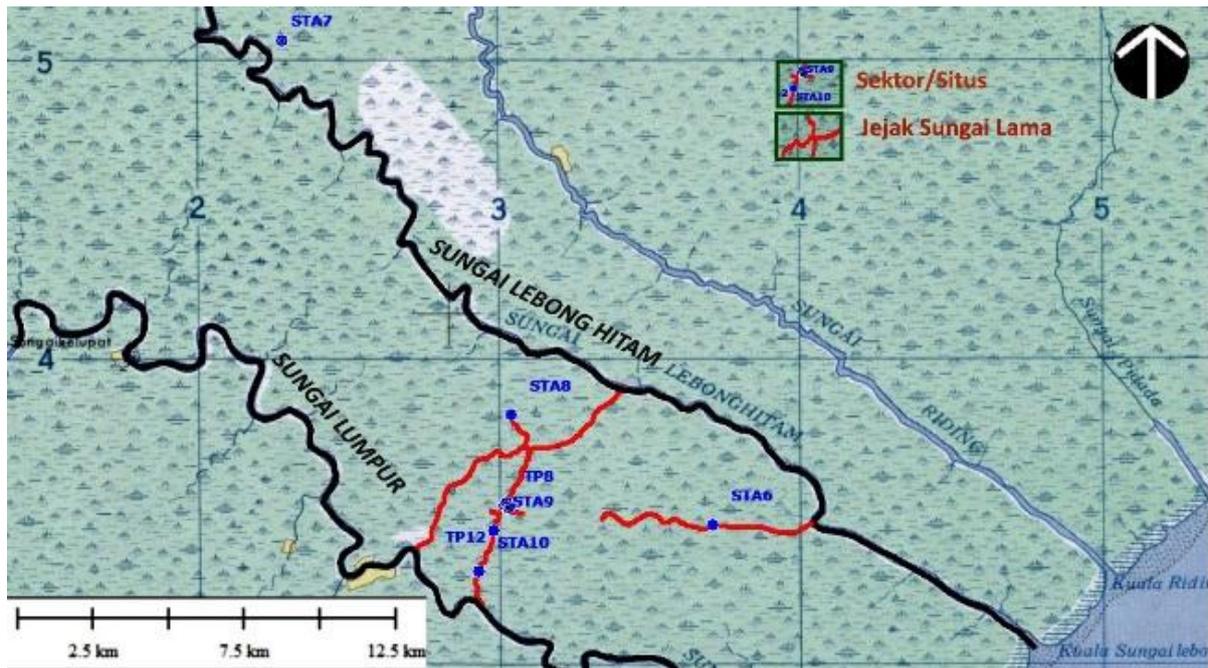
Sektor STA-2 hingga Sektor STA-10 terletak di sisi kiri dan kanan dari sungai-sungai lama.

Penentuan umur relatif Simpang Tiga Abadi dilakukan melalui temuan arkeologi berupa fragmen keramik, yaitu fragmen keramik Dinasti Tang dan Dinasti Qing. Berdasarkan hal tersebut, daerah ini telah dijadikan permukiman sejak abad IX Masehi hingga abad XVIII Masehi.

Sungai lama di Simpang Tiga Abadi, baik sungai induk maupun anak-anak sungainya berpola Deranged, dan saling menyambung hingga ke sungai sekarang ([gambar 10](#)) dan bermuara di laut, sehingga perahu menjadi satu-satunya alat transportasi untuk menjelajahi lahan basah di wilayah tersebut.

Hunian di Simpang Tiga Abadi ini merupakan pemukiman yang cukup padat yang berada di atas rawa, menempati rumah-rumah bertiang (rumah panggung) yang didirikan di tepi sungai-sungai lama yang bermuara di Sungai Lebong Hitam dan Sungai Lumpur.

Sarana transportasi di sungai lama di Situs Simpang Tiga Abadi adalah perahu. Hasil survei menemukan sisa papan perahu dan kemudi di beberapa sektor, yaitu di Sektor-4 (ST-4) dan Sektor-7 (ST-7).



Gambar 10. Hasil pemetaan jejak di sungai lama di Simping Tiga Abadi dalam peta topografi (Sumber: Army Map Service 1944 dengan modifikasi)

Temuan sisa perahu ini juga mencerminkan kondisi sosial masyarakat Situs Simping. Temuan sisa perahu ini juga mencerminkan kondisi sosial masyarakat yang datang ke Situs Simping Tiga Abadi di pesisir timur Sumatera Selatan masa lalu sebagai pedagang dan pelaut, dan Situs Simping Tiga Abadi adalah pelabuhan penghubung sekaligus gudang bagi berbagai komoditas yang datang baik dari India, Tiongkok maupun dari Nusantara sendiri.

Pembukaan lahan basah untuk dimanfaatkan sebagai pemukiman transmigrasi, lahan pertanian dan perkebunan membawa dampak terhadap kehilangan sumber hayati, terjadi perubahan hidrologi dan iklim mikro. Dampak utama pada lahan basah adalah terjadinya penurunan kualitas lahan, seperti yang terlihat saat ini di Simping Tiga Abadi, yaitu beberapa sungai lama tertutup atau tertimbun akibat pembuatan kanal atau jalur dan aktivitas penduduk. Namun dengan ditemukannya tinggalan arkeologis, baik dari segi jumlah maupun variasi di lokasi tersebut, memperlihatkan bahwa di Simping Tiga Abadi telah dihuni oleh suatu

kelompok dalam jangka waktu yang tidaklah sebentar, yang ditandai dengan adanya tiang-tiang bangunan berukuran cukup besar. Tiang-tiang bangunan berasal dari batang pohon Nibung (*Oncosperma filamentosum*) dan batang pohon Ulin (*Eusideroxylon zwageri*) yang diameternya 10-20 cm. Panjang rumah 15 meter, dengan jarak antar tiang adalah 2-2,5 meter, dengan melihat ukuran dapat dipastikan bahwa rumah tersebut termasuk kategori rumah yang besar, yang dapat dihuni hingga dua keluarga. Sebagai perbandingan, rumah-rumah di lahan basah Simping Tiga Abadi, hampir sama dengan rumah-rumah Suku Bugis yang saat ini mendiami daerah muara Sungai Lumpur.

PENUTUP

Jejak sungai lama di lahan basah Simping Tiga Abadi, telah dapat direkonstruksi melalui pemetaan, berpola pengeringan permukaan (*surface drainage pattern*) dengan arah umum menyebar, berputar, mengikuti bentuk bentang lahan basah, berpola pengeringan Deranged, bermeander dengan tipe Sungai Dewasa-Tua

(*old-mature river stadium*), dan bermuara di Laut Jawa. Umumnya sungai lama di wilayah penelitian mempunyai lebar 10 meter dengan dataran banjir mencapai 5-10 meter, sedangkan di daerah muara, mencapai lebar 20 meter, dengan vegetasi berupa rumput-rumputan yang dikenal dengan istilah rumput mendongan (*Scirpus juncoides*). Berdasarkan analisis petrologi, batuan penyusun wilayah penelitian adalah Endapan Rawa, Batupasir Kuarsa dan Tufa. Kelurusan (*lineament*) merupakan satu-satunya struktur geologi yang melewati wilayah penelitian.

Kegiatan eksplorasi georkeologi dan pemetaan jejak sungai lama yang dilaksanakan di Simpang Tiga Abadi, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), telah menemukan 10 titik/lokasi yang mengandung tinggalan arkeologi, yang terletak di sisi kiri dan kanan dari sungai lama.

Berdasarkan hasil pemetaan, maka sungai lama di Simpang Tiga Abadi dapat ditelusuri jejaknya yaitu, berarah dari timur laut - barat daya atau sebaliknya dari arah

barat daya ke arah timur laut. Sungai lama yang berarah barat-timur, mengalir ke timur melewati Sektor STA-6 dan bermuara di Sungai Lebong Hitam, namun ke arah barat, sungai lama tersebut belum dapat dihubungkan dengan Sektor STA-1 sebagai titik pusat. Lahan basah Simpang Tiga Abadi dengan sungai lamanya, menggunakan perahu sebagai sarana utama untuk transportasi dan perdagangan. Perahu-perahu yang menjelajah di sungai lama umumnya berukuran kecil, bila dibandingkan dengan perahu-perahu pedagang dari India, Tiongkok maupun dari Nusantara sendiri yang berlabuh di tepi Sungai Lebong Hitam dan atau di Sungai Lumpur. Temuan arkeologi baik dari segi jumlah maupun variasi, dan pertanggalan relatif, memperlihatkan wilayah ini dihuni oleh suatu kelompok dalam jangka waktu yang cukup panjang, yaitu dari abad ke-9 hingga abad ke-18.

DAFTAR PUSTAKA

- Biling, M. P. (1972). *Structural Geology*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliggs.
- Desaunettes, J. R. (1977). *Catalogue of landforms for Indonesia : examples of a physiographic approach to land evaluation for agricultural development* [Unpublished]. Bogor: Trust Fund of the Government of Indonesia Food and Agriculture Organization.
- Eriawati, Y. J. (1997). *Penelitian Sumberdaya Alam (Lingkungan Vegetasi) Di Situs Kompleks Gua Wilayah Maros, Sulsel*. Jakarta: LPA Bid. Arkeometri, Puslit Arkenas.
- Intan, M. F. S. (2015). Eksplorasi Geoarkeologi Di Wilayah Air Sugihan, Sumatra Selatan. In Bambang Budi Utomo (Ed.), *Kehidupan Purba di Lahan Gambut* (pp. 11–33). Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Intan, M. F. S. (2017). Banyu Biru: Jejak Sungai lama Di Lahan Basah. *Siddhayatra*, 22(1), 1–14.

- Intan, M. F. S. (2018). *Lingkungan Geologi Sektor Simpang Tiga Abadi, Situs Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan*.
- Lobeck, A. K. (1939). *Geomorphology, An Introduction To The Study of Landscape*. New York and London: Mc Graw Hill Book Company Inc.
- Mangga, A., Sukardi, & Sidaro. (1993). *Geologi Lembar Tulung Selapan, Sumatera*. Puslitbang Geologi, Ditjen GSM, Deptamben.
- Ramsar, C. S. (2013). *The Ramsar Convention Manual: a guide to the Convention on Wetlands (Ramsar, Iran, 1971)*. Switzerland: Ramsar Convention Secretariat.
- Rangkuti, N. (2008). Arkeologi Lahan Basah di Sumatera Bagian Selatan. In Sutikno (Ed.), *Arkeologi Lahan Basah di Sumatera dan Kalimantan* (pp. 1–21). Balai Arkeologi Palembang.
- Rangkuti, N. (2017). Teluk Cengal: Lokasi Pelabuhan Sriwijaya? *Berkala Arkeologi*, 37(2), 125–140.
- Rangkuti, N., & Wiyana, B. (2016). *Hasil-Hasil Penelitian Arkeologi di Lahan Gambut Provinsi Sumatera Selatan*. Palembang: Balai Arkeologi Palembang.
- Thornbury, W. D. (1964). *Principle of Geomorphology*. New York and London: John Wiley and Sons, inc.
- Todd, D. K. (1980). *Groundwater Hydrology* (Second Edi). New York: John Willey and Son's.
- Wiyana, B. (2013). Temuan Perahu kuno di Sumatera Bagian Selatan. In Inajati Adrisijanti (Ed.), *Perahu Nusantara* (pp. 149–164). Yogyakarta: Kepel Press.
- Wiyana, B., Suranto, Y., Sofian, H. O., & Adhifani, W. R. (2015). *Laporan Hasil Penelitian Arkeologi: Kronologi Situs di Kawasan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan*. Palembang.

Lampiran 1. Tabel kotak ekskavasi dan keletakannya

No	Kotak	Koordinat	Ketinggian (mdpl)	Lahan	Keletakan
1	TP1	03°18'27,0" LS 105°45'57,8" BT	4,28	Komaruddin	Pinggir Sungai lama
2	TP2	03°18'27,1" LS 105°45'57,8" BT	4,27	Komaruddin	Pinggir Sungai lama
3	TP3	03°18'24,8" LS 105°45'54,5" BT	4,82	Margono1	Luar Sungai Lama
4	TP4	03°18'24,9" LS 105°45'54,5" BT	4,83	Margono1	Luar Sungai Lama
5	TP5	03°18'24,3" LS 105°45'54,9" BT	4,69	Margono1	Sungai Lama
6	TP6	03°18'24,1" LS 105°45'54,8" BT	4,72	Margono1	Sungai Lama
7	TP7	03°18'24,1" LS 105°45'55,1" BT	4,62	Margono1	Sungai Lama
8	TP8	03°18'24,1" LS 105°45'55,3" BT	4,57	Margono1	Sungai Lama
9	TP9	03°18'23,8" LS 105°45'54,8" BT	4,76	Sophia	Pinggir Sungai lama
10	TP10	03°18'23,8" LS 105°45'54,7" BT	4,79	Sophia	Pinggir Sungai lama
11	TP11	03°18'26,1" LS 105°45'56,4" BT	4,18	Margono2	Sungai Lama
12	TP12	03°18'25,7" LS 105°45'56,1" BT	4,28	Margono2	Sungai Lama
13	TP13	03°18'25,4" LS 105°45'56,3" BT	4,24	Margono2	Sungai Lama
14	TP14	03°18'26,1" LS 105°45'55,9" BT	4,38	Margono2	Luar Sungai Lama

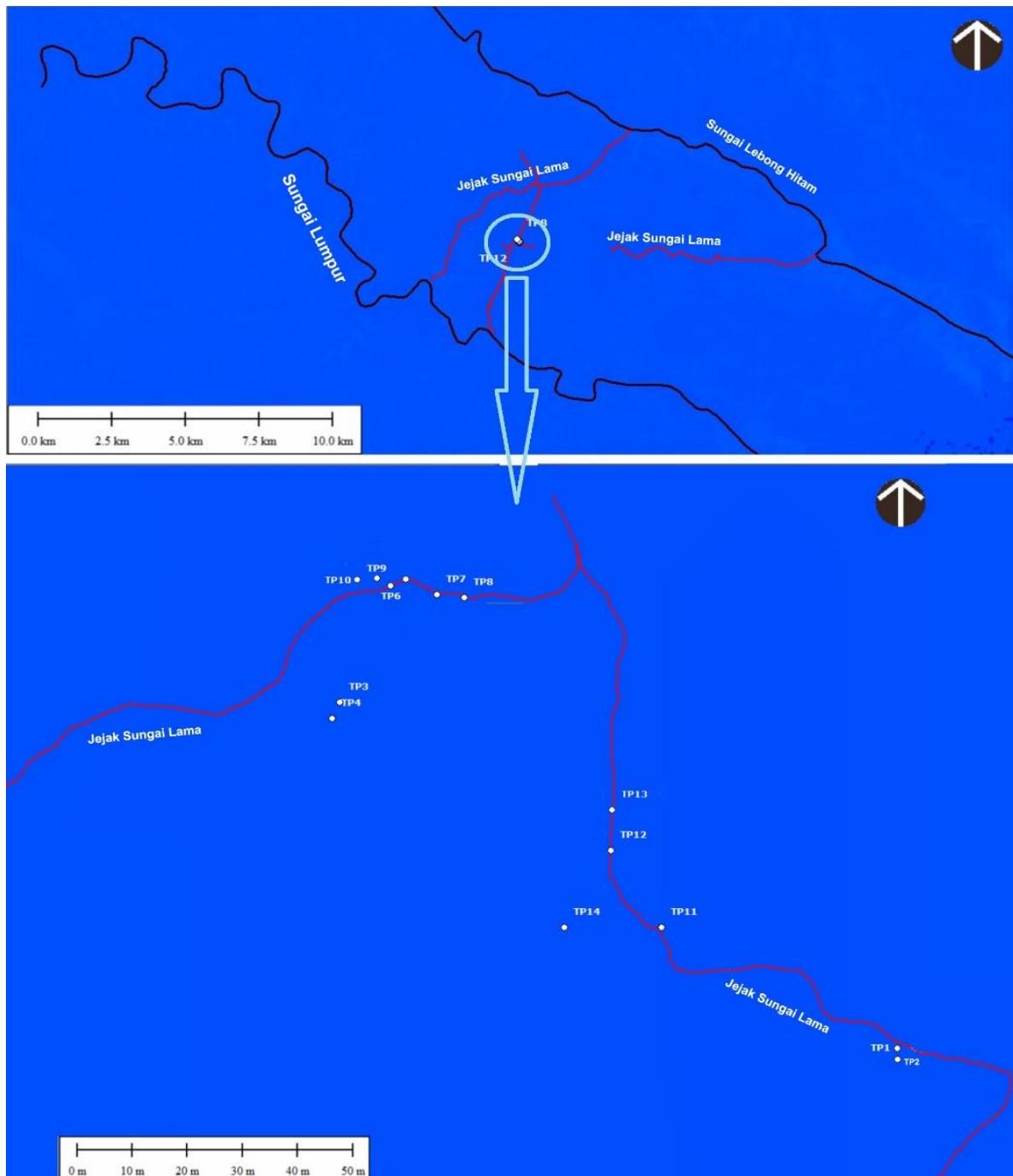
Sumber: Intan, 2018

Lampiran 2. Tabel keletakan Geografis Sektor-Sektor Simpang Tiga Abadi, Kec. Tulung Selapan, Kab. Ogan Komering Ilir (OKI)

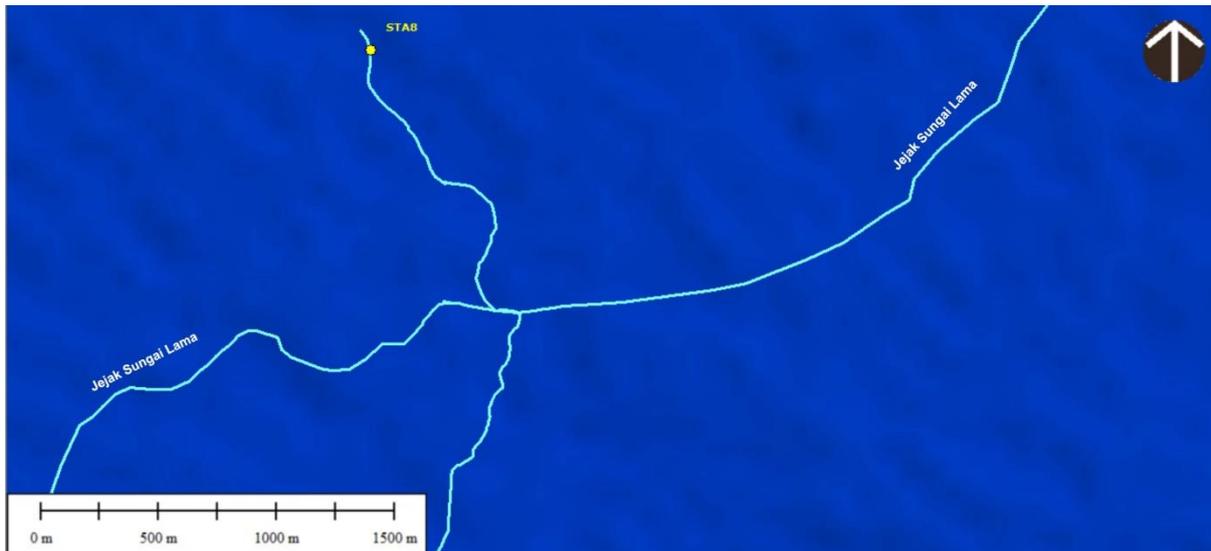
NO	SEKTOR	LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR	KETINGGIAN MDPL	TEMUAN
1	STA-2	3°18'22,0"	105°45'56,2"	4,76	tulang paha (<i>humerus</i>), fragmen tembikar, fragmen keramik
2	STA-3	3°18'21,2"	105°45'56,3"	4,94	fragmen tembikar, dan fragmen keramik
3	STA-4	3°18'26,4"	105°45'56,8"	4,15	sisa perahu, fragmen tembikar dan fragmen keramik
4	STA-5	3°18'26,6"	105°45'57,4"	4,13	tiang-tiang kayu (batang pohon) yang pernah dimanfaatkan sebagai tiang bangunan
5	STA-6	3°18'44,6"	105°49'38,5"	6,63	fragmen keramik dan botol Belanda
6	STA-7	2°18'26,9"	105°45'26,9"	4,76	sisa perahu, kemudi, fragmen tembikar, fragmen keramik, dan fragmen tulang
7	STA-8	3°16'48,8"	105°46'00,9"	5,13	empat tiang nibung, beberapa tiang nibung lainnya sudah tercabut bersama fragmen tembikar akibat pembuatan saluran tersebut
8	STA-9	3°18'51,1"	105°45'42,4"	5,87	tiang-tiang nibung (ujungnya runcing) baik yang masih tertanam di saluran sekunder maupun yang telah tercabut dari sungai lama
9	STA-10	3°19'35,8"	105°45'26,9"	4,20	tiang-tiang nibung (ujungnya runcing) yang telah tercabut dari sungai lama, dan fragmen tembikar

Sumber: Intan, 2018

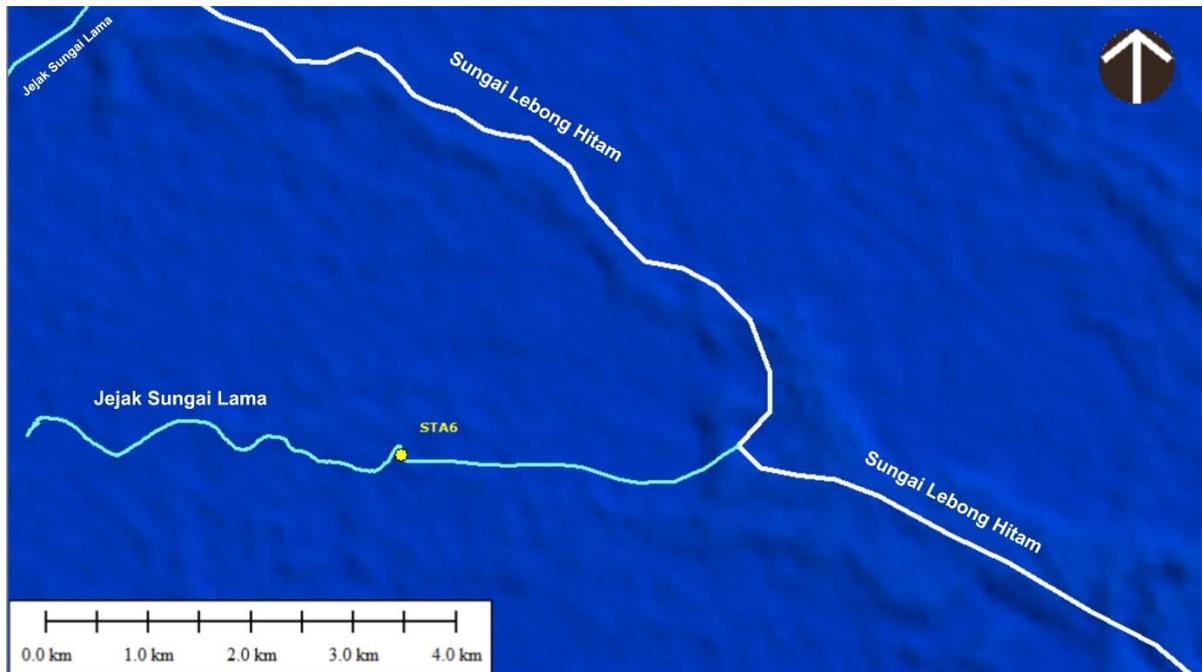
Lampiran 3. Gambar peta keletakan TP1 hingga TP14 di sungai lama yang berada diantara Sungai Lebong Hitam dan Sungai Lumpur (Sumber: Intan 2018)



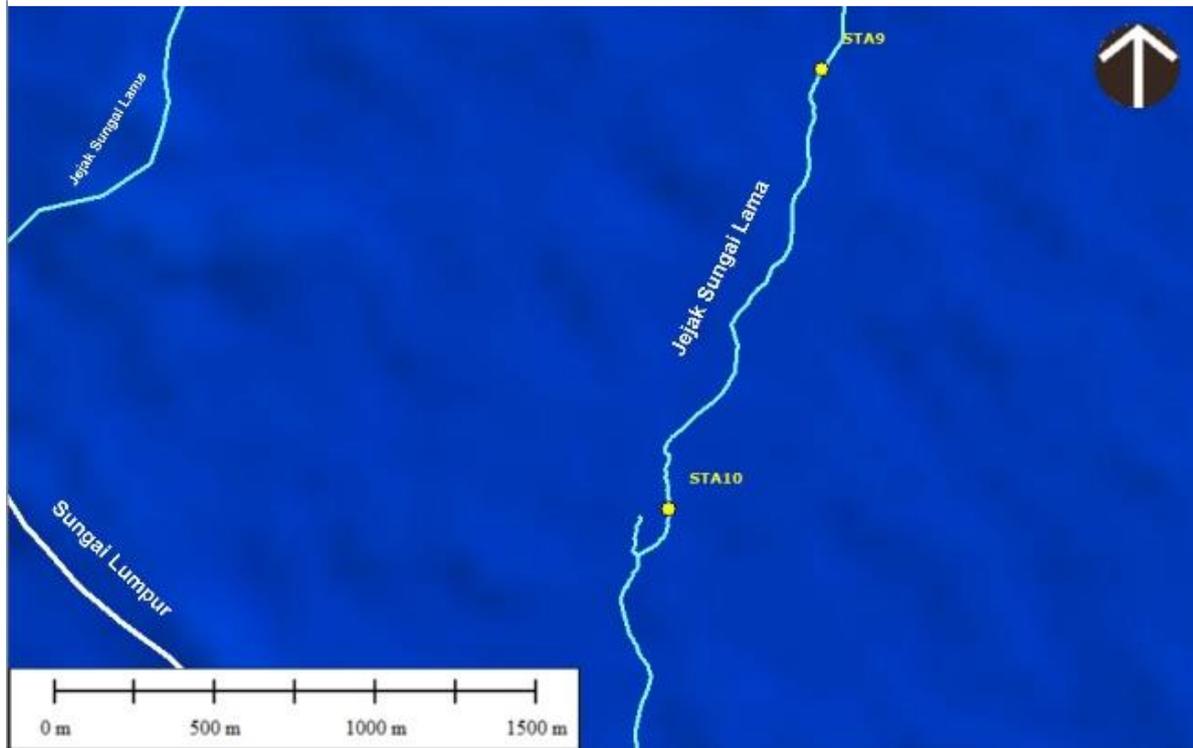
Lampiran 4. Gambar peta Keletakan STA8 di sungai lama (Sumber: Intan 2018)



Lampiran 5. Gambar peta keletakan STA6 di sungai lama (Sumber: Intan 2018)



Lampiran 6. Gambar peta keletakan STA9 dan STA10 di sungai lama (Sumber: Intan 2018)





TATA KOTA PAREPARE PERIODE KOLONIAL BELANDA

Urban Planning of Parepare Dutch Colonial Period

Muhajir¹, Muhammad Nur²

¹Peneliti freelance

Yayasan Sulisa Matra Bangsa, Makassar, Indonesia
muhajir015@gmail.com

²Departemen Arkeologi, Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan, Km. 10, Makassar, Indonesia
mnur@unhas.ac.id

Naskah diterima: 10/05/2019; direvisi: 17/05-01/07/2019; disetujui: 04/07/2019

Publikasi ejurnal: 30/06/2019

Abstract

The focus of this research is the port city of Parepare in the Dutch Colonial period. The problem posed is how the form of urban planning and the factors that influence the form of the city of Parepare in the Dutch Colonial period. The method used is the determination of the dimensions of Colonial buildings based on inscriptions, texts and interviews. Mapping of building layout and road network as well as analysis of building functions, urban space organizations, and analysis of the factors forming city spatial planning are also carried out. The results of the study indicate that the city planning of Parepare consists of three zones. The first zone is the core of the city occupied by the Dutch government as the center of government. The second zone is the Chinatown area, intended for economic activities. The third zone is for indigenous settlements. The shape of the city extends from north to south following the coastline. The road network in the city center has a grid pattern. The dominant factor affecting the shape of the city of Parepare is geo-political and security factors, to maintain the conduciveness of the western coastal region of South Sulawesi.

Keyword: Parepare, afdeling, urban planning, grid, Dutch.

Abstrak

Fokus penelitian ini adalah Kota pelabuhan Parepare pada periode Kolonial Belanda. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana bentuk tata kota dan faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk tata kota Parepare pada periode Kolonial Belanda. Metode yang digunakan adalah penentuan dimensi bangunan Kolonial berdasarkan prasasti, naskah dan hasil wawancara. Pemetaan tata letak bangunan dan jaringan jalan serta analisis fungsi bangunan, organisasi ruang kota, dan analisis faktor pembentuk tata ruang kota juga dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kota Parepare terdiri dari tiga zona. Zona pertama merupakan inti kota ditempati oleh pemerintah Belanda sebagai pusat pemerintahan. Zona kedua adalah kawasan pecinan, diperuntukkan untuk kegiatan perekonomian. Zona ketiga diperuntukkan untuk pemukiman pribumi. Bentuk kota memanjang dari utara ke selatan mengikuti garis pantai. Jaringan jalan pada pusat kota berpola grid. Faktor yang dominan mempengaruhi bentuk kota Parepare adalah faktor geo-politik dan keamanan, untuk menjaga kondusifnya wilayah pesisir barat Sulawesi Selatan.

Kata Kunci: Parepare, afdeling, tata kota, grid, Belanda.

PENDAHULUAN

Paling tidak, ada tujuh penelitian tentang tata kota periode Kolonial Belanda di Sulawesi Selatan sehingga fase perkembangan dan format beberapa kota pada periode tersebut memiliki gambaran.

Tentang Kota Makassar, penelitian Syahrudin Mansyur (2002) berhasil mengungkap pertumbuhan Kota Makassar pada Akhir Abad XVII hingga Awal abad XX yang dibaginya menjadi tiga fase. Pertumbuhan keruangan Kota Makassar

masa Kolonial tersebut sangat dipengaruhi oleh situasi politik, keamanan dan kehidupan sosial masyarakat (Mansyur, 2002). Penelitian Irfan Mahmud (2003) tentang Struktur Kota Palopo Abad XVII – XIX juga berhasil menjelaskan bahwa sejak masa pendudukan Belanda pada tahun 1920, terjadi pertumbuhan struktur kota secara signifikan dengan dibangunnya pasar dan rumah jabatan pada alun-alun istana kerajaan. Selain itu, istana kerajaan yang terbuat dari kayu dirombak dan digantikan dengan bangunan berarsitektur Eropa. Di sisi barat istana didirikan sekolah, asrama militer, rumah sakit dan gereja. Di bagian timur dibangun pelabuhan dan beberapa gudang. Data tersebut menggambarkan bahwa perubahan wajah Kota Palopo disebabkan oleh kebijakan pemerintah Belanda (Mahmud, 2003).

Basran juga berhasil mengungkap Struktur Kota Jeneponto Lama Tahun 1906-1945. Peran Pemerintah Belanda sangat besar dalam penciptaan pola keruangan kota Jeneponto Lama yang terlihat pada bagian pusat kota yang didominasi oleh bangunan-bangunan Kolonial yang difungsikan sebagai ruang pemerintahan dan pemukiman Belanda. Di bagian luar pusat kota terdapat pasar dan kios-kios pertokoan komunitas China. Di zona lain, terdapat kampung-kampung (Kassi-kassi, Tarrusang, Bontobonto, Tamarunang dan Tanru Sampe) yang masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan, petani dan penambang pasir (Burhan, 2010). Sedangkan di Kota Watampone, pertumbuhan kotanya terbagi menjadi tiga periode perkembangan sejak Periode Pemerintahan La Pawawoi Karaeng Segeri sampai Periode Pemerintahan La Mappanyukki (Nurfajriyani, 2007).

Sebagai kota *Onderafdeling*, Kota Maros juga mengalami pertumbuhan dari periode Islam sampai periode Kolonial. Hasil penelitian Muhammad Nur dan Hasanuddin menjelaskan bahwa pertumbuhan kota Maros dimulai dari tata kota Islam Kassikebo, kemudian tata kota

kolonial Belanda dan kota Maros pada periode Jepang. Sebelum kota Kolonial Belanda di wilayah Turikale, pusat kota Maros berada di wilayah Kassikebo yang dicirikan oleh sebuah sistem tata kota Islam yang teosentrik dengan keletakan masjid Kassikebo di tengah pemukiman (Mulyadi & Nur, 2017; Nur & Hasanuddin, 2014, 2017). Di Selayar, tata ruang kota periode Kolonial telah terencana dengan baik, ditunjukkan oleh pola sebaran pemukiman dan jalan yang memanjang dari utara ke selatan, mengikuti morfologi bentang lahan dan arah garis pantai. Pembagian fungsi ruang yang letaknya saling berdekatan telah memudahkan mobilitas masyarakatnya (Lendrawati, 2010). Penelitian terakhir dilakukan oleh Muhajir tentang Tata Kota Parepare Pada Masa Kolonial Belanda juga menghasilkan beberapa kesimpulan tentang unsur pembentuk dan tata kota Parepare. Artikel ini merupakan pengembangan dari skripsi Muhajir pada aspek keruangan dan komponen kota seperti pelabuhan, rumah sakit, sarana pendidikan dan makam (Muhajir, 2017).

Penelitian yang telah dilakukan tentang kota telah memberikan gambaran bahwa penataan kota-kota periode Kolonial di Sulawesi Selatan tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Belanda yang mempertimbangkan bentang alam, situasi politik, topografi dan kondisi sosial masyarakat (Burhan, 2010; Lendrawati, 2010, p. 2; Mahmud, 2003, p. 65; Mansyur, 2002, p. 3; Mulyadi & Nur, 2017; Nur & Hasanuddin, 2014, 2017; Nurfajriyani, 2007, p. 3) Walaupun demikian, hasil penelitian di atas belum dapat dianggap mewakili penjelasan menyeluruh tentang kota-kota di Sulawesi Selatan pada periode Kolonial, baik yang berstatus *afdeling* maupun *onderafdeling*. Untuk menambah pemahaman kita tentang dinamika pertumbuhan kota periode Kolonial di Sulawesi Selatan, penelitian ini akan difokuskan pada Kota Parepare yang menyandang status sebagai kota *afdeling*

sejak tahun 1911 (Poelinggomang, 2004, pp. 83–84) yang juga merupakan kota pelabuhan. Adapun detail permasalahan yang diajukan adalah bagaimana desain kota Parepare pada periode Kolonial Belanda sebagai bagian terintegrasi dalam sistem kota kolonial Belanda di Pulau Sulawesi. Penelitian ini akan memberi kontribusi dalam penemuan bentuk Kota Kolonial Parepare dan akan memperkaya kajian arkeologi kota periode Kolonial di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini diawali dengan pengumpulan referensi mengenai sejarah Kota Parepare berupa naskah, peta, foto bangunan dan beberapa hasil penelitian sejarah dan arkeologi di perpustakaan, internet, BPCB Makassar dan Badan Arsip Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Setelah itu dilakukan pengumpulan data komponen kota seperti bangunan, sarana jalan, lapangan dan fitur-fitur sejarah di Kota Parepare. Pada tahap pengumpulan data ini, juga dilakukan wawancara. Dalam penentuan komponen kota Parepare periode Kolonial, dilakukan verifikasi data dengan cara setiap komponen kota harus terkonfirmasi oleh data wawancara, naskah, foto atau kesimpulan penelitian sebelumnya. Data komponen kota yang telah diperoleh baik data pustaka maupun data bangunan dikategorikan berdasarkan fungsi untuk melihat hubungan fungsionalnya. Selanjutnya dilakukan pembuatan peta keletakan lokasi bangunan menggunakan software Arcgis untuk melihat lokasi bangunan dengan mengacu pada peta tahun 1929 dan photo udara tentara Sekutu yang dirangkum dalam “Special Report Allied Geographical Section SWPA Special Report no. 80, Makassar SW Celebes Dates 24 Aug 1945” (“Makassar SW Celebes Dates 24 Aug. 1945,” 1945). Setelah itu dilakukan analisis morfologi kota dan analisis keruangan. Analisis morfologi kota digunakan untuk mengetahui komponen

pembentuk ruang kota dan bentuk kota Parepare pada periode Kolonial Belanda. Selanjutnya analisis keruangan untuk mengetahui pembagian dan pemanfaatan ruang di Kota Parepare. Analisis lingkungan digunakan untuk melihat pengaruh lingkungan terhadap ruang perkotaan. Data lingkungan yang telah didapatkan akan digunakan untuk mengkonfirmasi keterkaitan antar temuan. Hasil dari analisis lingkungan adalah tingkat pengaruh lingkungan terhadap tata ruang Kota Parepare. Tahapan metodologis terakhir adalah generealisasi, tahap pencarian gejala umum tentang komponen kota yang membentuk morfologi Kota Parepare periode Kolonial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Parepare: Aspek Geografi dan Sejarah

Kota Parepare berada di bagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan dan menempati posisi silang jalur transportasi darat utara-selatan dan timur-barat. Selain itu, Kota Parepare juga berada di pesisir Selat Makassar yang memisahkan Pulau Sulawesi dan pulau Kalimantan sehingga arus lalu lintas antar pulau menjadi salah satu layanan sarana transportasi di kota ini. Secara geografis Kota Parepare terletak di antara 30° 57' 39" – 40° 04' 49" Lintang Selatan dan 119° 36' 24" – 119° 34' 40" Bujur Timur. Kota Parepare berbatasan dengan Kabupaten Pinrang di sebelah utara, Kab. Barru di sebelah selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang di sebelah timur, dan Selat Makassar di sebelah barat. Secara keseluruhan luas wilayah Kota Parepare sebesar 99,33 km² atau hanya sekitar 0,21 % dari total luas daratan Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Parepare terdiri dari empat kecamatan dan 22 kelurahan. Jumlah penduduk Kota Parepare pada tahun 2014 berjumlah 136.903 jiwa (*Statistik Daerah Kota Parepare Tahun 2015*, 2015).

Topografi Kota Parepare memiliki permukaan yang bervariasi, terdiri dari 85%

wilayah perbukitan, bergelombang dan bergunung serta sekitar 15% dengan topografi datar yang berada di bagian barat yang berbatasan dengan pesisir Selat Makassar dan merupakan pusat kegiatan penduduk kota. Sedangkan wilayah perbukitan berada di bagian timur dengan puncak ketinggian 500 meter di atas permukaan laut dan di bagian selatan terdapat aliran Sungai Sumpang Minangae (*Statistik Daerah Kota Parepare Tahun 2015, 2015*).

Pada awal abad ke-20, Kota Parepare merupakan bagian dari pemerintah Hindia Belanda. Penandatanganan pernyataan pendek (*Korte Verklaring*) oleh *Tu'mailalang Towa* dan anggota Dewan *Bate Salapang* menandai periode itu. Pada tahun 1906 Sulawesi Selatan secara keseluruhan berada langsung di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda (Poelinggomang, 2004, p. 83). Setelah penandatanganan perjanjian tersebut, wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara dijadikan satu wilayah pemerintahan yang dikenal dengan Pemerintahan Sulawesi Selatan dan Daerah Bawahan (*Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden*). Wilayah itu kemudian

dibagi ke dalam tujuh bagian pemerintahan (*afdeling*) yaitu Makassar, Bonthain, Bone, Parepare, Luwu, Mandar dan Buton serta Pesisir Timur Sulawesi (*Boeton en Oostkust Celebes*) yang secara resmi berlaku pada tahun 1911 (Poelinggomang, 2004, pp. 83–84). Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Belanda yaitu H.N.A. Swart pada tanggal 31 Desember 1906 pemerintah Hindia Belanda membagi wilayah administratif di Sulawesi Selatan dan daerah taklukan menjadi tujuh bagian wilayah pemerintahan *afdeling*, salah satunya yaitu wilayah *afdeling* Parepare (Poelinggomang, 2004, p. 12).

Dijadikannya Parepare menjadi sebuah wilayah *afdeling*, maka wilayah Parepare kemudian menjadi pusat pemerintahan untuk wilayah-wilayah bawahannya dan dikepalai oleh seorang Asisten Residen (*Assisten Resident*) sebagai pemimpin pemerintahan untuk wilayah *afdeling* dan seorang kontrolir (*controleur*) sebagai pemimpin cabang pemerintahan atau yang disebut *onderafdeling* (Poelinggomang, 2004, p. 15). Wilayah pemerintahan Sulawesi Selatan dan daerah bawahannya, secara politik dikategorikan dalam tiga bentuk. Pertama adalah daerah yang berada

Tabel 1. Data komponen kota Makassar dan fungsinya yang masih dapat dijumpai sekarang.

No.	Nama Bangunan	Fungsi Bangunan	Kelurahan
1.	Kantor Kontrolir	Pemerintahan dan Keamanan	Ujung Sabbang
2.	Kantor Tentara Belanda	Pemerintahan dan Pertahanan	Ujung Sabbang
3.	Kantor Kejaksaan	Pemerintahan dan Keamanan	Ujung Sabbang
4.	Tangsi Militer 1 dan 2	Tempat Tinggal dan Keamanan	Ujung Sabbang
5.	Sekolah China	Pendidikan	Ujung Sabbang
6.	Rumah Kodok (Queenshead) 1-7	Tempat tinggal	Ujung Sabbang
7.	Sumur 1 & 2	Tempat Penampungan	Ujung Sabbang
8.	Hotel Siswa	Tempat tinggal	Ujung Sabbang
9.	Bioskop	Hiburan	Ujung Sabbang
10.	Pecinan	Tempat tinggal dan perdagangan	Ujung Sabbang
11.	Penjara	Pemerintahan dan Keamanan	Ujung Bulu
12.	Rumah Sakit	Kesehatan	Ujung Bulu
13.	Rumah Dinas Kontrolir	Tempat tinggal	Ujung Bulu
14.	Tangki air	Tempat Penampungan	Ujung Bulu
15.	Penampungan Bahan Bakar	Tempat Penampungan	Ujung Bulu
16.	Dermaga Belanda	Pelabuhan	Mallusetasi
17.	Rumah Jabatan Danrem	Tempat tinggal	Mallusetasi
18.	Gudang Amunisi	Pemerintahan dan keamanan	Cappa Galung

dalam kekuasaan langsung. Wilayah-wilayah yang termasuk di dalamnya yaitu Distrik Makassar, distrik-distrik bagian utara yang meliputi daerah Maros, Pangkajene serta di bagian selatan yaitu Distrik Bantaeng, Bulukumba dan Selayar. Kedua adalah daerah kekuasaan yang tidak diperintah secara langsung, wilayah ini

disebut “kerajaan pinjaman”. Pelaksanaan pemerintahan di kerajaan-kerajaan yang dikuasai langsung itu dipinjamkan kepada penguasa lokal. Kerajaan-kerajaan tersebut yaitu Kerajaan Tallo, Tanete, Parepare, Wajo dan Bone. Ketiga yaitu kerajaan sekutu yang dimana kerajaan ini dipandang merdeka dan berdaulat, namun menempatkan penguasa



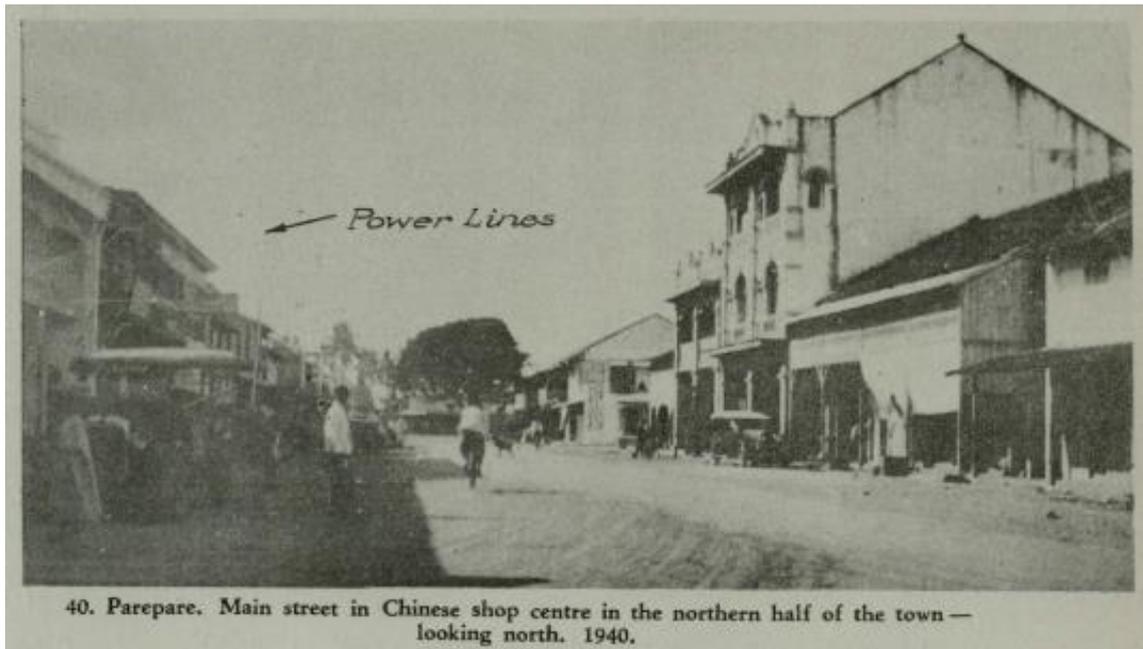
Gambar 1. Beberapa bangunan kolonial dari kota Parepare. Bangunan Rumah Dinas Kontrolir, tampak dari arah barat (A). Bangunan Kantor Kejaksaan tampak dari arah barat (B). Kantor tentara Belanda, tampak dari arah utara (C). Bangunan bekas Kantor Kontrolir (sekarang Kantor AJENREM 142), tampak dari arah barat (D). Bangunan Tangsi Militer 2, tampak dari arah selatan (E). Bangunan Gudang Amunisi, tampak dari arah timur (F) (Sumber: Dokumentasi Muhajir, 2017).



Gambar 2. Beberapa bukti bangunan lain. Bangunan rumah Jabatan Danrem, tampak dari arah barat (A). Bangunan rumah Kodok 3, tampak dari arah barat (B). Bangunan Rumah Kodok 5, tampak dari arah selatan (C). Bangunan Rumah Kodok 6, tampak dari arah utara (D). Sekolah China, tampak dari arah selatan (F). Bangunan Gereja Immanuel, tampak dari arah selatan (G) dan Prasastinya (H)(Sumber: Dokumentasi Muhajir, 2017).

kolonial sebagai pelindung dan perantara. Pengakuan kedudukan pihak pemerintah

kolonial itu memberikan kekuatan bagi pemerintah Kolonial Belanda sebagai posisi



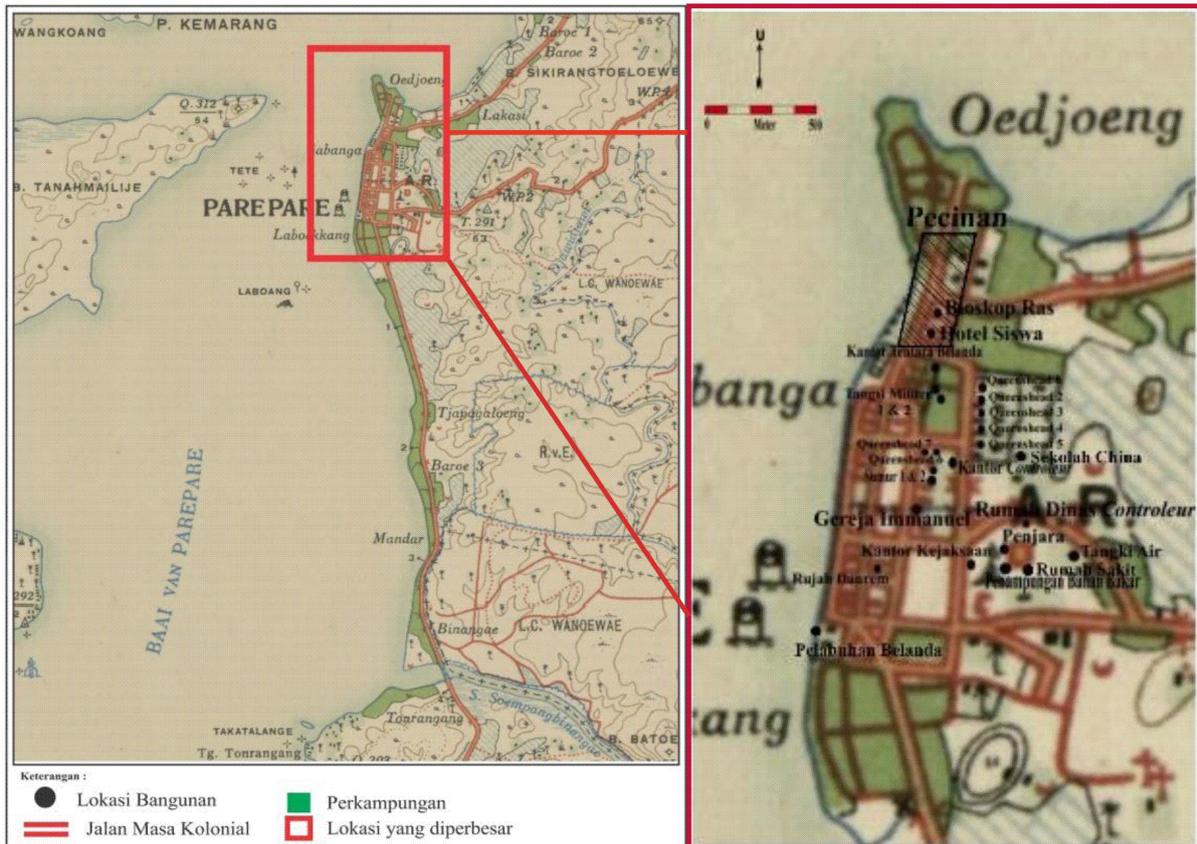
Gambar 3. Hotel Siswa yang berlantai tiga dan Kawasan Pecinan pada tahun 1940. Kawasan ini masih ada hingga sekarang (**Sumber:** Special Report No. 80, Makassar SW Celebes Dates 24 Aug 1945).



Gambar 4. Penampungan bahan bakar (**Sumber:** Dokumentasi Muhajir, 2017)

pelindung terhadap kerajaan-kerajaan sekutu. Wilayah tersebut yaitu Gowa, Soppeng, Luwu, Barru, Toraja dan kerajaan-kerajaan kelompok Ajatapparang, kerajaan di Mandar, kerajaan kelompok Mallusetasi (Soreang, Bojo, Nepo dan Palanro) (Poelinggomang & Mappangara, 2005, p. 16).

Wilayah *afdeling* Parepare berdasarkan Surat No. 476 Tahun 1917 mengatur wilayah *afdeling* Parepare dengan menempatkan pusat pemerintahan Belanda di kota ini yang membawahi lima wilayah pemerintahan *onderafdeling* dan dipimpin oleh seorang kontrolir (*controleur*). Di samping adanya pemimpin dari pemerintah



Gambar 5. Sebaran bangunan dan jaringan jalan Kota Parepare 1929 (Sumber: http://mediakitlv.nl/allmedia/indeling/detail/form/advanced/start/21?q_searchfiled=parepare, Dimodifikasi ulang oleh Muhajir, 2017)

Hindia Belanda, struktur pemerintahan di Kota Parepare juga dibantu oleh aparat pemerintah Raja-Raja Bugis, yaitu *Arung Barru* di Barru, *Addatuang Sidenreng* di Sidenreng Rappang, *Arung Enrekang* di Enrekang, *Addatuang Sawitto* di Pinrang sedangkan di Parepare sendiri berkududukan *Arung Mallusetasi* sebagai pejabat pribumi (Poelinggomang & Mappangara, 2005, p. 17). Lima wilayah *afdeling* Parepare adalah *onderafdeling* Parepare, *onderafdeling* Pinrang, *onderafdeling* Sidenreng Rappang, *onderafdeling* Barru dan *onderafdeling* Enrekang.

2. Komponen Kota Parepare

Komponen kota yang kami maksudkan dalam artikel ini adalah bangunan, fitur dan fasilitas jalan yang ditentukan berdasarkan hasil konfirmasi data sejarah, artefak dan hasil wawancara. Data

komponen Kota Makassar beserta fungsinya yang masih dapat dijumpai sekarang (Tabel 1, gambar 1, 2, 3 dan 4).

Konsentrasi bangunan berada di Kelurahan Ujung Sabbang yang menjadi pusat aktivitas Pemerintah Belanda (gambar 5). Inggiran jaringan jalan pusat Kota Parepare periode Kolonial dan masih seperti itu ketika penelitian ini dilakukan. Jaringan jalan periode Kolonial Parepare tahun 1929 tampak didesain berpola grid dengan tiga jalur jalan keluar kota, masing-masing ke Pinrang, Sidenreng dan Barru. Dari jaringan jalan, jelas tergambar bahwa akses darat untuk melintasi Kota Kolonial Parepare dari segala arah harus melewati jantung Kota Parepare. Jaringan jalan juga menunjukkan bahwa tidak ada blok jalan dan persimpangan jalan pada areal pemukiman pribumi. Pemukiman tampak hanya memanjang mengikuti alur jalan.

3. Diskusi: Bentuk Kota Parepare

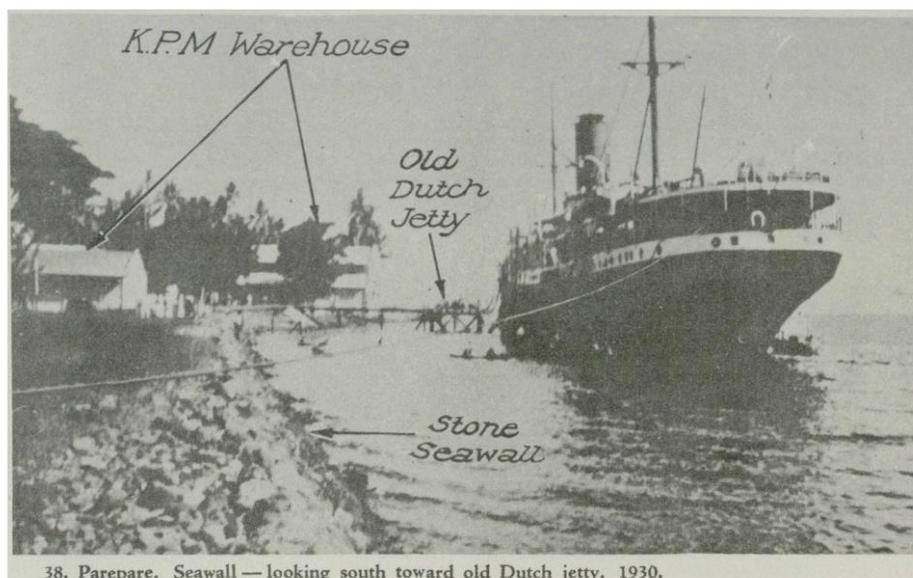
Pusat Kota Parepare periode Kolonial berada di Teluk Parepare. Berdasarkan sensus tahun 1930, Kota Parepare berpenduduk 6.263, terdiri dari 5.599 penduduk pribumi, 125 orang Eropa, 385 orang China, dan 164 pendatang dari Asia. Sebelum Jepang menguasai, Kota Parepare dikenal sebagai kota pelabuhan yang mengeksport komoditas seperti beras, jagung, ikan kering dan kopra (“Makassar SW Celebes Dates 24 Aug. 1945,” 1945). Berdasarkan peranannya sebagai kota pelabuhan (gambar 6), diskusi tentang Kota Parepare dalam artikel ini akan memberikan gambaran berbeda dibandingkan kota-kota lain di Sulawesi Selatan pada periode Kolonial Belanda.

Dari kajian fungsi dan keletakan bangunan, tata Kota Parepare periode Kolonial Belanda dibedakan menjadi tiga kategori ruang kota, pertama adalah zona inti kota, merupakan daerah pusat kegiatan yang dihuni oleh para penguasa dalam hal ini pemerintah Kolonial Belanda. Kedua adalah zona bagian luar dari inti kota, didiami oleh komunitas pedagang yang umumnya China,

dan yang ketiga adalah zona pemukiman pribumi (gambar 5).

Zona inti kota dicirikan oleh konsentrasi bangunan Kolonial di kawasan sekitar Kelurahan Ujung Sabbang dan Ujung Bulu. Sejumlah bangunan vital seperti bangunan kantor kontrolir, kantor tentara Belanda, kantor kejaksaan dan bangunan penjara yang difungsikan sebagai aktivitas pemerintahan dan keamanan berada di dua kelurahan ini. Selain itu, juga terdapat beberapa rumah tinggal prajurit Belanda dan tangsi militer yang difungsikan sebagai tempat tinggal pasukan Belanda. Fasilitas lain di kawasan inti kota adalah dermaga Belanda yang telah ada pada tahun 1930, dan masjid, pasar, pabrik penggilingan padi juga tampak dalam photo udara Tentara Sekutu pada tahun 1944 (“Makassar SW Celebes Dates 24 Aug. 1945,” 1945).

Di bagian tenggara dari bangunan-bangunan yang telah disebutkan di atas, didirikan bangunan Rumah Sakit dan kediaman kontrolir. Rumah kontrolir berada pada ketinggian 14 mdpl atau lokasinya yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan bangunan lain agar segala aktivitas anggotanya dapat dipantau dan diawasi



Gambar 6. Kapal yang bersandar di pelabuhan Belanda Parepare tahun 1930 (Sumber: Special Report No. 80, Makassar SW Celebes Dates 24 Aug 1945).

dengan baik. Selain itu, di wilayah ini juga dibangun fasilitas keagamaan seperti gereja dan fasilitas pendidikan seperti sekolah China. Makam para bangsawan (Kompleks Makam Datu Lacincing) juga terletak di zona inti kota, menunjukkan bahwa kompleks makam ini merupakan lokasi yang memang sudah ada ketika kota Kolonial Parepare didesain. Dalam kasus Sulaesi Selatan, kompleks makam raja memang selalu berada di tengah pemukiman Belanda karena keberadaannya memang sudah ada sebelum suatu kota kolonial didesain dan menjadi identitas dari kerajaan tersebut (Nur, 2018).

Berdasarkan studi pustaka yang penulis dilakukan bahwa di Kelurahan Mallusetasi sekarang (masih dalam kawasan inti kota Parepare), dibangun beberapa sekolah di antaranya HIS (*Holland Indische School*), HCS (*Holland Chineesche School*), *Vervolg School*, *Volks School* dan *Europese Lagere School*. Bangunan-bangunan sekolah tersebut diperuntukkan untuk anak-anak yang berkebangsaan Belanda. Namun, dari hasil observasi lapangan yang penulis lakukan, semua bangunan sekolah tersebut telah dibongkar dan digantikan dengan bangunan baru. Satu-satunya sekolah periode Kolonial yang masih bertahan hingga sekarang adalah Sekolah China yang terletak di jalan Pettanarajeng (sekarang dijadikan areal perkantoran Dinas pendidikan Nasional Kota Parepare).

Di zona kedua, pada bagian luar dari inti kota ditempati oleh bangunan yang diperuntukkan untuk kegiatan ekonomi seperti pasar. Dari hasil observasi lapangan di Kota Parepare tidak ditemukan pasar yang telah ada pada masa pra-Kolonial maupun masa Kolonial. Namun dari hasil wawancara dengan bapak Rafael bahwa di jalan Baso Dg. Panompo dan jalan Sulawesi sekarang merupakan kawasan pecinan yang dihuni orang-orang China yang sebagian dari mereka merupakan pedagang yang menjual berbagai keperluan sehari-hari. Informasi tersebut sesuai dengan photo yang dicantumkan Tentara Sekutu dalam

laporannya (“Makassar SW Celebes Dates 24 Aug. 1945,” 1945). Di Kota Parepare, kegiatan perekonomian berupa kios-kios pertokoan dan warung-warung kopi didominasi oleh orang-orang China. Selain itu, di zona ini terdapat bioskop dan hotel yang juga digunakan sebagai aktivitas perekonomian.

Seperti kota lain di Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan kota-kota Kolonial tidak terlepas dari peranan orang-orang China. Berdasarkan hasil kajiannya, Handinoto menyatakan bahwa dalam tata ruang kota khususnya kota Kolonial di Indonesia, daerah pecinan sering menjadi pusat perkembangan karena daerah tersebut merupakan daerah perdagangan yang ramai. Orang-orang China juga berperan sebagai pedagang perantara dan pedagang eceran. Karena alasan ini pula daerah pecinan sering terletak di antara daerah orang pribumi dan daerah orang Eropa (*Europeesche Wijk*). Secara strategis, kawasan pecinan ini juga berfungsi sebagai daerah penyangga bagi daerah orang Eropa jika sewaktu-waktu terjadi perlawanan orang-orang pribumi terhadap orang-orang Belanda (Handinoto, 2012, p. 359). Hal ini terlihat pada Kota Parepare dimana zona kedua ditempati oleh toko-toko orang-orang China yang jelas menandakan areal aktivitas perekonomian. Keberadaan zona perdagangan di Kota Parepare juga sekaligus mencirikan kota ini sebagai kota perdagangan di wilayah Ajattappareng, mengingat lalu lintas barang dan manusia yang melewati Kota Parepare memiliki intensitas tinggi, baik jalur darat maupun laut.

Zona pertama dan kedua merupakan daerah dengan akses jalan paling banyak. Jaringan jalan tersebut digunakan sebagai akses menuju ke wilayah lain untuk kelancaran aktivitas masyarakatnya. Selain itu, dibuat tiga jaringan jalan utama yang menuju ke wilayah Barru, Pinrang dan Sidrap untuk kelancaran mobilitas di kota-kota lainnya. Rute-rute transportasi dari segala penjuru memusat ke zona pertama

dan zona kedua yang merupakan zona dengan derajat aksesibilitas paling tinggi (lihat peta no. 3), zona ini juga disebut sebagai “*the area of dominance*” (Yunus, 2000, p. 7).

Di zona ketiga, ditempati oleh pemukiman penduduk yang berada di pinggiran pusat kota. Pemerintah Belanda menempatkan penduduk pribumi di luar zona inti kota agar segala aktivitas pemerintahan di pusat kota tidak terganggu. Pemukiman tersebut dihuni oleh penduduk pribumi dengan spesialisasi pekerjaan yang berbeda-beda. Di sebelah utara terdapat Kampung Ujung. Sesuai namanya, wilayah ini berada di paling ujung yang sekarang bernama Cappa Ujung. Dalam photo udara yang dibuat tentara Sekutu tahun 1944, Cappa Ujung merupakan lokasi pembuatan perahu. Di daerah ini, masyarakat bekerja sebagai nelayan dan terdapat pelabuhan yang menjadi tempat berlabuh kapal-kapal dari beberapa daerah terutama Samarinda di Kalimantan Timur. Di daerah ini juga terdapat Kampung Sabanga dan Lakasi (sekarang bernama Lakessi). Di sebelah selatan terdapat Kampung Laboekkang (sekarang bernama Labakkang). Di daerah ini masyarakatnya juga bekerja sebagai nelayan. Di daerah ini juga terdapat Kampung Tjappagaloeng (sekarang bernama Cappagalung). Di daerah ini masyarakatnya bekerja sebagai petani. Karena adanya penguasaan lahan oleh Pemerintah Kolonial di pusat kota yang digunakan sebagai pusat aktivitas pemerintahan maka penduduk pribumi berpindah ke wilayah sekitar kota atau pinggiran kota untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Secara spasial, zona-zona tersebut terbagi dalam ruang-ruang perkotaan. Berikut adalah peta pembagian zona di Kota Parepare pada periode Kolonial Belanda.

Berdasarkan peta pembagian zona di atas, maka terlihat bahwa zona pertama yang merupakan pusat kota ditempati oleh orang-orang Belanda sebagai pusat pemerintahan

dan keamanan. Hal ini terlihat dengan terdapatnya bangunan perkantoran, tangsi militer, tempat tinggal orang Belanda dan penjara. Di zona kedua merupakan aktivitas perekonomian yang ditempatkan di wilayah yang dekat dari pusat pemukiman orang-orang Belanda sebagai penunjang kebutuhan mereka. Sementara itu, di zona ketiga yang dihuni oleh penduduk pribumi ditempatkan di wilayah pinggiran kota agar aktivitas pemerintahan di pusat kota tidak terganggu.

Dari analisis peta ([gambar 7](#)) dan hasil observasi lapangan kemudian dibandingkan dengan peta pembagian zona pada periode Kolonial Belanda, maka terlihat bahwa di Kota Parepare sekarang tidak lagi memperlihatkan adanya pembagian zona seperti yang tergambar pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda. Pemukiman orang-orang Belanda di zona pertama pada masa lalu, telah berubah menjadi pemukiman orang-orang pribumi. Hal ini terlihat pada semua bangunan-bangunan Kolonial Belanda di Kota Parepare yang saat ini telah dihuni oleh penduduk pribumi. Peta tersebut juga menjelaskan bahwa Kota Parepare mengalami perkembangan dari periode Kolonial Belanda hingga sekarang.

Wilayah pusat Kota Parepare merupakan kekuatan utama untuk mengawasi perlawanan yang dilakukan oleh penduduk pribumi. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya bangunan perkantoran, tangsi militer dan kediaman para tentara Belanda. Wilayah ini juga merupakan tempat aktivitas keagamaan dan pendidikan yang ditandai dengan terdapatnya bangunan gereja dan sekolah. Sementara di Kelurahan Ujung Bulu merupakan wilayah pengamanan. Hal ini terlihat dengan terdapatnya bangunan penjara sebagai tempat tahanan para pemberontak.

Berdasarkan peta jaringan jalan, sebaran bangunan Kolonial, kawasan perdagangan dan kawasan pemukiman pribumi, tergambar jelas bahwa format Kota Parepare sangat dipengaruhi oleh



Gambar 7. Peta jaringan jalan dan sebaran bangunan Kolonial Belanda di Kota Parepare (Sumber: Dokumentasi Muhajir, 2017).

pertimbangan keamanan, baik keamanan jantung Kota Parepare sendiri maupun keamanan Kota Makassar sebagai pusat pemerintahan di Sulawesi Selatan dan Tenggara.

Berdasarkan peta sebaran bangunan dan jaringan jalan, terlihat bahwa jaringan jalan di Kota Parepare pada periode Kolonial Belanda berpola grid (papan catur) yang memanjang dari utara ke selatan mengikuti garis pantai. Bagian pusat kota dibagi sedemikian rupa menjadi blok-blok. Ruang-ruang perkotaan dihubungkan oleh jaringan jalan yang memanjang dari utara ke selatan, kemudian dipotong oleh beberapa ruas jalan pendek dari timur ke barat. Secara teoritik, hukum Indies (*law of the Indies*) yang merupakan kebijakan perancangan dan ideologi perencanaan kota di belahan bumi

barat, dijalankan sedemikian rupa untuk menciptakan suatu kondisi keamanan yang stabil.

PENUTUP

Dalam lingkup Pemerintahan Kolonial Belanda di Sulawesi Selatan dan Tenggara, posisi Kota *Afdeling* Parepare sangat penting terutama dalam stabilitas keamanan di pesisir barat Sulawesi Selatan dan terutama di wilayah Ajattappareng. Untuk fungsi tersebut, Kota Parepare didesain sedemikian rupa. Dari peta jaringan jalan dan letak pusat kota, tergambar jelas bahwa stabilitas keamanan menjadi prioritas utama dengan mempertimbangkan aspek geografisnya sebagai kota pelabuhan yang berada di Teluk Parepare. Ada tiga jalan utama, masing-masing satu akses menuju ke

Barru di selatan, Pinrang di utara, dan Sidenreng timur. Ketiga jalan ini terakses ke jantung kota yang didesain dilengkapi dengan fasilitas militer.

Dalam lingkup Kota Parepare, diberlakukan model tiga kawasan yaitu kawasan inti yang dicirikan oleh fasilitas militer, jalan berpola bergrid, pasar dan pelabuhan, kawasan luar inti kota yang dicirikan oleh areal aktivitas ekonomi sehari-hari yang disebut sebagai kawasan pecinan, dan kawasan pinggiran kota yang didiami oleh penduduk pribumi. Format kota Parepare seperti ini sangat ideal untuk menyangga Makassar sebagai pusat pemerintahan Kolonial Belanda di Sulawesi Selatan dan Tenggara.

Ucapan Terima Kasih

Kami berterima kasih kepada ketua Prodi dan staf pengajar Arkeologi Unhas yang telah mendukung dan memberikan masukan dalam proses penulisan sehingga artikel ini dapat rampung. Juga kepada Iswadi, S.S., Staf Pegawai BPCB Sulawesi Selatan atas dukungan moril selama proses penulisan naskah. Tidak lupa kepada teman-teman yang terlibat dalam penelitian, diantaranya Fakhrun, S.S., Khaerun Ansari, S.S., Isbahuddin, S.S., Muhammad Ikram, S.S., dan Afdal Haris, S.S. Terimakasih pula kepada Jurnal Walennae yang telah berkenan menerbitkan naskah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan, B. (2010). *Struktur Kota Jeneponto Lama Tahun 1904-1942*. Universitas Hasanuddin.
- Handinoto. (2012). Lingkungan ‘Pecinan’ dalam Tata Ruang Kota di Jawa Pada Masa Kolonial. In *Arsitektur dan Kota-kota di Jawa pada Masa Kolonial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lendrawati. (2010). *Pemukiman Masa Kolonial di Kota Benteng Kabupaten Selayar*. Universitas Hasanuddin.
- Mahmud, M. I. (2003). *Kota Kuno Palopo, Dimensi Fisik, Sosial dan Kosmologi*. Makassar: Masagena Press.
- Makassar SW Celebes Dates 24 Aug. 1945. (1945). Retrieved November 20, 2016, from Special Report No. 80 website: http://mediakitlv.nl/allmedia/indeling/detail/form/advanced/start/21?q_searchfield=parepare
- Mansyur, S. (2002). *Perkembangan Kota Makassar Abad XVII-XIX, Kajian Arkeologi Ruang*. Universitas Hasanuddin.
- Muhajir. (2017). *Tata Kota Parepare pada Masa Kolonial Belanda*. Universitas Hasanuddin.
- Mulyadi, Y., & Nur, M. (2017). Ragam Hias pada Makam di Komplek Mesjid Makam Turikale di Maros Sulawesi Selatan. *Kalpataru*, 26(1), 27–36.
- Nur, M. (2018). Transformasi Bentuk Makam Raja-Raja Tanete dari Abad ke-17 hingga Abad ke-20. *Walennae*, 16(1), 55–68.

- Nur, M., & Hasanuddin. (2014). *Kota Maros Masa Kolonial*. Maros: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros.
- Nur, M., & Hasanuddin. (2017). Unsur budaya Prasejarah dan Tipo-kronologi Nisan di Kompleks Makam Mattakko, Maros, Sulawesi Selatan. *Arkeologi Papua*, 9(1), 59–70.
- Nurfajriyani. (2007). *Perkembangan Kota Watampone Periode Pemerintahan Lapawawoi Karaeng Sigeri Sampai Periode Pemerintahan Lamappanyukki*. Universitas Hasanuddin.
- Poelinggomang, E. L. (2004). *Sejarah Perjuangan Rakyat Sulawesi Selatan dari Periode Kolonial ke Kemerdekaan Tahun 1905-1960*. Makassar: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.
- Poelinggomang, E. L., & Mappangara, S. (2005). *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942*. Yogyakarta: Ombak.
- Statistik Daerah Kota Parepare Tahun 2015*. (2015). Pare-pare: Badan Pusat Statistik Kota Pare-pare.
- Yunus, H. S. (2000). *Struktur Tata ruang Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



PEMAKNAAN ARSITEKTUR VILA YULIANA DI SOPPENG, SULAWESI SELATAN DENGAN ANALISIS SEMIOTIKA

The Architectural Meaning of the Vila Yuliana in Soppeng, South Sulawesi with Semiotic Analysis

Hasrianti

Balai Arkeologi Sulawesi Selatan
Jl. Pajjaiyang No. 13 Sudiang Raya Makassar, Indonesia
hasrianti@kemdikbud.go.id

Naskah diterima: 17/05/2019; direvisi: 29/05-02/07/2019; disetujui: 14/07/2019

Publikasi ejurnal: 30/06/2019

Abstract

The object of the research is the Vila Yuliana colonial building in Soppeng Regency. This paper aims to find out the meaning of the location of Vila Yuliana and the use of local architecture in Vila Yuliana. The research method used is an inductive qualitative method. Data analysis used a semiotic approach. The research phase began with a survey and ended with interpretation of the data. The analysis results show that the Vila Yuliana's architectural elements have some symbolic value. Not only to get an interesting view of the location, with any reason it is also to combine elements of colonial architecture with local architecture. On the contrary, Vila Yuliana contained political messages, especially to show the dominance of the power of the Government of Netherlands-Indië.

Keyword: Architecture, colonial, semiotic, Vila Yuliana.

Abstrak

Objek penelitian adalah bangunan kolonial Vila Yuliana di Kabupaten Soppeng. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui makna dibalik keletakan Vila Yuliana dan penggunaan arsitektur lokal pada Vila Yuliana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif induktif. Analisis data menggunakan pendekatan semiotika. Tahap penelitian diawali dengan survei dan berakhir dengan interpretasi data. Hasil analisis menunjukkan unsur-unsur arsitektur bangunan Vila Yuliana memiliki nilai simbolik. Bukan hanya sekedar untuk mendapatkan pemandangan menarik dari keletakannya, juga bukan tanpa alasan memadukan unsur arsitektur kolonial dengan arsitektur lokal. Dibalik hal itu, Vila Yuliana mengandung pesan politis, terutama untuk menunjukkan dominasi kekuasaan pemerintah Hindia Belanda.

Kata Kunci: Arsitektur, kolonial, semiotika, Vila Yuliana.

PENDAHULUAN

Vila Yuliana atau yang dikenal dengan Mess Tinggia adalah salah satu bangunan kolonial yang masih bertahan di Kabupaten Soppeng. Terletak di Jalan Pengayoman No. 1, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kota Watansoppeng, Kabupaten Soppeng. Vila Yuliana dibangun sekitar tahun 1906, pada masa pemerintahan Gubernur Sulawesi C.A. Kroesen (Hamid, 1991, pp. 213–237). Fungsi awalnya adalah sebagai tempat peristirahatan pejabat

pemerintah Hindia Belanda (Khatimah, 2002, p. 31), juga tempat menginap dan beristirahat untuk tamu pemerintah yang kebetulan datang ke Soppeng (Tangke & Nasyaruddin, 2007, p. 90). Vila Yuliana juga pernah digunakan sebagai kediaman resmi Kontrolir Soppeng pada masa pemerintahan Hindia Belanda (Hafied, 2003). Kini, Vila Yuliana difungsikan sebagai Museum Daerah Latemmamala.

Vila Yuliana terletak di pusat kota Watansoppeng di atas Bukit Botto,

berhadapan dengan Istana Datu Soppeng. Pemilihan lokasi tersebut tepat menurut fungsinya sebagai rumah peristirahatan, sebab panorama kota Watansoppeng dan aktivitas masyarakat sehari-hari dapat dinikmati dengan jelas (Khatimah, 2002, p. 36). Namun, apakah ada makna lain dibalik keletakannya tersebut? Kemudian, jika melihat fasad Vila Yuliana yang menunjukkan akulturasi antara bangunan kolonial Belanda dan rumah tradisional Bugis, apakah ada makna dari penggunaan unsur arsitektur lokal tersebut?

Kajian terhadap Vila Yuliana bukanlah sesuatu yang baru. Sahroni dalam tulisannya berjudul *Bangunan Kolonial dan Adaptasi Arsitekturnya* telah mengkaji Vila Yuliana sebagai salah satu bangunan kolonial di Kabupaten Soppeng yang arsitekturnya disesuaikan dengan iklim setempat dan bentuk arsitekturnya dipengaruhi arsitektur tradisional Bugis (Sahroni, 2016). Selain itu, Khusnul Khatimah dalam penelitian skripsinya yang berjudul *Pengelolaan Vila Yuliana di Watansoppeng Kabupaten Soppeng* mengkaji aspek pengelolaan Vila Yuliana (Khatimah, 2002). Dalam tulisan Hasrianti yang berjudul *Villa Yuliana: Bangunan Berarsitektur Indis di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan* juga telah mengkaji persoalan Vila Yuliana sebagai sebuah bangunan berarsitektur Indis di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, dengan gaya arsitekturnya yang memadukan beberapa bentuk gaya arsitektur kolonial Belanda dan gaya arsitektur rumah tradisional Bugis (Hasrianti, 2016). Pada dasarnya, draft awal tulisan ini seperti halnya tulisan yang terbit sebelumnya berasal dari skripsi penulis berjudul *Arsitektur Villa Yuliana di Watansoppeng, Kabupaten Soppeng* (Hasrianti, 2013). Permaknaan arsitektur Vila Yuliana dengan analisis semiotika belum pernah dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah, sehingga mendorong penulis membuat tulisan ini dengan penambahan dan pembaharuan seperlunya.

Pendekatan semiotika dalam menganalisis tinggalan arkeologi telah banyak dilakukan. Diantaranya yang dapat disebutkan adalah tulisan Ery Soedewo berjudul *Tinjauan Semiotik terhadap Gambaran Dunia menurut Kosmologi Hindu-Buddha, dan Batak*, membahas tentang kesamaan kosmologi konsep antara tradisi Hindu-Buddha dan tradisi Batak dalam perspektif semiotika, Andri Restiyadi dengan tulisannya berjudul *Mengapa Seniman Memahatkan Figur Raksasa Menari pada Batur Biaro Bahal I? (Sebuah Tinjauan Semiotika Piercian)* membahas tentang tinjauan semiotika Pierce pada pahatan figur raksasa menari di Batur Biaro Bahal 1, dan Ririmasse dengan tulisannya berjudul *Ruang Sebagai Wahana Makna: Aspek Simbolik Pola Tata Ruang dalam Rekayasa Pemukiman Kuna di Maluku* membahas tentang pola tata ruang pada pemukiman kuno di Maluku sebagai sebuah media simbolik (Restiyadi, 2008; Rinimasse, 2007; Soedewo, 2007). Tulisan ini tentunya akan menambah daftar tulisan tentang pendekatan semiotika dalam analisis tinggalan arkeologi, terkhusus bangunan kolonial di Sulawesi Selatan.

Arsitektur kolonial merupakan sebutan singkatan untuk langgam arsitektur yang berkembang selama masa pendudukan Belanda di tanah air (Sahroni, 2016, p. 186). Adapun semiotika (*semiotics*) adalah kajian tentang sifat dan penggunaan tanda (Shaw & Jomenson, 1999, p. 548). Analisis semiotika, dalam berbagai bentuk digunakan secara luas pada disiplin-disiplin ilmu seperti antropologi, arsitektur, seni, komunikasi, ilmu budaya, pendidikan, linguistik, literatur, ilmu politik, sosiologi, dan psikologi, sebagaimana disebutkan oleh Preucel (2006, p. 5) dalam kutipan berikut:

“Semiotics analysis, in various forms, is widely used today in a broad range of disciplines, including anthropology, architecture, art, communications, cultural studies, education, linguistics,

political science, sociology, and psychology”

Secara umum dapat dikatakan bahwa bangunan arsitektural memiliki informasi pertama sebagai tempat hunian, namun bukan berarti tidak mengandung informasi (arti) lain. Baik simbol maupun tanda (*sign*) diyakini bersifat universal, sehingga proses yang terjadi dalam pembentukan sebuah bahasa juga terjadi pada hal lain, antara lain pada arsitektur (Sukada, 1989, p. 34). Pada dasarnya arsitektur selalu ingin menyampaikan pesan, hanya karena pesan itu tidak tertulis maka pesan tadi dapat saja diartikan berbeda dari yang dimaksudkan (Sukada, 1989, pp. 33–34).

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif induktif dan rancangan penelitian bersifat fleksibel. Tahapan penelitian dimulai dengan pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer melalui survei dengan merekam data catatan lapangan, data piktorial (foto dan gambar), serta wawancara. Pengumpulan data sekunder melalui penelusuran arsip, laporan penelitian, buku, jurnal dan artikel dari internet dan perpustakaan. Tahapan selanjutnya setelah mengumpulkan data, dilakukan pengolahan data, yaitu melakukan

analisis dengan pendekatan semiotika pada unsur-unsur arsitektur Vila Yuliana yang dianggap memiliki nilai simbolik. Unsur-unsur arsitektur yang dimaksud antara lain denah dan tata ruang, fasad bangunan, elemen pembentuk ruang, serta ragam hias. Tahapan terakhir yaitu menginterpretasikan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

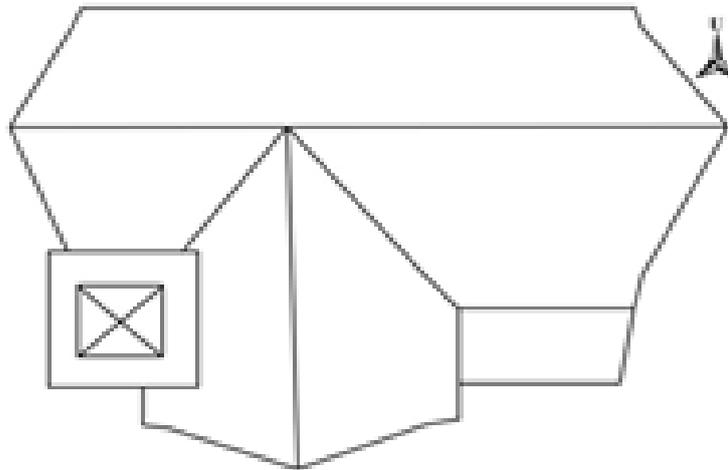
1. Deskripsi Vila Yuliana

Vila Yuliana merupakan sebuah bangunan permanen berlantai dua dengan tinggi 16 m ([gambar 1](#)). Fasad bangunan menghadap ke barat. Denah bangunan Vila Yuliana berbentuk persegi asimetris dengan ukuran 16,5 m x 12,6 m. Baik lantai I maupun lantai II memiliki tujuh ruangan dengan teras depan dan belakang.

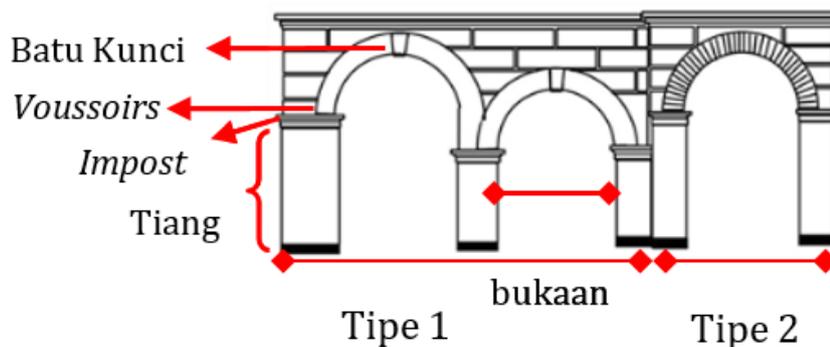
Bangunan Vila Yuliana menggunakan gabungan dua atap pelana dengan penutup atap sirap ([gambar 2](#)). Bentuk atap lebar dan runcing dengan kanopi. Fasad depan menggunakan *box gable roof* sedangkan fasad sisi selatan dan belakang menggunakan *open gable roof*. Gavel (*gable*) yang dimaksud ialah dinding (muka) yang berbentuk segitiga terletak di antara ujung atap. Pada gavel fasad depan dan selatan terdapat semacam ventilasi (*gablevent*) dengan kepala melengkung



Gambar 1. Vila Yuliana (Sumber: Balai Arkeologi Sul-Sel, Tahun 2016)



Gambar 2. Sketsa tampak atas atap Vila Yuliana (**Sumber:** Hasrianti, 2013)



Gambar 3. Sketsa tiang dengan pelengkung pada teras depan lantai I bangunan Vila Yuliana (**Sumber:** Hasrianti, 2013)

seperti kubah (*arc vault*) yang kusennya menyatu dengan kuda-kuda penopang dinding (*timber-half*) dari kayu bermotif kotak-kotak dengan variasi garis-garis spiral dan di atas kepala terdapat ornamen lengkung kubah dari pasangan batu-bata merah, sedangkan pada gavel fasad belakang terdapat ventilasi atau jendela berbentuk lingkaran dari empat buah rangka kaca $\frac{3}{4}$ lingkaran. Gavel fasad depan dan selatan diberi *bargeboard* dekoratif berbentuk lengkung daun semanggi (*trefoil arch*) dari susunan papan kayu dipasang vertikal dengan motif terawang belah ketupat.

Vila Yuliana memiliki menara yang terletak di sisi kiri bagian depan bangunan. Atap menara berbentuk limas runcing. Pada puncak atap menara terdapat hiasan kemuncak tongkat. Denah menara berbentuk

segi empat. Dinding menara memiliki kuda-kuda penopang dinding (*timber-half*) pada dinding barat dan selatan. Kuda-kuda tersebut membentuk garis-garis berbentuk kotak-kotak yang menyatu dengan kusen jendela berdaun tiga berlengkung kubah pada dinding barat dan dengan variasi lingkaran di tengah pada dinding selatan (**gambar 3**). Menara disangga oleh kolom-kolom *arch* model busur dengan *voussoirs* dari batu bata merah. Kolom tersebut juga berfungsi sebagai ruang teras depan lantai I dan lantai II.

Unsur-unsur penyusun badan bangunan Vila Yuliana terdiri dari tiang dan pagar teras (*balustrade*), tangga, dinding, lantai, plafon, pintu, jendela, serta ventilasi. Tiang pada bangunan Vila Yuliana terdapat di teras, baik depan maupun belakang di



Gambar 4. Tangga depan dari kayu dan tangga belakang dari konstruksi beton masif (Sumber: Hasrianti, 2013)

lantai I dan II. Tinggi tiang di teras depan lantai I antara 170 cm – 240 cm dan lebar 70 cm – 100 cm, dengan penampang persegi. Tiang menyatu dengan pelengkung busur (*arch*) yang berjejer di sepanjang tepi teras membentuk *arkade* dengan lebar bukaan 210 cm. Pelengkung disangga oleh *impost* berprofil lis timbul di kepala tiang. Pada kepala (puncak) dinding *arkade* diberi profil lis timbul yang menegaskan batas antara lantai I dan II.

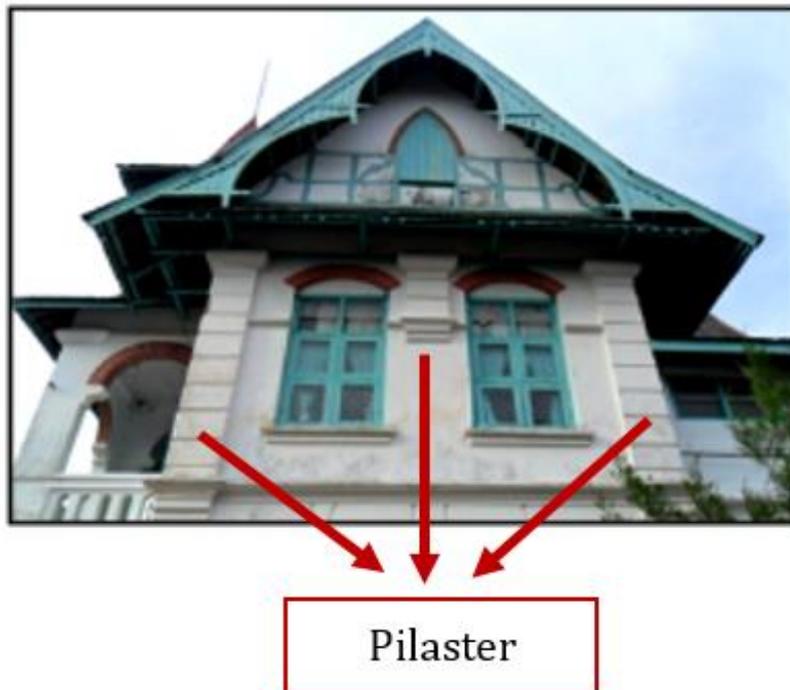
Berdasarkan bahan pembentuknya, pelengkung pada teras depan lantai I bangunan Vila Yuliana terbagi atas dua tipe, yaitu pelengkung *bervoussoirs* beton dengan batu kunci (*key stone*) di tengah dan pelengkung *bervoussoirs* batu-bata merah yang terletak pada ruang di bawah menara, menyangga dinding-dinding menara. Pelengkung tipe kedua berlanjut hingga ke lantai II, menyatu dengan pagar teras (*balustrade*) dari beton setebal 31 cm yang diberi kisi-kisi dari beton berkepala busur setebal 15 cm dan berjarak 17 cm ([gambar 3](#)).

Tiang-tiang pada teras depan lantai II dipasang di antara pagar teras (*balustrade*) sebagai sandaran. Pagar teras tersusun atas pagar atas (*upper rail*) dan pagar bawah (*lower rail*) dari kayu. Pagar sisi barat diberi kisi-kisi (jeruji) dari besi sedangkan pada sisi utara diberi papan kayu (*plank*). Pada sisi barat teras depan lantai II, kepala tiang

diberi pasangan berbentuk segitiga yang diisi papan kayu (*plank*). Pasangan disangga oleh palang kayu yang kesatuannya dengan tiang membentuk tanda salib. Pasangan tersebut menyangga balok penahan teritisan di bawah gavel. Sementara pada sisi selatan, kepala tiang diberi pasangan berbentuk pelengkung busur dari kayu yang diisi papan kayu (*plank*). *Plank-plank* ini memiliki terawang motif belah ketupat. Pasangan disangga oleh palang kayu berornamen, yang kesatuannya dengan pelengkung membentuk lengkung daun semanggi (*trefoil arch*).

Tiang pada teras belakang lantai I dan lantai II terbuat dari balok. Tiang dipasang di atas pondasi beton yang berjejer pada tepi depan teras menyangga atap teritisan. Adapun pada teras belakang lantai II, tiang dipasang di atas pagar teras (*balustrade*) dari beton, menyangga rangka atap. Pagar teras di sisi selatan diberi kisi-kisi berkepala busur. Selain tiang juga terdapat pilaster yang terletak di dinding selatan bagian atas (lantai II). Pada dinding selatan bagian bawah, terdapat pelengkung busur (*arch*) yang bukaannya dipasangi jendela.

Vila Yuliana memiliki dua buah tangga, yaitu tangga depan (utama) dan tangga belakang ([gambar 4](#)). Tangga depan terbuat dari kayu dan tangga belakang terbuat dari beton. Keduanya bermodel



Gambar 5. Pilaster pada dinding sisi selatan bangunan Vila Yuliana (**Sumber:** Hasrianti, 2013)

tangga balik (U). Pada tangga depan terdapat ukiran yang menghiasi balok penyangga bordes berbentuk garis lurus dan belah ketupat. Pada tiang penyangga balok terdapat hiasan ukiran motif segi empat dan profil di bagian kepala (*capital*), ukiran garis lurus di badan tiang, dan ukiran motif lingkaran di bagian kaki (*base*). Tangga memiliki pagar pengaman (*railing*) pada

kedua sisinya yang dipasang di atas ibu tangga. Pagar pengaman ini terbuat dari papan kayu yang diukir, sehingga gabungan antara setiap papan membentuk motif lingkaran, belah ketupat dan hati tersusun secara vertikal. Ujung atas pagar pengaman diberi pegangan berbentuk silinder yang di bawahnya diberi profil. Pagar pengaman dan pegangan tangga bertumpu pada lima buah



Gambar 6. Tipe-tipe penutup lantai Vila Yuliana (**Sumber:** Hasrianti, 2013)

tiang terbuat dari balok kayu dengan kepala merunjung ke atas seperti limas, yang diberi ukiran garis lurus vertikal pada badan dan profil dengan gerigi pada kepala. Pada kaki tiang tumpuan tengah diberi ornamen timbul menyerupai bunga.

Dinding bangunan Vila Yuliana tersusun dari struktur batu bata merah yang diplaster campuran semen dan pasir, kemudian diberi *finishing* cat kapur putih. Ketebalan dinding yaitu 30 cm. Dinding sisi selatan didukung oleh *pilaster-pilaster*, yaitu kolom atau pilar yang menyatu dengan dinding atau tembok, dilengkapi dengan kapital dan *base* atau dasar (Abieta, 2011, p. 262). *Pilaster* tersebut berfungsi menahan balok penahan teritisan yang terletak di bawah atap dan memperkuat konstruksi dinding ([gambar 5](#)).

Penutup lantai pada bangunan Vila Yuliana terdiri atas ubin dan papan kayu ([gambar 6](#)). Ubin digunakan pada lantai I, sedangkan papan kayu digunakan pada lantai II. Plafon atau langit-langit pada bangunan Vila Yuliana terdiri atas plafon papan kayu, plafon beton, dan plafon multipleks. Pintu dan jendela terdiri dari tipe daun ganda dan daun tunggal. Tipe daun ganda menggunakan *espanyolet* sebagai pengunci sayap pintu dan jendela. Keseluruhannya berbahan kayu, terdiri dari kayu masif dan kombinasi kaca. Jendela berdaun ganda terbagi atas jendela kotak dan jendela berkepala busur. Di atas jendela yang terletak di dinding selatan atas diberi ornamen pelengkung busur *bervousoir* batu bata merah.

Denah bangunan Vila Yuliana berbentuk asimetris hampir berupa persegi panjang. Pembagian ruang pada lantai I maupun lantai II relatif identik, dimana terdapat teras depan (*voor galerij*), teras belakang (*achter galerij*), dan ruang utama (*central room*). Di dalam ruang utama terdapat dua kamar tidur, sebuah ruang yang tidak diketahui fungsinya, gudang, dan dua WC. Penataan ruang hampir mirip dengan rumah masyarakat Indis golongan menengah

di Batavia yang digambarkan oleh Stavorinus dalam Soekiman (2000, p. 148) seperti berikut:

“Apabila orang datang dari arah depan rumah dan terus masuk ke dalam, ia akan mendapatkan lorong yang sempit yang pada satu sisi samping terdapat kamar-kamar. Apabila terus ke belakang, orang akan menuju ke arah ruang tengah yang merupakan *galerij*, yaitu suatu ruangan peristirahatan sebagai tempat bertemu keluarga sehari-hari, dan ada juga yang digunakan untuk ruang makan”.

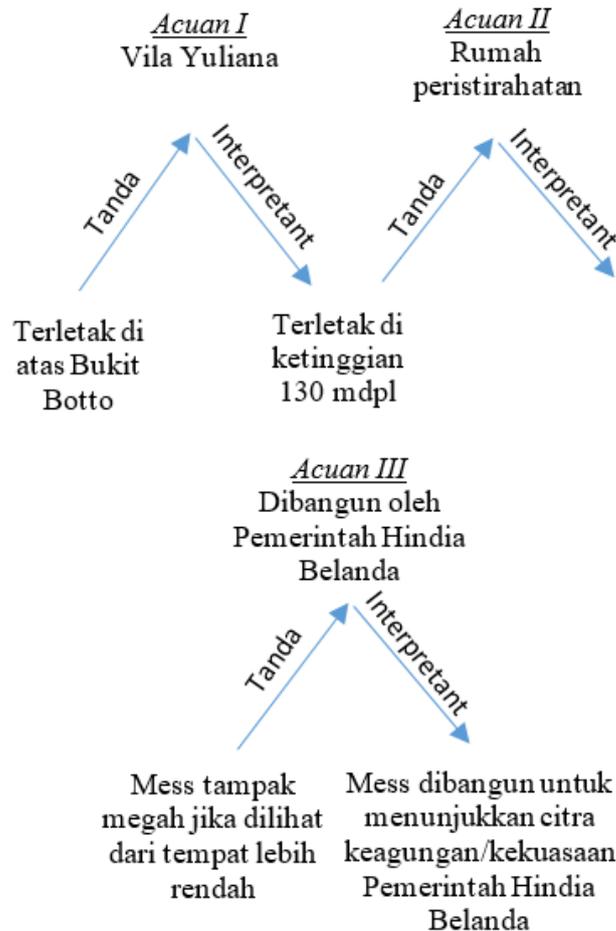
Vila Yuliana juga memiliki sebuah bangunan tambahan yang terletak di belakang (timur) bangunan utama, berdenah simetris persegi panjang, membujur dari timur ke barat, dan menghadap ke selatan. Bangunan memiliki tujuh ruangan. Waktu pendirian bangunan tidak diketahui, semasa dengan Vila Yuliana atau tidak semasa.

2. Pemaknaan Arsitektur Vila Yuliana dengan Analisis Semiotika.

a. Denah Tata Ruang

Vila Yuliana terletak di atas Bukit Botto berhadapan dengan Bukit Laleng Benteng. Bukit Botto merupakan tempat bekas ibukota Kerajaan Soppeng Rilau, sedangkan Bukit Laleng Benteng merupakan tempat bekas Keraton Kerajaan Soppeng Riaja (Istana Datu Soppeng). Keduanya diantarai oleh jalan aspal yang dulu merupakan alun-alun tempat berkumpulnya rakyat Soppeng ketika ada keramaian atau untuk mendengarkan pengumuman pemerintah (Muis, 1991, p. 27; Savitri, 2007, pp. 31–35).

Vila Yuliana dan Istana Datu Soppeng terletak pada ketinggian yang hampir sama. Vila Yuliana terletak di ketinggian 130 mdpl dan Istana Datu Soppeng di ketinggian 125 mdpl ([gambar 7](#)). Meski perbedaan ketinggiannya sangat sedikit, namun Vila Yuliana terletak lebih



Gambar 7. Bagan proses permaknaan keletakan Vila Yuliana dengan trikotomi Peirce (Sumber: Hasrianti, 2013)

tinggi dibanding Istana Datu Soppeng. Maka, keletakan Vila Yuliana di atas Bukit Botto tidak terlepas dari kepentingan politis Pemerintah Hindia Belanda. Selain untuk menunjukkan citra keagungan atau kekuasaan, Vila Yuliana juga telah menjadi simbol bahwa kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda lebih tinggi dari Datu Soppeng.

Bangunan Vila Yuliana menghadap ke barat. Pemilihan orientasi tidak lepas dari pilihan pandangan visual. Di sebelah barat Vila Yuliana tidak hanya terdapat Istana Datu Soppeng, namun juga terdapat himpunan pegunungan dengan ketinggian 500 – 1000 mdpl. Sehingga, jika dikaitkan dengan fungsi bangunan sebagai rumah peristirahatan, orientasi demikian memungkinkan individu lebih leluasa menikmati pemandangan alam pegunungan. Adapun dalam tataran politis, individu dapat

mengawasi kegiatan-kegiatan masyarakat, terutama di sekitar Istana Datu Soppeng. Hal tersebut penting, terutama dalam mengantisipasi gerakan-gerakan yang mengarah pada pemberontakan rakyat.

Tafsiran ini merujuk kepada pendapat Heryanto (2011, pp. 50–52) seperti dikutip berikut;

“Masyarakat kota awal dan modern memilih ketinggian tanah untuk berbagai tujuan seperti orientasi, pertahanan, saluran air dan pilihan pandangan visual..... Apabila pada permukiman awal topografi hanya digunakan untuk tujuan pertahanan terhadap serangan musuh dan simbol kekuasaan dari penguasa, di permukiman-permukiman modern simbol kekuasaan, politik dan ekonomi menjadi faktor penting untuk

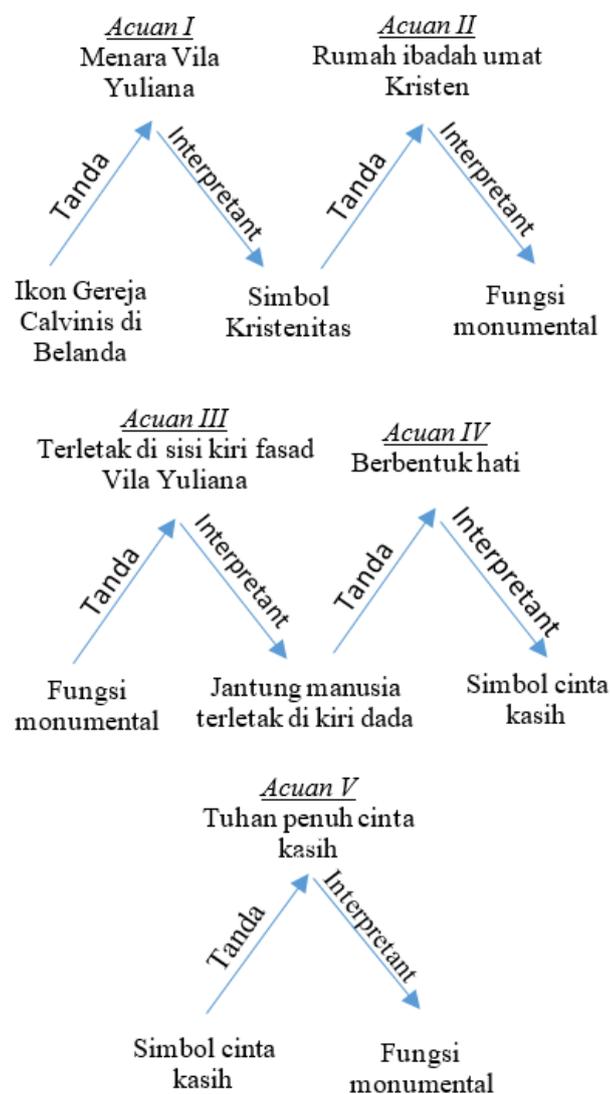
mendudukkan bangunan di ketinggian. Perletakan suatu bangunan di ketinggian secara simbolis akan memperlihatkan kekuasaan pemiliknya terhadap pemilik-pemilik bangunan lain yang berada di bawahnya. Istana Raja, benteng, dan bangunan religi adalah bangunan-bangunan yang biasanya diletakkan di ketinggian sebagai lambang kekuasaan, pertahanan dan keagungan”.

Hal ini juga sesuai dengan latar sejarah bahwa pada akhir tahun 1905, Pemerintah Hindia Belanda mulai ikut campur dalam urusan-urusan pemerintahan

di Soppeng, dengan mengambil alih kekuasaan tertinggi di daerah itu. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh Penguasa Militer setempat, yaitu Kapten (*Militair Gezagheber*) Kooy. Sejak tahun 1906 hingga 1923, praktis pemerintah Kedatuan Soppeng hanya merupakan boneka saja (Patunru, 2004, pp. 115–121).

b. Tampilan Fasad bangunan

Keseluruhan tampilan fasad bangunan Vila Yuliana berbentuk asimetris, dengan konstruksi sederhana namun kokoh. Bentuk simetris dimaksudkan untuk



Gambar 8. Bagan proses permaknaan menara Vila Yuliana dengan trikotomi Peirce (Sumber: Hasrianti, 2013)

menampilkan kesan formil, berwibawa, dan terutama melambangkan keadilan. Maka, sebagai kebalikan dari bentuk simetris, bentuk asimetris tentunya akan menampilkan kesan tidak formil dan tidak berwibawa. Bentuk tersebut sesuai dengan fungsi bangunan Vila Yuliana sebagai rumah peristirahatan yang bersifat rekreatif (Asmunandar, 2008, p. 74; Natsir, Abubakar, & Mubarak, 2009, p. 377).

Pada sisi kiri fasad Vila Yuliana terdapat sebuah menara. Bentuk menara simetris dan mengingatkan kepada menara yang biasa terdapat pada gereja-gereja abad pertengahan di Belanda. Atap menara berbentuk limas segi empat runcing dengan kemiringan 15°. Di puncak atap terdapat hiasan kemuncak berupa tongkat runcing berbahan logam. Hiasan kemuncak tersebut biasa ditemukan pada kemuncak gereja setelah zaman Gotik berakhir, sebagai lambang menunjuk ke tempat ‘tertinggi’ atau ‘Yang Esa’. Tongkat runcing seperti demikian bisa diisi penunjuk arah angin dan sekaligus untuk meletakkan penangkal petir (Soekiman, 2000, p. 267).

Pada dinding atas bagian barat menara terdapat jendela berdaun tiga dengan kepala berpelengkung gaya Gotik (*Gothic arch*). Jendela tersebut menyatu dengan *half-timbered* yang dipasang pada dinding menara. Penggunaan *half-timbered* menunjukkan pengaruh gaya Tudor (*Medieval Revival*). Menara tersebut disangga oleh kolom-kolom berpelengkung gaya Roman (*Roman arch*) yang menyatu dengan kolom-kolom pada teras lantai I dan II. Penggunaan pelengkung gaya Roman, jendela berdaun tiga dengan kepala berpelengkung gaya Gotik, dan *half-timbered* pada menara menunjukkan ciri arsitektur gaya *Victorian Gothic*.

Penggunaan menara secara fisik menambah estetika dan dapat digunakan untuk melihat pemandangan luar. Fungsi menara adalah untuk mengalirkan udara panas dari dalam ruangan ke luar ruangan (Samsudi, 2000: 70). Bentuk menara Vila

Yuliana adalah ikon menara gereja Calvinis yang merupakan simbol Kristenitas. Gereja adalah rumah ibadah umat Kristen, sehingga, keberadaan menara memiliki fungsi religi sebagai pengingat untuk selalu beribadah ([gambar 8](#)).

Penempatan menara pada sisi kiri fasad juga tidak lepas dari muatan simbolis. Konsep arsitektur yang berlaku universal melihat bangunan hunian sebagai analogi tubuh manusia, yaitu memiliki kaki, badan, dan kepala yang dikenal dengan konsep *anthropometric* (Oesman, 1999, p. 43). Pada sisi kiri rongga dada dalam tubuh manusia terletak jantung sebagai pusat peredaran darah, yang seringkali digambarkan berbentuk hati sebagai simbol cinta dan kasih sayang. Jika konsep ini dikaitkan dengan keletakan menara, dapat disimpulkan menara tersebut memiliki peran psikologis sebagai pengingat bahwa, Tuhan adalah inti kehidupan yang senantiasa melindungi umatNya dengan cinta kasih.

Di atas *balustrade* jeruji besi teras depan lantai II berjejer tiang-tiang kayu berpenampang persegi sebagai penyangga tudung teras. Tiang diberi palang kayu yang membentuk tanda salib. Salib merupakan simbol identitas Kristiani yang melambangkan keselamatan umat, keimanan, dan pengingat untuk senantiasa beribadah. Tiang-tiang kayu penyangga dengan bentuk yang sama juga terdapat di bawah tangga utama (depan). Bentuk *kapital* dan *base* tiang-tiang ini seperti bentuk tiang atau kolom *Tuscan* (*The Greek Doric*) yang biasa terdapat pada bangunan bergaya klasik Yunani, akan tetapi terbuat dari kayu. Menurut Soekiman (2000, p. 302), gaya Dorik (Dorian) dipergunakan karena sesuai dengan watak dan jiwa bangsa Doria yang berjiwa militer menghendaki bentuk bangunan yang diciptakan tampak kokoh, kuat, perkasa, sekaligus sebagai lambang kekuasaan. Dengan demikian, gaya Doria sangat cocok sebagai hiasan bangunan pemerintah atau penguasa.

Jumlah tiang kayu di teras dan di bawah tangga utama adalah tiga buah. Angka tiga dapat dikaitkan dengan agama Kristen, yaitu sebagai simbol trinitas dari tiga bentuk ke-Tuhan-an atau tritunggal (Allah/Bapak, Putra dan Roh Kudus). Simbol trinitas juga ditemukan pada jendela berdaun tiga di dinding barat menara, dan bentuk-bentuk daun semanggi pada pelengkung. Penggunaan simbol tersebut tidak lain merupakan lambang keimanan terhadap keesaan tritunggal.

c. Elemen Bentuk Ruang

Elemen pembentuk ruang sebuah bangunan terdiri dari dinding, lantai, plafon, dan bukaan (pintu dan jendela). Namun, dalam tulisan ini hanya membahas elemen yang dianggap memiliki nilai simbolik saja. Vila Yuliana adalah bangunan permanen berlantai dua. Lantai I menggunakan penutup lantai ubin, sedangkan lantai II menggunakan penutup lantai kayu. Penutup lantai ubin merupakan ciri arsitektur Eropa yang mulai digunakan pada akhir abad XIX (Abieta, 2011, p. 98), sementara penutup lantai papan kayu merupakan pengaruh dari arsitektur lokal.

Setiap ruangan di lantai I menggunakan ubin dengan ukuran, bentuk, warna, dan motif berbeda. Hampir setiap ruangan menggunakan ubin dekoratif dengan aplikasi border, dan ditata menggunakan pola lurus-simetris. Ubin bermotif bunga dan sulur bunga merah digunakan pada ruangan-ruangan di sisi kiri, sementara ruangan-ruangan di sisi kanan menggunakan ubin bermotif sulur bunga hitam dan ubin warna hitam polos yang ditata berselang-seling dengan ubin berwarna abu-abu membentuk pola papan catur serta belah ketupat.

Penataan ubin dengan cara lurus (grid) dan simetris adalah ciri arsitektur gaya *Indische Empire*. Adapun penggunaan motif-motif bunga dan sulur bunga, serta aplikasi border adalah salah satu ciri arsitektur *Art Nouveau*. Ubin warna hitam

dan abu-abu yang ditata selang-seling membentuk pola papan catur identik dengan simbol kemiliteran dapat dikaitkan dengan kehormatan dan kebudayaan tinggi. Pola papan catur atau *gridiron* dalam tata kota misalnya adalah perwujudan ideologi kemiliteran agar pergerakan pasukan dapat berlangsung cepat (Heryanto, 2011, p. 61).

d. Ragam Hias

Ragam hias adalah salah satu hal yang banyak terkait dengan keindahan suatu bangunan (Soekiman, 2000, p. 242). Selain berfungsi estetis, ragam hias juga mengandung makna-makna yang menjadi acuan kebudayaan penghuninya (Mardanas, Abu, & Maria, 1985, p. 55). Ragam hias pada bangunan Vila Yuliana sebagian besar termasuk hiasan tipe konstruksional, yang tidak dapat dilepaskan atau melekat pada bangunan. Sisanya adalah hiasan tipe komplementer, yaitu dapat dilepaskan tanpa memberi pengaruh apapun (Kusmiati, 2004).

Menurut bentuknya, ragam hias tersebut terdiri dari ragam hias geometris dan ragam hias naturalis. Bentuk-bentuk ragam hias geometris terdiri atas garis lurus, persegi empat, belah ketupat, lingkaran, hati, dan segitiga (Hasrianti, 2016, p. 107). Ragam hias tersebut umumnya berpola lajur tepi, yaitu menghias bagian tepi benda (Sipahelut & Petrussumadi, 1991, p. 70).

Bentuk-bentuk geometris yang telah disebutkan, didapatkan dari penggabungan tepi-tepi benda atau bidang, seperti misalnya pada pipi atau pagar tangga.

Menurut Soekiman (2000, pp. 285–290), bentuk lingkaran, persegi empat, belah ketupat (*de ruit*), hati dan segitiga adalah motif kuno di negeri Belanda dari masa pra-Kristen (zaman kekafiran). Bentuk lingkaran, persegi empat, bujur sangkar dan segitiga adalah simbol bulan dan matahari yang diartikan sebagai lambang kesuburan. Bentuk hati adalah lambang dari ungkapan akan kepercayaan, harapan, dan kejujuran atau kesetiaan. Bagi bangunan rumah gaya

Indis di Indonesia, lambang tersebut sudah kehilangan makna sebagai hiasan yang mengandung arti simbolik, kecuali hanya sekedar sebagai hiasan saja. Namun, motif-motif tersebut tetap dipelihara sebagai lambang keagamaan (*goddienst emblemen*), dalam rangka perluasan ajaran agama Kristen.

Ragam hias berbentuk geometris seperti disebutkan di atas juga dikenal dalam arsitektur tradisional nusantara, termasuk arsitektur tradisional suku Bugis. Bentuk persegi empat terkait dengan filosofi *sulapa eppa*, yang secara literal berarti empat sisi, sebuah pandangan dunia empat sisi, dimaksudkan untuk menunjukkan totalitas dan kesempurnaan (Morrel, 2005, p. 248). Hal yang sama berlaku pula pada bentuk belah ketupat yang mengingatkan kepada konsonan Sa, yaitu salah satu abjad dalam aksara *lontara* yang berbentuk wajik atau *urupu sulapa eppa* (Morrel, 2005, p. 250).

Ragam hias naturalis pada Vila Yuliana terdiri dari motif bentuk bunga, buah, sulur-suluran daun dan sulur-suluran bunga. Motif sulur bunga yang menghiasi permukaan ubin mengingatkan pada ragam hias khas rumah Bugis, yaitu bunga *parenreng* atau bunga yang menarik, sebagai ungkapan harapan pemilik rumah agar senantiasa murah rezeki (Mardanas et al., 1985, p. 56). Sementara, motif sulur daun yang terukir pada ornamen besi membentuk lambang *Aries ram* atau kambing bertanduk sebagai lambang keperkasaan bangsa Aria atau bangsa kulit putih (Soekiman, 2000, pp. 301–302).

Motif bunga (*bloem motif*) terdiri dari bunga mawar (*roosvenster*) dan bunga tulip. Bunga mawar (*roosvenster*) dikenal sebagai lambang cinta, karena di dalam mitologi Yunani, bunga mawar merupakan persembahan untuk Venus sang Dewi Cinta. Bagi umat Kristiani, bunga mawar dianggap sebagai lambang Perawan Suci yang identik dengan Bunda Maria (Suratminto, 2007, pp. 5–6). Bunga tulip hingga kini menjadi bunga lambang Negeri Belanda. Diantaranya ada

yang mengartikan ‘sekali hidup di dunia, hendaknya menjadi seseorang yang mempunyai arti bagi diri, keluarga, dan bangsa’ (Soekiman, 2000, p. 276). Makna bunga tulip tersebut setali dengan motif berbentuk buah pinang pada ujung palang kayu *bargeboard*, yang melambangkan kebermanfaatan atau keberdayagunaan bagi orang lain.

Di luar dari ragam hias yang telah disebutkan, terdapat pula hiasan berupa *vousoir* dari batu bata merah yang ditempelkan pada permukaan *arch* dan dinding di atas jendela. Menurut Soekiman (2000, p. 289), hiasan tersebut adalah lambang tolak bala (*afweerteken*) kuno yang disebut *donder* atau *heksenbezem*.

PENUTUP

Melalui analisis semiotika pada arsitektur Vila Yuliana dapat diketahui bahwa keletakan Vila Yuliana di atas Bukit Botto tidak terlepas dari kepentingan politik pemerintah Hindia Belanda. Selain untuk menunjukkan citra keagungan atau kekuasaan, Vila Yuliana juga telah menjadi simbol bahwa kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda lebih tinggi dari Datu Soppeng. Arah hadap Vila Yuliana bukan saja memberikan keleluasaan untuk menikmati pemandangan alam pegunungan Soppeng, namun juga untuk dapat mengawasi kegiatan-kegiatan masyarakat, terutama di sekitar Istana Datu Soppeng. Hal tersebut penting, terutama dalam mengantisipasi gerakan-gerakan yang mengarah pada pemberontakan rakyat. Arsitektur Vila Yuliana memadukan unsur arsitektur kolonial dengan unsur arsitektur lokal. Tampilan bangunan dibuat agar dapat menunjukkan kewibawaan, kekayaan, keagungan, dan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di Soppeng.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua Prodi dan Staf Pengajar Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas

Hasanuddin atas segala bimbingan dan masukan, Staf Pegawai BPCB Sulawesi Selatan, Staf Pegawai Balai Arkeologi Sulawesi Selatan, Staf Pegawai Dinas Pariwisata dan Museum Latemmala Kabupaten Soppeng, serta Yohanis Kasmin, S.S., Afdal Amir, S.S., dan semua nama yang tidak penulis sebutkan yang telah membantu dalam pengumpulan data,

diskusi, masukan, dan dukungan moril dalam pengembangan naskah ini. Terimakasih pula kepada Jurnal Walennae yang telah berkenan menerbitkan makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abieta, A. (2011). *Pengantar Panduan Konservasi Bangunan Bersejarah Masa Kolonial*. Jakarta: Pusat Dokumentasi Arsitektur.
- Asmunandar. (2008). *Membangun Identitas Masyarakat Melalui Kota Kuno Makassar*. Universitas Gadjah Mada.
- Hafied, G. (2003). Villa Juliana: A Forgotten Historical Heritage of Watan Soppeng, South Sulawesi; Demanding for Attention. *A Report Form Site Visit on The Home-Return (Rewe' Sipulung) Seminar, Watan Soppeng*. Retrieved from <http://www.soppeng.org/?p=60#more-60>
- Hamid, P. (1991). *Sejarah Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng*. Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Hasrianti. (2013). *Arsitektur Villa Yuliana di Watansoppeng Kabupaten Soppeng*. Universitas Hasanuddin.
- Hasrianti. (2016). Villa Yuliana: Bangunan Berarsitektur Indis di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. *Walennae*, 14(2), 99–110.
- Heryanto, B. (2011). *Roh dan Citra Kota: Peran Perancangan Kota Sebagai Kebijakan Publik*. Surabaya: Brilian Internasional.
- Khatimah, K. (2002). *Pengelolaan Vila Yuliana di Watansoppeng Kabupaten Soppeng*. Universitas Hasanuddin.
- Kusmiati, A. (2004). *Dimensi Estetika pada Karya Arsitektur & Desain*. Jakarta: Djembatan.
- Mardanas, I., Abu, R., & Maria. (1985). *Arsitektur Tradisional Daerah Sulawesi Selatan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Morrel, E. (2005). Simbolisme, Ruang dan Tatanan Sosial. In K. Robenson & M. Paeni (Eds.), *Tapak-tapak Waktu: Sejarah, Kebudayaan, dan Kehidupan Sosial di Sulawesi Selatan*. Makassar: Innawa.

- Muis, A. G. (1991). *Situs Lalang Benteng di Watan Soppeng (Suatu Kajian Arkeologi Sejarah)*. Universitas Hasanuddin.
- Natsir, M., Abubakar, N., & Mubarak, A. P. (2009). *Potensi Kepurbakalaan Kabupaten Soppeng*. Makassar.
- Oesman, O. (1999). *Rekonstruksi Bangunan Hunian di Situs Kota Majapahit Trowulan, Jawa Timur: Pendekatan Arsitektur*. Universitas Indonesia.
- Patunru, D. A. (2004). *Bingkisan Patunru: Sejarah Lokal Sulawesi Selatan*. Makassar: Pusat Kajian Indonesia Timur bekerjasama dengan Lembaga Penerbitan UNHAS.
- Preucel, R. W. (2006). *Archaeological Semiotics*. UK: Blackwell Publishing.
- Restiyadi, A. (2008). Mengapa Seniman Memahatkan Figur Raksasa Menari pada Batur Biaro Bahal I? (Sebuah Tinjauan Semiotika Piercian). *Berkala Arkeologi Sangkhakala*, 11(21), 1–11.
- Rinimasse, M. N. (2007). Ruang Sebagai Wahana Makna: Aspek Simbolik Pola Tata Ruang dalam Rekayasa Pemukiman Kuna di Maluku. *Kapata Arkeologi*, 3(7), 72–106.
- Sahroni, A. (2016). Bangunan Kolonial dan Adaptasi Arsitekturnya. In *Lembah Walenna: Lingkungan Purba dan Jejak Arkeologi Peradaban Soppeng*. Yogyakarta: Ombak.
- Savitri, A. D. (2007). *Situs-situs Kerajaan Soppeng di Kabupaten Soppeng (Analisis Arkeologi Keruangan)*. Universitas Hasanuddin.
- Shaw, I., & Jomenson, R. (1999). *A Dictionary of Archaeology*. United Kingdom: Blackwell Publishing.
- Sipahelulut, A., & Petrussumadi. (1991). *Dasar-Dasar Desain*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Soedewo, E. (2007). Tinjauan Semiotik terhadap Gambaran Dunia menurut Kosmologi Hindu-Buddha, dan Batak. *Berkala Arkeologi Sangkhakala*, 10(19).
- Soekiman, D. (2000). *Kebudayaan Indis*. Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya.
- Sukada, A. B. (1989). Memahami Arsitektur Tradisional dengan Pendekatan Tipologi. In E. Budihardjo (Ed.), *Jati Diri Arsitektur Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Suratminto, L. (2007). Teks pada Batu Nisan Baron van Imhoff Dilihat Melalui Analisis Semiosis Model Peirce dan Danesi-Perron. *Makara, Sosial Humaniora*, 11(1).
- Tangke, A. W., & Nasyaruddin, A. (2007). *Orang Soppeng Orang Beradab: Sejarah, Silsilah Raja-raja, dan Objek Wisata*. Makassar: Pustaka Refleksi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Redaksi menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mitra Bestari:

1. Prof. Dr. Akin Duli, M. A. (Universitas Hasanuddin, Indonesia)
2. Prof. (Ris.) M. Th. Naniek Harkatiningsih (Pusat Arkeologi Nasional, Indonesia)
3. Dr. Anggraini Priadi, M.A. (Universitas Gadjah Mada, Indonesia)
4. Dr. David Bulbeck (Australian National University, Australia)
5. Dr. Muhlis Hadrawi, M.Hum. (Universitas Hasanuddin, Indonesia)
6. Drs. M. Bashori Imron, M.Si. (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indonesia)

Atas telaah dan review yang telah dilakukan demi perbaikan kualitas naskah dalam jurnal Walennae, Edisi Vol. 17, No. 1, Juni 2019.

Dewan Redaksi

BIODATA PENULIS

Dwi Kurnia Sandy

Lahir di Payakumbu 4 April 1997, menempuh pendidikan Arkeologi (SI) di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Telah mengikuti beberapa kegiatan seminar ilmiah, di antaranya adalah pertemuan ilmiah “2nd International Academic Conference on Tourism” dengan judul artikel “Preservation Strategy Boelongan Shipwreck at Ocean Tourism Area Mandey Bay, West Sumatera based on Sustainable Torism Principle” di Yogyakarta tahun 2016”. Publikasi terakhir yaitu Potensi Tinggalan Arkeologi dan Pariwisata di Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara di Jurnal Nadirta Widya, tahun 2019.



Nani Somba

Lahir di Bone tahun 1965. Menyelesaikan studi jenjang Strata Satu (S1) di jurusan Arkeologi Universitas Hasanuddin tahun 1989. Melanjutkan pendidikan Strata Dua (S2) di Program Studi Antropologi Universitas Hasanuddin tahun 2013 dengan tesis magister berjudul “Studi Analisis Fungsional terhadap Upacara Ritual pada Komunitas Adat To Matua Buttu Batu, Tondon, Enrekang”. Sejak 1993 hingga sekarang bekerja di Balai Arkeologi Sulawesi Selatan dan sering terlibat dengan sejumlah proyek penelitian khususnya menyangkut arkeologi prasejarah. Telah mempublikasikan sejumlah karya tulis ilmiah, diantaranya: Penguburan Tempayan di Situs Takbucini Kab. Takalar (Jurnal Walennae 2003); Fungsi dan Makna Kerbau dalam Tradisi Megalitik di Sebagian Wilayah Nusantara (Jurnal Walennae 2005); Pola Keletakan dan Peranan Menhir pada Kehidupan Masyarakat Toraja (Jurnal Walennae 2009); Jejak-Jejak Arkeologis di Kaki Gunung Bambapuung Kab. Enrekang, Sulawesi Selatan (Jurnal Walennae 2009); Ciri Budaya Austronesia di Kawasan Enrekang, Sulawesi Selatan (Jurnal Walennae 2010); Analisis Manik-Manik dalam Penelitian Arkeologis (Jurnal Walennae 2010); Sebaran Lukisan Gua di Wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara dan Faktor Kerusakannya (Jurnal Walennae 2011); Benteng-Benteng di Pulau Wakatobi Sulawesi Tenggara sebagai Sisa Kejayaan Masa Lampau (Jurnal Walennae 2011).



Muhammad Fadhlan Syuaib Intan

Lahir di Makassar 21 November 1958, lulusan (SI) di Jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 1985. Bergabung dengan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1988, dan menduduki jabatan fungsional (peneliti) sejak tahun 1994 hingga saat ini.. Beberapa publikasi terakhir yaitu “Air Sugihan jejak Sungai Lama di LAHAN BASAH.” (Penerbit Ombak -Yogyakarta, tahun 2017), “Dataran Tinggi Jambi: Tektonik dan Situs” Dalam buku KERINCIMU-KERINCIKU: Dataran Tinggi Jambi Dalam Perspektif Arkeologi (Penerbit Ombak - Yogyakarta, tahun 2016) dan “Georadar Dalam Penelitian Arkeologi di Indonesia”. (Jurnal Naditira Widya Vo. 10 No. 1 Tahun 2016).



Muhajir

Lahir di Tomoni, 27 Desember 1993. Menyelesaikan studi S1 di jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin tahun 2017.



Hasrianti

Lahir 21 Mei 1989 di Labakkang, Kab. Pangkep. Menyelesaikan studi jenjang Strata Satu (S1) di Jurusan Arkeologi Universitas Hasanuddin tahun 2012. Saat ini bekerja di Balai Arkeologi Sulawesi Selatan dan beberapa kali terlibat dalam proyek penelitian.



PANDUAN PENULISAN JURNAL WALENNAE BALAI ARKEOLOGI SULAWESI SELATAN

Cakupan Isi:

Jurnal Walennae adalah salah satu wadah bagi praktisi budaya dan arkeolog dari manapun untuk mempublikasikan artikel, ulasan, maupun ide, hasil penelitian, gagasan konseptual, metode, serta kajian dan aplikasinya tentang arkeologi atau unsur-unsur budaya yang memiliki keterkaitan dengan kearkeologian. Jurnal ini akan terbit dua kali dalam satu tahun yaitu setiap bulan Juni dan November.

Syarat dan Ketentuan Umum:

1. Naskah belum pernah dipublikasikan oleh media cetak lain, dibuktikan dengan Surat Pernyataan (*Copyright Notice: dapat diunduh di <http://walennae.kemdikbud.go.id/index.php/walennae/index>*)
2. Naskah berupa hasil penelitian, gagasan konseptual, serta kajian dan aplikasinya tentang arkeologi khususnya atau unsur-unsur budaya yang memiliki keterkaitan dengan kearkeologian.
3. Naskah diketik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris pada kertas ukuran A4 dengan menggunakan font Times New Roman, berukuran 12, spasi 1. Batas atas, batas bawah, tepi kanan dan tepi kiri 3 cm. Jumlah kata dalam artikel minimal 3000 kata dan maksimal 5000 kata.
4. Sistematika penulisan naskah, yaitu:
 - a. Judul naskah;
 - b. Nama penulis (tanpa gelar akademik);
 - c. Asal Institusi; (termasuk negara)
 - d. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia;
Penjelasan: Abstrak ditulis dalam satu paragraf tanpa acuan, kutipan, dan singkatan. Abstrak terdiri dari empat aspek, yaitu: tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil penelitian dan kesimpulan penelitian. Jumlah 100 sampai 200 kata.
 - e. Kata kunci
Penjelasan: Kata kunci ditulis dengan Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan jumlah 3 sampai 5 kata. Abstrak dan kata kunci diketik dengan font Times New Roman ukuran 10 dan bahasa Inggris dimiringkan (*italic*)
 - f. Pendahuluan; terdiri dari uraian tentang latar belakang, masalah, tujuan penelitian, hasil-hasil penelitian sejenis yang telah dilakukan, dan landasan teori yang digunakan.
 - g. Metode; Metode dapat berupa metode penelitian lapangan atau metode penelitian pustaka (desk study)
 - h. Hasil dan Pembahasan (disajikan dalam sub-bab);
 - i. Penutup (terdiri atas kesimpulan dan rekomendasi/saran);
 - j. Ucapan Terima Kasih (Optional)
 - k. Lampiran (Optional)
 - l. Daftar Pustaka.
 - m. Biodata Penulis dilampirkan dengan menyertakan foto penulis

Syarat dan Ketentuan Khusus:

1. Judul harus mencerminkan isi tulisan, spesifik, jelas, ringkas, informatif, menggugah rasa untuk dibaca, tertangkap mata (*eye catching*), serta mengandung unsur kata kunci.
2. Judul Bahasa Indonesia diketik rata tengah (*center*) dengan huruf kapital tebal (*bold*) menggunakan font *Times New Roman* ukuran 12.
3. Judul Bahasa Inggris diketik dibawah judul Bahasa Indonesia dengan huruf kapital di setiap awal kata, ditebalkan (*bold*), dimiringkan (*italic*), dan rata tengah (*center*) ukuran 12.
4. Apabila judul menggunakan Bahasa Inggris maka di bawahnya ditulis ulang menggunakan Bahasa Indonesia, begitu sebaliknya.
Contoh:

ARTEFAK LITIK DI KAWASAN PRASEJARAH BATU EJAYYA: TEKNOLOGI PERALATAN TOALIAN DI PESISIR SELATAN SULAWESI

The Lithic Artifact at Batu Ejayya Prehistoric Region: the Technology of Toalian Tools in Southern Coast of Sulawesi

5. Penulisan Nama dan Alamat:
 - a. Nama penulis diketik dibawah judul, ditulis lengkap tanpa menyebut gelar, diketik rata tengah (*center*) dan ditebalkan (*bold*). Nama diketik dengan font *Times New Roman* ukuran 10.
 - b. Apabila penulis lebih dari satu, maka dipisahkan dengan tanda koma (,) dan kata 'dan'.
 - c. Alamat penulis berupa nama dan alamat institusi. Jika penulis lebih dari satu maka diberi nomor urut dengan format *superscript*. Jika penulis memiliki alamat yang sama cukup ditulis dengan satu alamat saja, dan menambahkan asal negara.
 - d. Alamat pos elektronik (surel) ditulis di bawah nama penulis.
 - e. Jika alamat lebih dari satu maka harus diberi tanda asterisk (*) dan diikuti alamat berikutnya.
6. Penyajian Tabel
 - a. Judul ditampilkan di bagian atas tabel, rata kiri (*align text left*)
 - b. Setiap tabel diberi penomoran dengan menggunakan angka (Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, ... dst).
 - c. Font menggunakan Times Calibri dengan ukuran 9.
 - d. Pada bagian bawah tabel, rata kiri dicantumkan sumber atau keterangan tabel.
7. Penyajian gambar (peta, grafik, foto dan diagram)
 - a. Gambar harus jelas (dengan resolusi yang baik/300 dpi).
 - b. Gambar ditampilkan di tengah halaman (*center*).
 - c. Keterangan ditampilkan di bawah gambar menggunakan font Calibri dengan ukuran 10, ditempatkan di tengah (*center*). Diharuskan menyertakan sumber gambar di dalam kurung.
 - d. Semua gambar diurutkan dengan nomor (Gambar 1, Gambar 2, Gambar 3, ... dst).
 - e. Semua informasi (anotasi) dalam gambar harus jelas terbaca.

8. Pengutipan Sumber

- a. Penunjuk sumber dalam naskah dibuat di dalam tanda kurung dengan urutan nama pengarang, tahun terbit dan halaman sumber. Semuanya ditempatkan dalam kurung (Ambary, 1998: p. 29).
- b. Penunjuk sumber dari media massa cetak dan internet dibuat dalam tanda kurung
 - Penunjuk sumber berasal dari media massa cetak tanpa nama penulis ditulis dengan urutan: nama media, tanggal terbit dan halaman (Kompas, 29 Mei 2016: 11).
 - Penunjuk sumber dari media massa cetak dengan nama penulis dibuat di dalam tanda kurung dengan urutan : nama penulis, tahun terbit dan halaman (Amirah, 2011: p. 24)
 - Penunjuk sumber dari internet tanpa nama penulis, mencantumkan alamat *link* website dalam tanda kurung (http://www.arkeologi-sulawesi.com/situs/situs_tondon.html).
 - Penunjuk sumber dari internet dengan nama penulis ditulis dengan urutan: nama penulis dan tahun publikasi (Alya, 2009)
- c. Penunjuk sumber hasil wawancara dicantumkan identitas narasumber (nama, umur, pekerjaan, tanggal wawancara, contoh: (Komunikasi Pribadi: Nurdin, 75 tahun, pensiunan PNS, 29 Mei 2015), dan disebutkan pada bagian Ucapan Terima Kasih.

9. Daftar Pustaka, Metode sitasi menggunakan gaya *American Psychological Association Style* (APA) dengan memperhatikan kemutakhiran pustaka, paling sedikit 10 rujukan dan 80% diantaranya adalah rujukan primer (Jurnal terakreditasi/tidak, prosiding seminar hasil penelitian, disertasi, tesis, dan skripsi).

a. Jurnal, Laporan Penelitian, Skripsi, Tesis dan Disertasi

Fakhri. (2017). Identifikasi rangka manusia Situs Gua Balang Metti, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. *Walenna*, 15(2), 89–100.

BPCB Makassar. (2013). *Survey Penyelamatan Gua Uhalie dan Gua Batti Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone*. Makassar.

Hasanuddin. (2015). “Kebudayaan Megalitik di Sulawesi Selatan dan Hubungannya dengan Asia Tenggara”. *Thesis Ph.D.* Pulau Penang: University Sains Malaysia.

b. Buku:

Hodder, I. (1986). *“Reading The Past, Current Approaches to Interpretation in Archaeology”*, Cambridge: University Press.

Fakhri. (2017). Fauna dan Strategi Subsistensi Penghuni Situs Pangganikang 4000 Tahun Yang Lalu. In M. I. Mahmud & B. Hakim (Eds.), *Butta Toa: Jejak arkeologi budaya Toala, logam dan tradisi berlanjut di Bantaeng* (pp. 49–74). Makassar: Balai Arkeologi Sulawesi Selatan.

c. Sumber Internet:

William P. Endicott. (1997). Morotai Stepping Stone to the Philippines.”World War II. Retrieved March 25, 2018, from http://www.33rdinfantrydivision.org/documents/morotai_article_endicott.pdf

10. Penulisan Biodata Penulis

- a. Biodata terdiri atas: nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, pekerjaan, kepakaran.
- b. Setiap penulis diharuskan melampirkan biodata.
- c. Nama penulis ditempatkan di atas, rata kiri (align text left) dan ditebalkan

11. Naskah disubmit melalui Open Journal System (OJS) di laman <http://walennae.kemdikbud.go.id/index.php/walennae/index>

12. Redaksi membuka kesempatan bagi siapa saja (peneliti, dosen, guru dan tenaga profesional lain) untuk mengirimkan naskah sesuai dengan kualifikasi Jurnal Walennae.

13. Kepastian pemuatan atau penolakan artikel diberitahukan secara tertulis melalui pos atau pos-el.

14. Artikel yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.

15. Redaksi mempunyai kewenangan mengatur waktu penerbitan dan format penulisan sesuai format penulisan naskah Jurnal Walennae.

16. Naskah yang dinyatakan tidak dan atau belum layak terbit akan dikirim kembali ke penulis yang bersangkutan dengan beberapa catatan.

17. Setiap naskah yang dikirim **wajib** melampirkan **Biodata Penulis** dan **Surat Pernyataan** atau **Copyright Notice** (kedua kelengkapan wajib tersebut dapat dikirim terpisah melalui email).

18. Panduan Penulisan, Template Jurnal dan Copyright Notice dapat diunduh di laman <http://walennae.kemdikbud.go.id/index.php/walennae>)

Alamat Redaksi

Balai Arkeologi Sulawesi Selatan
Jalan Pajaiyang No. 13 Sudiang Raya, Makassar 90242
Telepon : 0411 – 510490 Fax. : 0411 – 510498
Email : jurnal.walennae@gmail.com
Open Journal System (OJS) : www.walennae.kemdikbud.go.id
Website: www.arkeologi-sulawesi.com

WALENNAE

Jurnal Arkeologi Sulawesi Selatan dan Tenggara
Journal of Archaeological Research of South and Southeast Sulawesi

ISSN (p) 1411-0571
ISSN (e) 2580-121X



Media Komunikasi Arkeologi Indonesia
Diterbitkan oleh Balai Arkeologi Sulawesi Selatan
Jl. Pajjaiyang No.13, Sudiang Raya
Makassar, 90242, Sulawesi Selatan
INDONESIA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BALAI ARKEOLOGI SULAWESI SELATAN
Wilayah Kerja Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara Dan Sulawesi Barat